

**ANALISIS PERSEPSI AUDIENS TERHADAP KRITIK SOSIAL DAN SARKASME
MELALUI *STAND UP COMEDY***



SKRIPSI

**Diajukan untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ilmu Komunikasi pada Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia**

Disusun Oleh:

Sepnida Anisa Nur Leksono

21321306

**PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL BUDAYA
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA
2025**

LEMBAR PERSETUJUAN

SKRIPSI

Analisis Persepsi Audiens Terhadap Kritik Sosial Dan Sarkasme Melalui *Stand Up Comedy*

Disusun Oleh:

SEPNIDA ANISA NUR LEKSONO

21321306

Telah disetujui dosen pembimbing skripsi untuk diujikan dan dipertahankan di hadapan tim penguji skripsi.

Tanggal: 25 September 2025

Mengetahui

Dosen Pembimbing Skripsi,

Ratna Permata Sari, S.I.Kom., MA.

NIDN. 0509118601

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Analisis Persepsi Audiens Terhadap Kritik Sosial Dan Sarkasme Melalui *Stand Up Comedy*

Disusun Oleh:

SEPNIDA ANISA NUR LEKSONO

21321306

Telah dipertahankan dan disahkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Tanggal: 20 Oktober 2025

Dewan Penguji:

1. Ketua : Ratna Permata Sari, S.I.Kom., MA.
NIDN. 0509118601 (.....)
2. Anggota : Puji Rianto, S.IP., M.A.
NIDN. 0503057601 (.....)

Mengetahui Ketua Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial Budaya
Universitas Islam Indonesia

Dr. Zaki Habibi., M.Comms

NIDN. 0517078101

PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK

Bismillahirrahmanirrahim

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Sepnida Anisa Nur Leksono

Nomor Mahasiswa : 21321306

Melalui surat ini saya menyatakan bahwa:

1. Selama menyusun skripsi ini saya tidak melakukan tindak pelanggaran akademik dalam bentuk apapun, seperti penjiplakan, pembuatan skripsi oleh orang lain, atau pelanggaran lain yang bertentangan dengan etika akademik yang dijunjung tinggi Universitas Islam Indonesia.
2. Karena itu, skripsi ini merupakan karya ilmiah saya sebagai penulis, bukan karya jiplakan atau karya orang lain.
3. Apabila di kemudian hari, setelah saya lulus dari Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya, Universitas Islam Indonesia, ditemukan bukti secara meyakinkan bahwa skripsi ini adalah karya jiplakan atau karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang ditetapkan Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya setuju dengan sesungguhnya.

Yogyakarta,
Yang menyatakan,

(Sepnida Anisa Nur Leksono)

MOTTO

فَيَكُونُ كُنْ لَهُ يَقُولُ فَإِنَّمَا أَمْرًا قَضَى إِذَا

“He is the Originator of the heavens and the earth! When He decrees a matter, He simply tells it, “Be!” And it is!”

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan karya ini kepada keluarga dan sahabat yang telah mendukung penulis dalam kondisi apapun.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala limpahan rahmat, taufik, hidayah-Nya, serta kekuatan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Analisis Persepsi Audiens Terhadap Kritik Sosial dan Sarkasme melalui *Stand Up Comedy*”. Skripsi ini disusun sebagai bentuk tanggung jawab dan dedikasi penulis dalam menyelesaikan studi sarjana. Selama proses penelitian dan penulisan skripsi, penulis banyak mendapat dukungan dan bantuan baik secara lahir maupun batin dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan kekuatan kepada penulis hingga saat ini.
2. Orang tua penulis yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta semangat tiada henti di setiap langkah perjalanan penulis. Semoga segala kebaikan dan pengorbanan yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT., sehingga penulis kelak dapat membalasnya menjadi pribadi sukses sebagaimana yang mereka doakan.
3. Ibu Ratna permata Sari, S.I.Kom., MA. selaku Dosen Pembimbing Skripsi, terima kasih atas segala bimbingan, motivasi, dan kesabaran yang sangat berarti selama proses penyusunan skripsi penulis sehingga dapat terselesaikan dengan baik.
4. Dr. Zaki Habibi, S.I.P., M.Comms. selaku Kepala Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia, terima kasih atas segala bentuk dukungan serta penyediaan fasilitas yang mendukung proses pembelajaran penulis selama menempuh masa studi.
5. Dr. Herman Felani Tandjung, S.S., M.A. selaku Dosen Pembimbing Akademik, terima kasih atas bimbingan, perhatian, dan arahan akademik yang telah membantu penulis selama masa studi dengan lebih terarah.
6. Seluruh dosen dan staff Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia atas ilmu, pengalaman, dan pelayanan yang diberikan selama masa perkuliahan hingga akhir studi.

7. Keluarga besar penulis, Bang Hakim, Dik Bitu, Om Uya, Tante Tutik, Tante Ita, Alm. Om Guruh, Ceo, Oza, Quin, dan Seikha atas segala semangat dan dukungan yang diberikan selama proses penyusunan skripsi ini.
8. Rekan dekat penulis, Almarhum Bisma Ariya Samudera, terima kasih telah hadir di kehidupan penulis untuk memberikan kasih sayang, perhatian, dan ketulusan cintanya kepada penulis. *Finally I did it*, Bis.
9. Sahabat penulis semasa sekolah, Sahda Vania, Shalma Alaika, Azmi Yulia, Aisya Safira, Shalma Khoirunnisa, Nira Naviga, Aldo Giovany, Ivan Achmad, Adrian Irfan, Rafi Hafidin, M. Hafizh, Sultan Farrel, Syahla Tabina, Latifa Dyah, Dela Fitri, dan Zanadia Manik. Terima kasih atas dukungan dan motivasi yang diberikan kepada penulis.
10. Sahabat penulis selama berada di Yogyakarta, Bunga, Bila, Gita, Sugih, Muyas, Adel, Arka, Fadly, Asip, Caca, Remy, Yudhis, Matondang, Ilyas, Nikol, Andika, Zahra, Syifa, Sasa, Sitta, Baskoro, Farah, Rayyan, Cemoh, Iki, dan Flora yang senantiasa ada disamping penulis untuk menguatkan, mendengar, dan memberi canda tawa. Terima kasih atas kehadiran dan segala hal yang diberikan kepada penulis.
11. Seluruh teman penulis yang tidak bisa disebutkan satu persatu, terima kasih kerana semesta mengizinkan kita bertemu untuk memberikan warna di hidup penulis.
12. Terakhir, terima kasih kepada diri sendiri yang selalu kuat atas segala terpaan kehidupan dan keberanian langkah yang diambil di tengah banyaknya ketakutan dan keraguan yang ada.

Penelitian ini merupakan langkah awal penulis dalam menerapkan dan memperluas wawasan yang diperoleh selama menempuh pendidikan di Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Islam Indonesia. Besar harapan penulis agar hasil penelitian ini dapat memberikan nilai guna serta menjadi sumber inspirasi bagi pembaca yang berminat mendalami topik sejenis. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih memiliki keterbatasan, oleh karena itu segala bentuk kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis hargai demi perbaikan di masa yang akan datang.

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN	i
SKRIPSI	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN ETIKA AKADEMIK	iii
MOTTO	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
1. Manfaat Teoritis	5
2. Manfaat Praktis	5
E. Penelitian Terdahulu	5
F. Kerangka Teori	7
1. Audiens Analysis	7
2. Persepsi Audiens	8
3. <i>Stand Up Comedy</i>	9
4. Kritik Sosial	10
5. Sarkasme	14
G. Metode Penelitian	16
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	16
2. Waktu dan Lokasi Penelitian	17
3. Informan Penelitian	17
4. Teknik Pengumpulan Data	17
5. Teknik Analisis Data	19
BAB II	21
GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN	21

A. Video <i>Stand Up Comedy</i> Kiky Saputri	21
B. Video <i>Stand Up Comedy</i> Bintang Emon	23
BAB III	27
HASIL TEMUAN PENELITIAN	27
A. Profil Narasumber	27
B. Temuan Data Audiens Mahasiswa	28
C. Temuan Data Politikus	49
BAB IV	72
PEMBAHASAN	72
A. Persepsi Audiens Terhadap Konten <i>Stand Up Comedy</i> Kiky Saputri dan Bintang Emon	72
B. Analisis Data	72
C. Pembahasan	94
BAB V	97
PENUTUP	97
A. Kesimpulan	97
B. Keterbatasan Penelitian	98
C. Saran	98
DAFTAR PUSTAKA	99
LAMPIRAN	102

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Proses Analisis Data (Miles & Hubnerman, 1994).	19
Gambar 2. 1 Objek Video Penelitian Kiky Saputri	21
Gambar 2. 2 Wajah Kiky Saputri	22
Gambar 2. 3 Instagram Kiky Saputri	22
Gambar 2. 4 Objek Video Penelitian Bintang Emon	23
Gambar 2. 5 Wajah Bintang Emon	24
Gambar 2. 6 Instagram Bintang Emon	25
Gambar 3. 1 Video Kiky Saputri	26
Gambar 3. 2 Video Bintang Emon	36

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Data Diri Audiens Politikus	27
Tabel 3. 2 Data Diri Audiens Mahasiswa	27
Tabel 3. 3 Persepsi Audiens Mahasiswa terhadap Kritik Sosial dan Sarkasme dalam Stand Up Comedy	49
Tabel 3. 4 Persepsi Audiens Politikus terhadap Kritik Sosial dan Sarkasme dalam Stand Up Comedy	71

ABSTRAK

Leksono; Sepnida Anisa Nur, 21321306. Analisis Persepsi Audiens Terhadap Kritik Sosial Dan Sarkasme Melalui *Stand Up Comedy* (Skripsi Sarjana). Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial Budaya. Universitas Islam Indonesia. 2025.

Stand Up Comedy di Indonesia selain berfungsi sebagai medium hiburan, juga menjadi medium penyampaian kritik sosial. tetapi juga menjadi sarana penyampaian pesan kritis kepada publik. Salah satu bentuk pesan tersebut adalah kritik sosial yang sering dikemas dalam sarkasme untuk menyoroti permasalahan di masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis persepsi audiens terhadap bentuk kritik sosial dan sarkasme dalam *Stand Up Comedy* yang dibawakan oleh Kiky Saputri dan Bintang emon, serta membandingkan pandangan audiens mahasiswa dan politikus.

Metode penlitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Responden penelitian adalah mahasiswa dan politisi anggota DPRD. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas responden mahasiswa menyetujui kritik sosial dan sarkasme yang disampaikan para komika, memandangnya sebagai bentuk control sosial yang relevan serta efektif dalam menyuarakan keresahan publik. Sebaliknya, responden politisi cenderung menunjukkan sifat defensif terhadap penyampaian kritik sosial dan sarkasme yang dibawakan komika, mempertimbangkan pentignya menjaga proporsionalitas penyampaian dan menghindari generalisasi yang merugikan. Perbedaan persepsi ini dipengaruhi oleh latar belakang sosial, pengalaman, dan posisi masing-masing audiens.

Kata kunci: *Stand Up Comedy*, Kritik Sosial, Sarkasme, Moral, Birokrasi, Politik, Persepsi Audiens

ABSTRACT

Leksono; Sepnida Anisa Nur, 21321306. *Analysis of Audience Perceptions of Social Criticism and Sarcasm Through Stand Up Comedy (Thesis Undergraduate).* Communication Science, Faculty of Social and Cultural Science. Universitas Islam Indonesia. 2025.

Stand Up Comedy in Indonesia operates not only as a medium of entertainment but also as an important vehicle for social critique. It facilitates the dissemination of critical messages to the public, with one prominent form being social criticism, frequently articulated through sarcasm to underscore prevailing societal issues. This study aims to analyze audience perceptions of the manifestations of social criticism and sarcasm within Stand Up Comedy performances by Kiky Saputri and Bintang Emon, while simultaneously juxtaposing the perspectives of student audiences with those of political constituents.

The research methodology employed in this investigation is descriptive qualitative, utilizing interviews as the primary means of data collection. The respondents comprised both students and members of the Regional People's Representative Council (DPRD). The findings indicate that a considerable majority of the student respondents expressed approval of the social criticism and sarcasm articulated by the comedians, perceiving these elements as relevant and effective forms of social control that articulate public concerns. In contrast, the political respondents exhibited a defensive stance toward the social criticism and sarcasm expressed by the comedians, highlighting the necessity of maintaining proportionality and avoiding detrimental generalizations. Such discrepancies in perception are influenced by the distinct social backgrounds, experiences, and roles of each audience group, which ultimately shape their interpretations and responses to the comedic content.

Keywords: *Stand Up Comedy, Social Criticism, Sarcasm, Morality, Bureaucracy, Politics, Audience Perception*

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kehadiran seni komedi di Indonesia menjadi salah satu bentuk kebudayaan yang diciptakan oleh masyarakatnya. Secara periodisasi, perkembangan komedi di Indonesia terbagi menjadi 3 runtutan waktu. Pertama, era 60-an dimana komedi masih merajah dunia pentas kesenian seperti ludruk, ketoprak, lenong, dan lain sebagainya. Selain seni pertunjukan, komedi kala itu juga populer pada hadirnya majalah Humor Stop. Grup lawak legendaris bernama Srimulat juga turut memeriahkan panggung kesenian kala itu.

Era 70-80-an menitikberatkan pada pengembangan karakter dan humor yang mengundang tawa, dipengaruhi oleh gaya humor ala Chaplin. Contohnya, film Koboï Cengeng dan kelompok komedi seperti Kwartet Jaya dan Gerak Musik Seloroh (GM Selo) yang populer lewat acara Sersan (Serius Santai) Prambors. Pada era 90-an hingga saat ini, seni komedi banyak dimuat dalam bentuk majalah Humor populer, munculnya grup komedi Warkop DKI dengan humor intelektual dan satir politik, serta tren komedi berbasis *story telling* yang disukai oleh banyak penonton, diwujudkan dalam acara variety show seperti Bajaj Bajuri dan Office Boy (Aritama, 2021).

Seni komedi menjadi salah satu bentuk hiburan yang diciptakan oleh seorang komedian. Masing-masing komedian memiliki ciri khasnya sendiri untuk menggaet perhatian masyarakat dengan memberikan output berupa gelak tawa yang diciptakan. Humor yang diciptakan oleh seorang komedian dianggap sebagai keahlian penting dalam berbagai situasi, namun tidak semua orang memiliki kemampuan alami untuk melakukannya dengan mudah. Beberapa orang mengalami kesulitan dalam membuat humor karena kurangnya pemahaman tentang strategi yang efektif. Selain itu, ada juga yang enggan menggunakan humor karena khawatir akan menyinggung perasaan orang lain (Fierda Sagita, 2023).

Dalam konteks komunikasi massa, persepsi audiens memiliki peran penting dalam menentukan bagaimana pesan diterima dan dimaknai. Setiap individu memiliki latar belakang sosial, budaya, dan pengalaman yang berbeda, sehingga cara mereka memahami suatu bentuk komunikasi termasuk kritik sosial dan sarkasme juga berbeda. Persepsi bukan hanya berkaitan dengan apa yang ditangkap oleh pancaindra,

tetapi juga bagaimana seseorang memberikan makna terhadap pesan yang diterima. Oleh karena itu, memahami persepsi audiens terhadap kritik sosial menjadi hal yang penting, karena dapat menunjukkan sejauh mana pesan yang disampaikan komedian seperti Bintang Emon berhasil dipahami sesuai dengan maksud yang diinginkan. Selain itu, perbedaan persepsi antara mahasiswa dan politisi juga mencerminkan dinamika sosial yang menarik untuk dikaji dalam konteks komunikasi publik di Indonesia.

Seni komedi semakin dikenal oleh khalayak umum melalui gaya komedi monolog yang dikembangkan menjadi humor pada pertunjukan *Stand Up Comedy*. Jenis seni komedi ini mulai masuk Indonesia tahun 1997, diperkenalkan oleh Ramon Papan lalu disusul oleh Iwel Sastra yang memproklamirkan dirinya sebagai seorang *Stand Up Comedian* pada tahun 1998 (Faizal, 2022). Lalu seni ini mulai naik daun di Indonesia pada awal tahun 2000an di Jakarta, kemudian berkembang dengan cepat dan meluas hingga ke berbagai daerah di Indonesia (Meydiawati, 2023).

Secara Bahasa, *Stand Up* artinya berdiri dan *Comedy* artinya komedi. *Stand Up Comedy* adalah salah satu bentuk komedi verbal yang dilakukan secara perseorangan atau bermonolog mengenai suatu topik di hadapan penonton secara langsung. Artinya, komedi jenis ini secara teknis mewajibkan pelakunya berada sendirian di atas panggung dengan mengandalkan tindak verbal untuk membuat orang lain tertawa (Mitang, 2020).

Materi yang dibawakan ketika mereka berada di atas panggung adalah kejujuran dan keaslian dalam menyampaikan pengalaman hidup pribadi, pandangan unik tentang dunia sekitarnya, atau bahkan mengomentari isu-isu kontemporer seperti politik, budaya, dan kehidupan sehari-hari. *Stand Up Comedy* dianggap sebagai komedi pintar lantaran sang komika, sebutan bagi penampil *Stand Up Comedy*, dapat membawakan materi lawakan yang berisi kritik, mulai dari kritik kepada pemerintah, lingkungan, kebijaksanaan, keadaan sosial bahkan kritik untuk diri sendiri (Ayu, 2014).

Kepopuleran *Stand Up Comedy* mulai terasa sejak adanya stasiun televisi yang membuat program kompetisi. Contohnya, Kompas TV dengan programnya yang bernama *Stand Up Comedy Indonesia* (SUCI) dan Indosiar yang memiliki program *Stand Up Comedy Academy* (SUCA). Dengan adanya kompetisi ini, mereka berhasil melahirkan para Komika (nama untuk para *Stand Up Comedian*) yang memiliki ciri khasnya tersendiri dalam menyampaikan materinya kepada penonton. Dengan kepopuleran *Stand Up Comedy* di Indonesia ini, beberapa komika senior seperti Pandji

Pragiwaksono, Raditya Dika, Ernest Prakasa, Ryan Adriandhy, dan Isman Suryaman berinisiatif untuk membentuk komunitas sebagai wadah untuk belajar dan mengembangkan bakat terbaru seseorang dalam dunia seni dan pertunjukan. Lalu lahirlah komunitas yang bernama Standupindo yang saat ini telah memiliki banyak cabang di tiap provinsi.

Hadirnya beberapa kompetisi *Stand Up Comedy* menjadikan para komika bersemangat untuk lebih giat lagi dalam menampilkan karya mereka, seperti Bintang Emon dan Kiky Saputri yang memperoleh ketenarannya melalui ajang kompetisi tersebut. Keduanya dikenal dengan gaya komedi mereka yang cerdas dan tajam, yang sering kali memuat sindiran-sindiran sarkastik yang menggelitik. Bintang Emon yang memiliki nama asli Gusti Muhammad Abdurrahman Bintang Mahaputra memiliki pengikut pada akun instagramnya, @bintangemon, sebanyak 5,8JT yang saat ini menyita perhatian warganet lantaran konten video *Stand Up Comedy*-nya menyuarakan keresahan di kehidupan sehari-hari baik untuk mewakili masyarakat ataupun keresahan diri sendiri (Hafidan Hutomo, 2023). Konten yang dimilikinya semakin menarik karena ia menyampaikan keresahan-keresahannya dengan dibungkus komedi.

Sementara itu, Kiky Saputri yang bernama asli Rizky Nurasly Saputri, seorang komedian yang terkenal karena keberaniannya mengkritisi tokoh-tokoh penting di bangku pemerintah melalui pertunjukan roasting *Stand Up Comedy*. Tak tanggung-tanggung, Kiky menyampaikan materi berupa fakta maupun kabar miring yang langsung ia lontarkan di hadapan sang pejabat atau subjek yang di roastingnya. Dengan aksinya yang begitu berani, wanita yang mengawali kariernya di *Stand Up Comedy Academy* (SUCA 4) ini mendapat julukan “*Queen of Roasting*” (Yusup, 2023).

Kedua komika ini tidak ragu untuk mengambil risiko dengan membahas isu-isu sensitif atau kontroversial, termasuk politik, dalam pertunjukannya. Mereka menggunakan sindiran sarkastik dengan kecerdasannya membingkai pesan-pesan kritis dalam humor yang menghibur. Namun di balik gaya komedi yang berbeda, keduanya memiliki kesamaan dalam kecenderungan untuk menggunakan sindiran sarkasme sebagai alat untuk menyampaikan pesan-pesan kritis mereka. Sindiran-sindiran ini sering kali menyentuh berbagai aspek kehidupan, termasuk politik, tokoh-tokoh publik, dan fenomena sosial yang kontroversial. Melalui sindiran sarkasme

mereka yang mereka sampaikan dalam pertunjukan *Stand Up Comedy* Bintang Emon dan Kiky Saputri mampu membangkitkan kesadaran kritis di antara penonton mereka.

Banyak gelak tawa yang menghiasi telinga para penonton ketika sang komika sedang menyampaikan materinya, namun sebuah pertunjukkan komedi yang dinilai sukses tidak hanya dilihat dari seberapa kencang para penonton tertawa tetapi juga ketika komedi ini dapat menciptakan rasa bersalah, gelisah, hingga rasa yang dapat membuat seseorang itu menyadari suatu hal (Ali, 2018). Hal ini tercermin pada masa pemilihan umum 2024 di mana *Stand Up Comedy* menjadi salah satu wadah yang penting untuk menyuarakan kritik terhadap proses politik, calon presiden dan wakil presiden, serta isu-isu yang relevan dalam masyarakat. Melalui lawakan-lawakan mereka, para komika ini tidak hanya menghibur, tetapi juga menghadirkan pemikiran kritis penonton terhadap berbagai masalah politik yang sedang berkembang.

Dengan begitu, pemahaman tentang penyampaian *Stand Up Comedy* dari Bintang Emon dan Kiky Saputri terhadap pemikiran politik penonton juga dapat membuka jendela untuk melihat bagaimana humor dapat menjadi alat untuk merangsang pikiran dan memengaruhi perilaku. Di balik lelucon mereka, terdapat potensi untuk menciptakan opini politik yang kuat di kalangan penonton, baik itu dalam bentuk pembahasan serius maupun pemikiran yang lebih santai. Bentuk komunikasi yang dibawakan memiliki sifat kompleks yang tidak hanya bertujuan menghibur, tetapi juga memengaruhi persepsi dan pemahaman audiens terhadap isu-isu tertentu. Misalnya, sindiran politik dan kritik sosial yang dapat membentuk pandangan dan sikap audiens terhadap politik dan sosial dalam masyarakat.

Video yang disampaikan Kiky Saputri dalam kanal YouTube Stand Up Kompas TV yang berjudul “PECAH!!! Kiky Saputri Roasting Anggota DPR: Musuh Rakyat dan Banyak Alasan” dan video yang disampaikan Bintang Emon dalam Instagram pribadi @bintangemon menjadi contoh konkret bagaimana materi *Stand Up Comedy* dapat menjangkau audiens luas dan memantik diskusi kritis di ruang publik.

Kedua video ini dipilih karena sama-sama memuat unsur sarkasme sebagai alat penyampaian kritik sosial, namun melalui pendekatan yang berbeda. Kiky Saputri cenderung menggunakan gaya konfrontatif dan langsung menyasar public figure, sedangkan Bintang Emon lebih memilih melalui sindiran implisit melalui penggambaran sehari-hari. Penelitian ini penting untuk dilakukan karena memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana hiburan dapat

menjadi bagian penting dari pembentukan opini kritik sosial dan sarkasme di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana persepsi audiens terhadap kritik sosial dan sarkasme dalam *Stand Up Comedy* yang dibawakan oleh Kiky Saputri dan Bintang Emon?

C. Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui persepsi audiens terhadap kritik sosial dan sarkasme dalam *Stand Up Comedy* yang dibawakan oleh Kiky Saputri dan Bintang Emon.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memperkaya teori persepsi dengan menganalisis bagaimana audiens menafsirkan sindiran sarkastik dalam konteks politik dan sosial melalui *Stand Up Comedy*. Studi ini juga menambah wawasan tentang peran media dalam wacana politik serta memberikan kontribusi pada kajian budaya tentang humor dan sarkasme di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini membantu komedian, aktivis, dan pembuat konten mengembangkan strategi komunikasi yang efektif dalam menyampaikan kritik sosial dan politik serta memahami respons audiens terhadap konten sarkastik, sementara pejabat dan politisi dapat belajar dari kritik yang disampaikan melalui humor. Melalui penelitian ini, generasi muda diharapkan dapat meningkatkan kesadaran mengenai isu-isu politik melalui media yang selaras dengan era saat ini.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berfungsi sebagai referensi, perbandingan, dan landasan kuat untuk karya tulis ilmiah yang dibuat. Dalam penelitian terdahulu, peneliti mencari penelitian-penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang relevan dengan topik penelitian yang akan dilakukan (Azis, 2023). Penelitian terdahulu ini digunakan untuk membandingkan dengan penelitian yang akan dilakukan, sehingga peneliti dapat memahami lebih baik tentang subjek penelitian dan memecahkan masalah yang dihadapi.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rivaldi Akbar, dkk (Universitas Negeri Jember, 2025) yang berjudul *Stand Up Comedy Sebagai Alat*

Kritik Sosial dan Budaya di Negara Indonesia (Studi Kasus Komika Pandji Pragiwaksono). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis konten terhadap 5 pertunjukan Pandji di YouTube dari tahun 2018 sampai 2023 yang diperkuat melalui triangulasi respons audiens. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa adanya pengulangan topik-topik sensitive yang dibawa oleh Pandji menggunakan berbagai analogi kebahasaan untuk menyindir beberapa topik dalam politik kontemporer. Dalam penelitiannya, *Stand Up Comedy* muncul sebagai alat ampuh yang menggabungkan hiburan dengan kesadaran kritis. Persamaan dari penelitian ini terletak pada objek yang diteliti yaitu, kritik sosial pada *Stand Up Comedy*. Sedangkan, perbedaannya terletak pada pendekatan penelitian yang dilakukan serta teknik pengumpulan datanya.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Augustinus Cheasea Jossy Pratama, dkk (UPNV Jawa Timur, 2023) yang berjudul Kritik Sosial Pada Pemerintah (Analisis Wacana Kritis Bintang Emon di Kanal YouTube Deddy Corbuzier Episode Somasi). Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan model analisis wacana kritis oleh Teun Van Dijk. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, studi literatur, dan analisis teori. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada dimensi teks menyiratkan kritik terhadap pemerintah dan mengajak masyarakat untuk peka terhadap masalah publik. Dimensi kognisi sosial mengungkapkan bahwa kritik sosial bertujuan untuk menunjukkan ketimpangan dalam masyarakat. Dimensi konteks sosial menunjukkan bahwa Bintang Emon memiliki kekuasaan untuk mempengaruhi dominasi sosial dan akses yang lebih besar. Persamaan dalam penelitian ini terdapat pada objek penelitian berupa kritik sosial pada pemerintah. Sedangkan perbedaannya terdapat pada teknik pengumpulan data yang digunakan.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Kesiya Agustina dan Ahmad Harun Yahya (Universitas Negeri Islam Raden Fatah Palembang, 2023) yang berjudul *Stand Up Comedy* Dan Kritik Sosial Di Indonesia (Analisis Wacana Pada Abdurrahim Arsyad). Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa materi Abdurrahim Arsyad dalam video "Reformasi Dikorupsi" dan "Bahasa Unik di Indonesia" mengkritik ketimpangan sosial dan mewakili suara masyarakat kecil. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama meneliti mengenai kritik sosial dalam *Stand Up Comedy*. Sedangkan perbedaannya

terletak pada teori yang digunakan yaitu, analisis wacana dan subjek penelitian berupa video Abdurrahim Rasyid.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Dina Safira Putri, dkk (UPNV Jawa Timur, 2022) yang berjudul Kritik Satire Pada pejabat Negara Indonesia Melalui Roasting *Stand Up Comedy* Kiky Saputri di Youtube. Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan etnografi virtual melalui wawancara virtual kepada 6 orang informan. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa Kiky berani meroasting pejabat negara dengan kritik satire secara terbuka, menyebut nama, kejadian, dan kasus aktual. Keberanian tersebut didasari kejujuran pada fakta, menggunakan diksi yang menghindari hujatan, sarkasme, dan hinaan. Kritik satire digunakan sebagai alat evaluasi kinerja pejabat negara dan sarana edukasi politik. Persamaan dalam penelitian ini terletak pada subjek penelitian yang sama-sama menggunakan video *Stand Up Comedy* Kiky Saputri serta isu kritik satire yang digunakan. Sedangkan perbedaannya terletak pada video yang diteliti berupa pejabat seorang Menteri.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Yulius Kurniadi, dkk (Universitas Multimedia Nusantara, 2023) yang berjudul Humor and Gen Z: A Reception Study of Bintang Emon's *Stand Up Comedy* in Somasi Content. Penelitian ini menggunakan metode penelitian paradigma konstruktive melalui wawancara kepada pelajar berumur 20-21 tahun yang menonton acara *Stand Up Comedy* dan mengikuti jalannya berita politik. Hasil dari penelitian ini menyoroti dampak pandemi dari *Stand Up Comedy* di Indonesia, yang mendorong komedian beralih ke platform digital seperti YouTube untuk menjangkau audiens lebih luas. Analisis video stand-up Bintang Emon dari acara Somasi menunjukkan bahwa materinya yang sarat sarkasme, satire, dan ironi berhasil menyentuh isu sosial dan politik, dan diterima beragam oleh Generasi Z. Persamaan dari penelitian ini terletak pada subjek penelitian yang sama-sama menggunakan video *Stand Up Comedy* Bintang Emon dan. Sedangkan perbedaannya terletak pada teori yang digunakan yaitu Resepsi Audiens.

F. Kerangka Teori

1. Audiens Analysis

Audience analysis juga dikenal sebagai Analisis Audiens, adalah proses mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dengan tujuan untuk memahami audiens lebih baik lagi (Medina, 2023). Analisis audiens juga membantu dalam

mengidentifikasi topik yang sedang tren dan menentukan topik khusus yang memiliki kemungkinan besar akan ditanggapi oleh audiens. Selain itu, analisis audiens membantu dalam memahami bagaimana audiens menerima, membaca, dan merespon isi media, serta bagaimana mereka menggunakan media untuk interaksi emosional dan lainnya (Imron, 2012)

Dalam perspektif teori, audiens dapat dilihat sebagai sekumpulan orang yang menjadi pembaca, pendengar, atau pemirsa berbagai media, dengan sifat-sifat heterogen dan anonym. Analisis resepsi, sebagai pendukung dalam kajian terhadap khalayak, menunjukkan bahwa khalayak tidak pasif dalam menerima sebuah pesan dalam sebuah komunikasi massa, melainkan mereka memiliki kekuasaan penuh dalam menghasilkan makna dari pesan-pesan yang dihasilkan media.

Maka dari itu, analisis audiens adalah proses yang sangat penting dalam komunikasi massa untuk memahami audiens lebih baik lagi dan 'membuat keputusan yang terarah. Analisis audiens membantu dalam mengidentifikasi topik yang sedang tren, memahami bagaimana audiens menerima isi media, dan memahami kebutuhan dan perhatian audiens dalam konteks presentasi.

2. Persepsi Audiens

Persepsi dalam konteks ini mengacu pada bagaimana individu mengalami dan menafsirkan stimuli secara indrawi, dimana setiap stimulus yang merangsang indera individu dapat memicu proses pembentukan persepsi. Proses ini secara psikologis dipengaruhi oleh pengalaman, pendidikan, dan lingkungan sosial individu secara umum. Persepsi mencakup tahap penerimaan stimulus (input), pengorganisasian stimulus, dan interpretasi atau penafsiran stimulus yang sudah diorganisasikan. Hal ini mengarah pada kemungkinan individu untuk menafsirkan perilaku orang lain sesuai dengan konteks dan pengalaman mereka sendiri (Mayangsari, 2016)

Model Proses Kognisi Blumenthal (1977), menjelaskan bahwa dalam pengolahan stimuli, otak manusia dapat memanipulasi memori dan mengubahnya menjadi imajinasi. Proses ini melibatkan struktur pikiran dan sistem sensoris yang dikendalikan oleh otak. Konsep dasar sensasi sebagai tahap awal dalam pembentukan persepsi terdiri dari stimulasi/rangsang, transduksi, dan ambang batas/treshold.

Selain penjelasan di atas, persepsi juga memiliki peran yang sangat penting dalam proses komunikasi, karena persepsi menentukan bagaimana pesan diterima

dan dimaknai oleh individu. Menurut Rakhmat (2005), persepsi merupakan proses pemberian makna terhadap stimulus inderawi yang diterima oleh seseorang. Dua individu dapat menerima stimulus yang sama, tetapi memberikan makna yang berbeda karena dipengaruhi oleh latar belakang sosial, pengalaman, serta sistem nilai yang mereka miliki.

Dalam konteks komunikasi massa, persepsi audiens menjadi hal yang sangat menentukan efektivitas pesan yang disampaikan komunikator. Sebuah pesan dapat dianggap sebagai kritik, hiburan, atau bahkan serangan tergantung pada bagaimana audiens memersepsinya. Hal ini menunjukkan bahwa makna suatu pesan tidak bersifat absolut, tetapi dibentuk melalui interaksi antara pesan dan latar belakang audiens (Effendy, 2011).

Penelitian ini menggunakan teori persepsi untuk memahami bagaimana dua kelompok audiens yang berbeda mahasiswa dan politisi memberikan makna terhadap sarkasme yang disampaikan oleh Bintang Emon dalam karya komedinya. Mahasiswa, dengan latar belakang akademik dan idealisme muda, cenderung memersepsikan sarkasme sebagai bentuk ekspresi kebebasan berpikir dan keberanian menyuarakan kebenaran. Sebaliknya, politisi yang memiliki tanggung jawab kelembagaan dan citra publik mungkin memersepsikan sarkasme secara lebih hati-hati dan normatif karena menyangkut etika serta posisi sosial mereka di hadapan masyarakat.

Dengan demikian, teori persepsi membantu menjelaskan mengapa perbedaan latar belakang sosial dan peran individu dapat menghasilkan perbedaan dalam memahami kritik sosial yang sama. Dalam konteks penelitian ini, persepsi tidak hanya dipahami sebagai proses psikologis, tetapi juga sebagai proses sosial yang membentuk cara individu menilai dan merespons pesan komunikasi dalam kehidupan publik.

3. *Stand Up Comedy*

Stand Up Comedy adalah bentuk seni yang menggabungkan humor, observasi, dan kritik sosial melalui penampilan komika di depan audiens. *Stand Up Comedy*, sebagai bentuk komedi tunggal, sering digunakan sebagai medium untuk menyuarakan kritik sosial dan sindiran terhadap berbagai aspek masyarakat, termasuk politik. Di Indonesia, *Stand Up Comedy* telah menjadi cara populer untuk mengomentari dan mengkritik isu-isu politik dan sosial melalui sindiran dan satire.

Komika Indonesia seperti Bintang Emon dan Kiky Saputri telah menggunakan *Stand Up Comedy* untuk mengekspresikan kritik sosial dan sindiran terhadap pejabat dan isu-isu politik yang relevan dengan masyarakat Indonesia (Ranteallo D. , 2014)

Stand Up Comedy juga digunakan sebagai cara untuk mengomentari berita politik dan kritik terhadap pejabat. Dengan menggunakan sindiran dan satire, *Stand Up Comedy* dapat menjadi cara efektif untuk mengkritik dan mengomentari berbagai aspek masyarakat, termasuk politik dan pejabat, serta mempengaruhi penonton melalui humor dan kritik sosial yang disampaikan. Humor berfungsi sebagai mekanisme pelepasan ketegangan atau stres, terutama dalam situasi politik yang penuh tekanan. *Stand Up Comedy* menawarkan audiens cara untuk melepaskan frustrasi mereka terhadap berita politik dan perilaku pejabat melalui tawa, sehingga mengurangi stres yang mereka rasakan. Dalam

Dalam analisis *Stand Up Comedy*, sindiran dan satire digunakan sebagai cara untuk mengkritik dan mengomentari berbagai aspek masyarakat, termasuk politik dan pejabat. Sindiran dan satire dapat berupa komentar sosial, pengamatan tentang berbagai segi masyarakat, budaya, dan politik, serta kritik terhadap kebijakan dan tindakan pejabat (Agung Ghani Putra, 2023).

4. Kritik Sosial

Kritik sosial dapat dipahami sebagai suatu aktivitas sosial yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk menganalisis, menilai, atau mengkaji keadaan suatu masyarakat pada saat tertentu. Kritik sosial dapat timbul karena adanya perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat, seperti perubahan hubungan antara buruh dan majikan dalam masyarakat kapitalis. Kritik sosial juga dapat berupa kritikan terhadap keadaan sosial yang tidak harmonis dan tidak sejalan, serta kritikan terhadap keadaan yang menyimpang dari nilai-nilai yang ada di dalam kehidupan masyarakat.

Kritik sosial dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, baik secara langsung maupun tidak langsung. Bentuk langsungnya mencakup tindakan sosial, aksi demonstrasi, dan unjuk rasa, sementara bentuk tidak langsungnya meliputi kritik melalui musik, puisi, film, teater, dan sejenisnya. Ragam kritik sosial ini memiliki pengaruh yang signifikan dalam masyarakat, memainkan peran penting dalam mengatur dinamika sosial dan hubungan antarpribadi. Kritik sosial dianggap sebagai bentuk komunikasi yang memanifestasikan diri baik secara lisan maupun

tertulis, dengan tujuan untuk mengatur sistem sosial dalam konteks masalah *interpersonal* (Ramadhan, 2019).

Menurut, Jurgen Habermas dalam karya monumentalnya *The Structural Transformation of the Public Sphere* (1962) menjelaskan bahwa ruang publik (*public sphere*) adalah sebuah arena di mana warga negara dapat berkumpul secara bebas untuk mendiskusikan dan membentuk opini tentang berbagai persoalan sosial dan politik. Dalam konteks ini, kritik sosial bukan hanya dimaknai sebagai ekspresi ketidakpuasan, tetapi sebagai hasil dari proses diskursus rasional yang muncul di ruang publik tersebut. Habermas menekankan bahwa kualitas diskusi publik ditentukan oleh *rational critical debate*, yaitu perdebatan yang berlandaskan argumentasi logis, terbuka, dan setara tanpa dominasi kekuasaan.

“The public sphere is a realm of our social life in which something approaching public opinion can be formed. Access is guaranteed to all citizens.”
Habermas (1989, hlm. 102)

Lebih lanjut, Habermas menggagas konsep ideal *speech situation* sebuah kondisi ideal di mana semua partisipan diskursus memiliki kesempatan yang sama untuk berbicara, mengajukan argumen, dan mempertanyakan klaim kebenaran tanpa paksaan. Dalam konteks ini, kritik sosial menjadi sah jika lahir dari komunikasi yang tidak terdistorsi, dan bertujuan untuk mencapai kesepahaman (*mutual understanding*) serta memperjuangkan keadilan sosial.

“Only those norms can claim to be valid that meet (or could meet) with the approval of all affected in their capacity as participants in a practical discourse.”
Habermas (1996, *Between Facts and Norms*, hlm. 107)

Habermas juga menyadari bahwa dalam masyarakat modern, ruang publik tidak hanya hadir dalam bentuk forum formal seperti media atau parlemen, tetapi juga dapat berkembang dalam bentuk ruang publik alternatif. Dalam kerangka ini, bentuk komunikasi seperti seni, teater, atau bahkan komedi, dapat memfasilitasi diskursus kritis selama ia berfungsi untuk mengungkap relasi kuasa yang timpang dan membangkitkan kesadaran publik.

“The world of lived experience is structured by communicative rationality, and critique can arise wherever distorted communication becomes transparent.”
Habermas (1984, *The Theory of Communicative Action, Vol. 1*, hlm. 86)

Dengan demikian, pendekatan Habermas relevan digunakan untuk menganalisis bagaimana sarkasme dan humor dalam pertunjukan *Stand Up Comedy*

menjadi bagian dari kritik sosial yang rasional, terutama ketika disampaikan oleh komika yang menyuarakan keresahan publik atas ketimpangan sosial dan ketidakseimbangan kekuasaan.

Menurut Soekanto (2017), masalah sosial dapat didefinisikan sebagai suatu kondisi ketidakharmonisan atau ketidaksesuaian antara unsur-unsur dalam struktur kebudayaan maupun kehidupan bermasyarakat, yang berpotensi mengganggu stabilitas dan keberlangsungan tatanan sosial. Permasalahan sosial yang muncul ketika interaksi sosial antarkomponen masyarakat tidak berjalan secara fungsional, sehingga menghambat pencapaian tujuan kolektif sebagian besar warga masyarakat, serta mengindikasikan adanya kegagalan lembaga-lembaga sosial dalam mengatur dan mengelola hubungan sosial secara efektif.

Soekanto menganggap ketidakstabilan problema sosial oleh masyarakat yang akhirnya menjadi kritik sosial dibagi menjadi 10 jenis, yaitu:

a. Masalah Kemiskinan

Kemiskinan merupakan kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi kebutuhan pokok hidup mereka sesuai standar sosial masyarakat. Ini tidak hanya mencakup keterbatasan ekonomi, tetapi juga meliputi keterbatasan akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pelayanan penting lain. Kondisi ini mengakibatkan ketidakadilan sosial dan menjadi pemicu lahirnya berbagai bentuk permasalahan sosial lain seperti pengangguran, kriminalitas, dan keterpinggiran sosial.

b. Masalah Kejahatan

Kejahatan adalah perilaku atau tindakan yang secara nyata bertentangan dengan norma hukum dan norma sosial yang berlaku. Kejahatan dapat muncul karena pemenuhan kebutuhan hidup yang tidak tercapai secara layak, sehingga individu atau kelompok mengambil jalan pintas yang melanggar hukum, seperti pencurian, penipuan, maupun tindak kekerasan. Selain kejahatan konvensional, kejahatan elite seperti korupsi dan suap juga menjadi perhatian utama karena terjadi pada level kekuasaan tinggi, berdampak luas, dan sulit diberantas.

c. Disorganisasi Keluarga

Disorganisasi keluarga adalah situasi ketika struktur serta fungsi keluarga sebagai unit dasar masyarakat terganggu, sehingga terjadi

perpecahan atau keretakan. Hal ini bisa berupa perceraian, pertengkaran terus-menerus, hilangnya salah satu peran utama dalam keluarga, hingga kekerasan dalam rumah tangga atau penelantaran anggota keluarga. Kondisi ini berdampak pada harmonisasi sosial anak, pola asuh yang gagal, dan pada akhirnya memicu masalah sosial yang lebih besar di komunitas.

d. Masalah Generasi Muda dalam Masyarakat Modern

Generasi muda mengalami berbagai tantangan ketika nilai-nilai sosial dan norma berubah dengan cepat di masyarakat modern. Mereka berada dalam fase transisi antara norma lama dan baru, sehingga sering terjadi gap atau konflik antargenerasi. Generasi muda menghadapi dilema apakah mengikuti arus perubahan atau mempertahankan nilai-nilai lama, sementara generasi tua cenderung sulit memberikan kepercayaan meski anak muda sebenarnya berpotensi besar. Pergolakan ini dapat memunculkan sikap memberontak dan apatis, serta menimbulkan keresahan sosial.

e. Masalah Peperangan

Peperangan, baik antarnegara maupun konflik internal (perang saudara), menimbulkan berbagai kerusakan fisik, psikologis, dan sosial di masyarakat. Situasi ini menyebabkan hilangnya rasa aman, rusaknya infrastruktur, pengungsian massal, dan meningkatnya penderitaan rakyat sipil. Kritik sosial terhadap perang biasanya menyoroti penyelenggara negara yang gagal menciptakan perdamaian dan cenderung memprioritaskan kepentingan tertentu dibandingkan kemaslahatan rakyat.

f. Masalah Moral

Masalah moral berhubungan dengan menurunnya standar atau nilai moral dalam masyarakat, seperti meningkatnya perilaku menyimpang, penyalahgunaan kekuasaan, hingga kurangnya teladan dari pemimpin. Gejala ini sering terlihat seiring berkembangnya zaman dan globalisasi yang mengubah pola pikir, gaya hidup, maupun sistem nilai. Masalah moral dapat memunculkan keresahan dan mengancam integritas kehidupan sosial.

g. Masalah Kependudukan

Laju pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali menimbulkan persoalan seperti ledakan penduduk, kepadatan hunian, persaingan kerja semakin ketat, urbanisasi, serta kesenjangan sosial. Pemerintah dihadapkan pada tantangan untuk menyediakan kebutuhan dasar, layanan kesehatan, pendidikan, dan ruang hidup yang layak. Jika tidak diatasi, ini berpotensi meningkatkan angka kemiskinan dan kerentanan sosial.

h. Masalah Lingkungan Hidup

Kerusakan lingkungan seperti polusi, deforestasi, perubahan iklim, dan penurunan kualitas alam akibat ulah manusia merupakan masalah serius di masyarakat modern. Pencemaran lingkungan bisa berdampak langsung terhadap kesehatan, mata pencaharian, hingga keberlanjutan kehidupan masyarakat. Kritik sosial dalam isu ini biasanya menyoroti kegagalan pemerintah, perusahaan, dan masyarakat sendiri dalam menjaga kelestarian lingkungan.

i. Masalah Birokrasi

Kritik terhadap birokrasi muncul dari ketidakefisienan, praktik korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan pelayanan publik yang buruk. Birokrasi yang seharusnya menjadi alat pelayanan masyarakat malah berubah menjadi instrumen kepentingan segelintir pihak, sehingga menimbulkan ketidakadilan, diskriminasi, dan memperlambat terwujudnya kesejahteraan sosial.

j. Masalah Politik

Masalah politik terjadi saat sistem kekuasaan dan kebijakan negara tidak berjalan sesuai prinsip keadilan dan demokrasi. Ini bisa terjadi dalam bentuk otoritarianisme, praktik politik uang, manipulasi hukum, serta keputusan politik yang tidak berpihak pada rakyat kecil. Fungsi politik sebenarnya untuk menata kehidupan masyarakat dan menjaga keadilan, namun seringkali justru menjadi sumber problematika sosial karena adanya kepentingan kelompok tertentu.

5. Sarkasme

Gaya bahasa sarkasme termasuk ke dalam gaya bahasa berdasarkan langsung tidaknya makna. Penggunaannya dapat dinilai melalui perubahan makna oleh penerima komunikasi yang memiliki kata kiasan. Terdapat kadungan kepahitan dan celaan getir yang dapat bersifat ironis, namun dapat juga tidak. Tujuan pastinya

untuk menyindir, menyinggung seseorang, atau bahkan memojokkan lawan. Sarkasme cenderung berupa sindiran langsung maupun kata sebaliknya yang berlawanan dengan maksud yang ingin disampaikan. (Farmida Siti, 2021)

Elizabeth Camp memandang sarkasme sebagai salah satu bentuk komunikasi tidak langsung (*indirect speech act*), di mana pembicara menyampaikan makna yang bertentangan dengan pernyataan literalnya. Pengucapannya secara harfiah sering kali justru kebalikan dari pesan yang ingin disampaikan. Sarkasme, menurut Camp, menuntut pemahaman konteks, pengetahuan bersama antara pembicara dan pendengar, serta sensitivitas terhadap isyarat non-verbal seperti intonasi atau bahasa tubuh. (Roy Putra, 2023)

Sarkasme biasanya digunakan untuk menyindir, mengkritik, atau mengekspresikan ketidaksetujuan dan ironi dengan cara yang tajam namun tetap tersembunyi secara halus.

Terdapat beberapa penanda yang dijadikan beberapa acuan untuk memudahkan mengklasifikasikan jenis gaya bahasa sarkasme yang dikemukakan oleh Elizabeth Camp dalam jurnal Irene Dinari (2015:498-499) yang berjudul “Jenis-jenis dan Penanda Majas Sarkasme dalam Novel *The Return of Sherlock Holmes*”. Berikut beberapa penanda gaya bahasa sarkasme:

a. Sarkasme Proposisi

Sarkasme yang terdapat pada tingkat isi pernyataan (*proposisi*). Pesan yang disampaikan secara literal bertolak belakang dengan makna sebenarnya. Pesannya mengandalkan pemahaman pendengar bahwa makna literalnya jelas-jelas tidak sesuai dengan kenyataan yang dimaksudkan. Contohnya, Seseorang berkata, "Wah, pemerintah kita sangat cepat tanggap menangani masalah!" pada saat penanganan masalah justru lambat.

b. Sarkasme Leksikal

Sarkasme yang menggunakan pilihan kata secara ironis atau mengejek; kata atau istilah tertentu diparodikan, dipelintir, atau dilafalkan dengan nada tertentu. Memiliki fokus pada kata tertentu yang sering dipakai dengan makna yang dibalikkan secara sarkastik. Contohnya, penggunaan kata "hebat" atau "luar biasa" dengan nada mengejek untuk sesuatu yang jelas-jelas buruk.

c. Sarkasme Prefiks

Sarkasme yang menggunakan pernyataan deklaratif agar tidak menimbulkan kebingungan yang lebih besar dibanding Sarkasme Proposisi. Ditandai dengan penggunaan kata pengantar seperti “seperti...” “kayak...” atau frasa sejenis di awal pernyataan sebagai cara untuk menegaskan sindiran. Contohnya, "Kayak anggota dewan nggak pernah tersandung kasus korupsi aja!"

d. Sarkasme Ilokusi

Sarkasme yang tidak hanya bergantung pada kata-kata, tapi juga pada cara penyampaian, seperti intonasi, ekspresi wajah, atau gerak tubuh. Elizabeth Camp menekankan bahwa makna sarkastik bisa muncul dari bagaimana sesuatu diucapkan, bukan dari isinya saja. Terdapat penekanan pada aspek performatif tuturan (cara ucapan), sehingga audiens menangkap ironi melalui isyarat non-verbal, bukan hanya kata-kata. Contohnya, seseorang mengucapkan “Pintar banget, kamu!” dengan nada datar atau ekspresi wajah yang jelas menunjukkan kebalikannya.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan penalaran untuk menghasilkan kesimpulan berdasarkan data-data yang diperoleh (Aditya Priyatna Darmawan, 2022). Kategori-kategori dalam penelitian kualitatif dikembangkan melalui interaksi secara langsung oleh peneliti dengan informan di lapangan atau analisis mendalam terhadap data yang terkumpul. Hasilnya, penelitian kualitatif cenderung menghasilkan informasi yang terikat pada konteks spesifik yang memungkinkan identifikasi pola-pola atau pengembangan teori yang menjelaskan fenomena sosial yang diteliti (Somantri, 2005). Dalam penelitian ini, peneliti akan mengobservasi persepi penonton terhadap sebuah kritik sosial pada *Stand Up Comedy* yang dibawakan oleh Kiky saputri dan Bintang Emon.

Berdasarkan penjelasan tersebut, proses pendekatan pada kasus kritik sosial pada audiens *Stand Up Comedy* Kiky Saputri dan Bintang Emon akan dilakukan dengan tahapan :

a. Intuiting (Intuitif)

Intuiting melibatkan keterbukaan diri responden kepada peneliti mengenai pengalamannya menonton *Stand Up Comedy* yang dilakukan oleh Kiky saputri dan Bintang Emon. Pada tahap ini, peneliti akan berusaha memahami secara intuitif bagaimana audiens mengalami dan mempersepsikan nilai kritik sosial dalam pertunjukan *Stand Up Comedy*.

b. Analyzing (Analisis)

Pada tahap ini, peneliti melakukan pemetaan dan pengembangan pemahaman yang lebih mendalam berdasarkan wawancara dan observasi kepada audiens.

c. Describing (Deskripsi)

Tahap yang terakhir ini, peneliti akan menyusun narasi mengenai bagaimana audiens menginterpretasikan kritik sosial dalam *Stand Up Comedy*.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

a. Waktu

Penelitian dengan judul *Analisis Persepsi Kritik Sosial pada Audiens dalam Stand Up Comedy* dilakukan dengan jangka beberapa bulan mulai dari Bulan Maret – Agustus 2025.

b. Lokasi

Lokasi penelitian dilakukan pada media yang menerbitkan video *Stand Up Comedy* pada platform online. Sedangkan, lokasi wawancara dalam penelitian ini dilakukan di Kota Kediri dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Informan Penelitian

Pada penelitian kualitatif, seseorang dapat disebut sebagai responden atau subjek penelitian karena keterlibatannya secara langsung dalam memberikan respon terkait dengan data yang dibutuhkan sesuai pengalamannya yang berkaitan dengan fenomena peneliti. Seorang responden yang telah ditentukan oleh peneliti akan menjadi sumber data dengan cara memberi pertanyaan kepadanya (Khairally, 2023).

Dalam penelitian ini, pemilihan responden dilakukan menggunakan Teknik Purposive Sampling. Penggunaan teknik ini dipilih berdasarkan kriteria seorang responden agar mencapai tujuan sesuai penelitian yang dilakukan oleh peneliti (Lenaini, 2021). Terdapat dua jenis responden yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, responden seorang mahasiswa dan politisi. Kriteria responden mahasiswa yang dipilih adalah mahasiswa yang telah menonton secara offline maupun online pertunjukan *Stand Up Comedy* yang dibawakan oleh Kiky Saputri dan Bintang Emon. Kriteria responden kedua yang dipilih adalah audiens politisi yang sedang menjabat sebagai wakil rakyat dan telah menonton secara offline maupun online pertunjukkan *Stand Up Comedy* yang dibawakan oleh Kiky Saputri dan Bintang Emon.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk mencapai tujuan penelitian. Tujuan tersebut, yang biasanya dinyatakan dalam bentuk hipotesis, adalah jawaban awal terhadap pertanyaan penelitian. Untuk menguji kebenaran hipotesis secara empiris, diperlukan pengumpulan data. Data ini diperoleh dari sampel yang telah ditentukan sebelumnya, yang terdiri dari sejumlah unit analisis yang menjadi fokus penelitian (Hadiulya, 2019).

Jenis data yang dikumpulkan berupa :

a. Data Primer

Data primer adalah informasi yang dikumpulkan dan diproses langsung oleh peneliti yang berasal dari sumber berdasarkan teknik pemilihan sampel yang sesuai dengan penelitian (Daud William Marihot Tua, 2022). Data primer yang digunakan dalam penelitian ini berupa hasil wawancara terhadap subjek peneliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan informasi yang didapatkan secara tidak langsung melalui studi literatur seperti, dokumen resmi, buku-buku, dan hasil penelitian seperti laporan (Gatot Wijayanto, 2022). Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa karya ilmiah, website, dan e-book.

Teknik pengumpulan data yang digunakan berupa:

a. Observasi

Observasi dilakukan untuk melihat secara langsung bagaimana respon audiens terhadap penyampaian kritik sosial oleh komika Kiky Saputri dan Bintang Emon dalam pertunjukan *Stand Up Comedy*. Tahapan ini dilakukan dengan menonton rekaman pertunjukan tersebut.

b. Wawancara

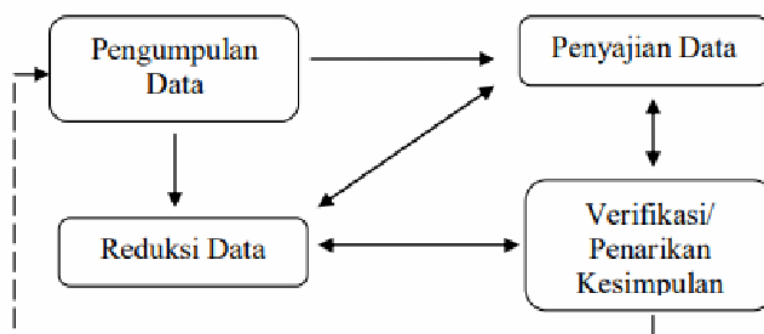
Wawancara dilakukan untuk memperoleh pemahaman mendalam pada Informan Penelitian yang telah ditentukan sesuai pengalaman yang dimilikinya. Pada tahap ini, memungkinkan peneliti mengetahui bagaimana kritik sosial dipahami, diterima, atau dipertentangkan oleh audiens.

c. Studi Pustaka

Studi Pustaka dilakukan guna memperoleh analisis literatur yang berkaitan dengan penelitian ini sehingga dapat mengetahui pemahaman secara teoritis. Studi Pustaka yang diperoleh dalam penelitian ini berasal dari sumber yang kredibel seperti, kajian pemikiran para ahli, artikel ilmiah, buku bacaan, dan lainnya.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses terstruktur untuk menjelaskan, menafsirkan, dan memproses data dengan tujuan menghasilkan kesimpulan yang bernilai. Proses ini merupakan langkah penting dalam mengubah data primer menjadi informasi yang bermanfaat (Area, 2023).



Gambar 1. 1 Proses Analisis Data (Miles & Hubnerman, 1994).

Proses analisis data dalam penelitian ini menggunakan model tahapan yang dikemukakan oleh Miles & Hubnerman (1994), yang dipaparkan sebagai berikut:

a. Pengumpulan data

Peneliti melakukan tahapan pengumpulan data yang telah dihimpun melalui berbagai cara seperti, observasi konten rekaman pertunjukan, wawancara terhadap audiens, dan studi literatur.

b. Reduksi data

Ketika data telah terkumpul, peneliti akan mengelompokkan pendapat audiens dalam merespon kritik sosial, misalnya persamaan tanggapan audiens terhadap berbagai jenis humor atau tema yang disampaikan oleh Kiky Saputri dan Bintang Emon.

c. Penyajian data

Data akan disajikan dalam bentuk tabel atau transkrip wawancara audiens untuk membantu memvisualisasikan pola-pola yang muncul dalam persepsi kritik sosial oleh audiens.

d. Penarikan kesimpulan

Pada tahap akhir ini, peneliti akan menarik kesimpulan terhadap data yang telah dianalisis. Peneliti akan mencoba untuk memahami dan menjelaskan bagaimana audiens menginterpretasikan kritik sosial dalam *Stand Up Comedy*, serta bagaimana konteks sosial dan budaya memengaruhi persepsi mereka.

BAB II

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Video *Stand Up Comedy* Kiky Saputri



Gambar 2. 1 Objek Video Penelitian Kiky Saputri

Video yang menjadi objek penelitian ini adalah penampilan Kiky Saputri dalam program *Siapa Suruh Jadi Anggota DPR* dengan judul *PECAH!!! Kiky Saputri Roasting Anggota DPR: Musuh Rakyat dan Banyak Alasan* yang ditayangkan di KompasTV pada 1 Oktober 2019. Dalam penampilan tersebut, Kiky mengkritik secara langsung tokoh tertentu dengan pendekatan humor sarkasme. Target roasting pada penampilan ini adalah dua anggota Dewan Perwakilan Rakyat, yaitu Roy Suryo dan Masinton Pasaribu.

Materi yang dibawakan memuat kritik terhadap kinerja dan citra anggota DPR, dibalut dalam sarkasme yang ringan namun tajam. Misalnya, Kiky menyinggung insiden ketidakhafalan lagu kebangsaan *Indonesia Raya* oleh Roy Suryo, yang dikaitkan secara jenaka dengan kebiasaan pribadi, sehingga memancing tawa sekaligus menyampaikan sindiran halus mengenai profesionalitas pejabat publik. Terhadap Masinton Pasaribu, Kiky mengangkat isu-isu terkait citra publik dan kontroversi yang pernah melekat, dengan tetap mempertahankan unsur hiburan.

Video ini dipilih dalam penelitian karena merepresentasikan secara jelas fungsi *Stand Up Comedy* sebagai medium kritik sosial yang dikemas dalam sarkasme. Selain itu, video yang di tonton sebanyak 5,5 juta kali tersebut,

menampilkan penampilan komika yang dihadiri langsung oleh target kritik, sehingga interaksi non-verbal, ekspresi, dan respons audiens, baik politisi maupun masyarakat umum, dapat diamati secara nyata. Karakteristik ini relevan dengan tujuan penelitian untuk membandingkan persepsi mahasiswa dan politisi terhadap kritik sosial dalam *Stand Up Comedy*.



Gambar 2. 2 Wajah Kiky Saputri

Banyaknya panggung yang dihadiri Kiky Saputri sebagai seorang komika menjadikan ia dikenal oleh publik. Kiky memulai karier komedinya melalui ajang *Stand Up Comedy* Indonesia ke-4 yang ditayangkan stasiun televisi Indosiar tahun 2018. Keresahan Kiky Saputri sebagai guru honorerlah yang memicu ia untuk mengeluarkan keluh kesahnya di atas panggung yang dibalut dengan humor. Semenjak itu, ia banyak diundang di berbagai media untuk melakukan roasting kepada public figure dan politisi. Atas keberaniannya meroasting di depan tokoh secara langsung itulah yang membuat ia dikenal banyak orang. Kariernya semakin naik setelah banyaknya film yang dibintangi mulai dari Film Imperfect sebagai Neti, Pasutri Gaje sebagai Rani, dan Lapor Pak! The Movie: Hilangnya Mahkota Atlantis sebagai Kiky.



Gambar 2. 3 Instagram Kiky Saputri

Melalui pencapaian karier yang ia bangun mulai dari keikutsertaannya dalam ajang kompetisi hingga keterlibatannya dalam membintangi Film menjadikan ia memiliki banyak pengikut. Hingga saat ini (19 Agustus 2025), Kiky terbukti memiliki 3,6 Juta pengikut Instagram. Pada konteks penelitian ini, Kiky menjadi figur yang relevan karena penampilannya memperlihatkan secara konkret bagaimana sarkasme dapat digunakan sebagai bentuk kontrol sosial, sekaligus memicu perbedaan respons antara audiens mahasiswa dan politisi.

B. Video *Stand Up Comedy* Bintang Emon



Gambar 2. 4 Objek Video Penelitian Bintang Emon

Video yang menjadi objek penelitian selanjutnya adalah penampilan Bintang Emon yang diunggah di Instagram pribadinya pada 21 Juli 2023. Video yang ditonton oleh 6,7 juta kali tersebut menarik perhatian penonton karena teknik *storytelling* yang dipadukan dengan sarkasme untuk menyampaikan kritik sosial terhadap Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Materi yang dibawakan Bintang mengisahkan secara mengalir tentang perilaku dan kebijakan anggota DPR yang dinilai jauh dari kepentingan rakyat, namun dikemas melalui alur cerita yang humoris dan mudah dipahami. Ia menyoroti isu seperti rendahnya kehadiran anggota DPR di sidang, kebijakan yang tidak berpihak pada masyarakat, hingga kecenderungan politisi mengedepankan kepentingan pribadi atau partai. Penyampaiannya yang santai, disertai bahasa sarkastis yang halus namun tajam, membuat pesan kritik tersampaikan tanpa terkesan menyerang secara frontal.

Video ini dipilih dalam penelitian karena secara jelas memperlihatkan bagaimana *storytelling* dapat menjadi medium efektif dalam menyampaikan sarkasme dan kritik sosial. Tingginya jumlah penonton menunjukkan relevansi materi dengan keresahan publik, sementara respons audiens di kolom komentar menunjukkan bahwa pesan yang dibawa Bintang mampu membangkitkan diskusi kritis di masyarakat. Hal ini selaras dengan tujuan penelitian untuk membandingkan persepsi mahasiswa dan politisi terhadap bentuk kritik sosial dalam *Stand Up Comedy*.



Gambar 2. 5 Wajah Bintang Emon

Bintang Emon yang bernama lengkap Gusti Muhammad Abdurrahman Bintang Mahaputra, mulai dikenal luas setelah menjadi juara dalam ajang

kompetisi *Stand Up Comedy Indonesia* season 3 (2013) di Indosiar dan terus konsisten berkarya di dunia komedi, baik di panggung maupun media digital.

Berbeda dengan gaya *Stand Up Comedy* langsung seperti Kiky, Bintang membungkus kritiknya dalam bentuk cerita dan pengamatan sehari-hari, sehingga terasa dekat dengan pengalaman audiens. Bintang dikenal dengan ciri khas penyampaian yang santai namun memadukan pengalaman personal dengan isu sosial dan politik. Gaya komunikasinya yang jenaka namun penuh pesan membuatnya digemari berbagai kalangan, terutama generasi muda.



Gambar 2. 6 Instagram Bintang Emon

Popularitasnya meningkat setelah konten di media sosial khususnya Instagram menjadi viral. Melalui keviralnya tersebut, ia berhasil memiliki 6,3 juta pengikut Instagram hingga saat ini (19 Agustus 2025). Konten yang diberi nama DPO (Dewan Perwakilan Omel-omel) tersebut mengangkat isu-isu sosial dan politik yang sedang hangat dibicarakan. Dengan keberanian dan pemikiran idealisnya, konten DPO yang ia unggah di media sosial berhasil menyita perhatian netizen dengan banyaknya video yang meledak karena di tonton berjuta-juta kali. Melalui konten DPO tersebut, tak jarang ia menjadi topik perbincangan nomor satu khususnya di twitter.

Bintang dipilih dalam penelitian ini karena reputasinya sebagai salah satu komika yang konsisten mengangkat isu-isu publik dengan sudut pandang kritis, namun tetap mengutamakan kejelasan pesan dan keterhubungan emosional dengan audiens. Dalam konteks penelitian ini, Bintang Emon mewakili tipe komika yang menggunakan pendekatan *narrative humor* untuk membungkus kritik sosial, sehingga relevan untuk dianalisis dari perspektif persepsi mahasiswa dan politisi.

Penelitian ini berfokus pada bagaimana dua komika terkenal Kiky Saputri dan Bintang Emon menggunakan kritik sosial dan sarkasme yang mereka hadirkan pada pertunjukkan *Stand Up Comedy* mereka. Keberadaan Kiky Saputri dan Bintang Emon sebagai objek penelitian karena karyanya merepresentasikan bentuk kritik sosial melalui sarkasme yang dikemas secara menghibur. Analisis dilakukan untuk melihat bagaimana audiens memaknai pesan yang disampaikan, dan sejauh mana mereka menangkap unsur kritik di dalamnya. Keduanya mewakili dua gaya penyampaian *Stand Up Comedy* yang sama-sama memanfaatkan sarkasme sebagai instrumen kritik sosial, namun dengan pendekatan yang berbeda, Kiky melalui penampilan yang tegas dan interaktif, sementara Bintang melalui narasi santai yang membungkus sindiran secara halus. Dengan demikian, melalui gaya *Stand Up Comedy* yang ditampilkan oleh keduanya diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif sarkasme dalam *Stand Up Comedy* yang berperan dalam membentuk opini publik dan kesadaran kritis terhadap isu-isu politik dan sosial.

BAB III

HASIL TEMUAN PENELITIAN

A. Profil Narasumber

Penelitian ini memiliki beberapa responden yang digunakan sebagai sumber data peneliti. Responden penelitian terdiri dari beberapa latar belakang usia, pendidikan, dan pekerjaan. Perbedaan latar belakang memiliki tujuan agar penelitian ini objektif, representatif, memiliki variasi perspektif, dan tidak adanya bias informasi. Data penelitian yang disusun pada bab ini dilakukan melalui wawancara mendalam kepada semua responden.

Penelitian ini terdiri dari 2 jenis responden, yaitu politikus sebagai pihak yang di kritik dan mahasiswa sebagai pihak yang mengkritik. Profil responden dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. 1 Data Diri Audiens Politikus

1. Politikus

No	Nama	Usia	Pekerjaan
1	Dr. Totok Minto Leksono, MH.	56 tahun	Anggota DPRD Kab. Kediri
2	Kuswanto, S.Sos	53 tahun	Anggota DPRD Kab. Kediri
3	Drs. H. Siswanto, M.Pd.	59 tahun	Anggota DPRD Kab. Kediri

Sumber: Olah Data Peneliti 2025

Tabel 3. 2 Data Diri Audiens Mahasiswa

2. Audiens

No	Nama	Usia	Pekerjaan
1	Salsabila Mutiara	21 tahun	Mahasiswa
2	Dandi Dwie Lisadi	22 tahun	Mahasiswa
3	Herlinda Nurriszka A'yun	22 tahun	Mahasiswa
4	M. Ranga Maulana	22 tahun	Mahasiswa
5	Lugas Adek Jalu Pamungkas	25 tahun	Mahasiswa

Sumber: Olah Data Peneliti 2025

B. Temuan Data Audiens Mahasiswa

1. Kiky saputri



Gambar 3. 1 Video Kiky Saputri

- a) 1.55 – 2.05: Scene Kiky Saputri meroasting dengan sarkasme harapannya DPR menjadi pilihan rakyat untuk menyuarakan rakyat, realitanya musuh rakyat.

Kiky menyampaikan:

“Saya senang banget karena mendapat suatu kehormatan bisa tampil di depan para anggota DPR. Itu keren banget. Karena DPR itu adalah satu-satunya lembaga yang dipilih oleh rakyat untuk menyuarakan suara rakyat. Itu harapannya. Seperti yang kita tahu kenyataannya seperti apa bukan. Malah menjadi musuh rakyat.”

Ucapan tersebut memunculkan beragam persepsi dari audiens mahasiswa. Salsa mempersepsikan sindiran ini sebagai gambaran kegagalan institusional DPR. Ia menilai banyak kebijakan yang diambil tidak sejalan dengan kebutuhan rakyat sehingga menimbulkan ketidakpercayaan publik.

“Banyak kebijakan yang diambil terasa jauh dari kebutuhan rakyat semena-mena dan bahkan dalam beberapa kasus justru menimbulkan ketidakpercayaan pada publik... adanya anggapan bahwa DPR ini telah menjadi musuh rakyat karena tidak lagi berpihak.” (Salsa, 16 Juni 2025)

Pandangan ini sejalan dengan Dandi yang menangkap kritik Kiky secara emosional, bahwa DPR kerap tidak menjalankan fungsinya sebagai representasi rakyat. Ia menyatakan:

“Kerasanya gitu ya, DPR kan dipilih buat wakilin suara rakyat tapi malah realitanya ngambil keputusan yang nggak nyambung sama kebutuhan masyarakat. Jadi sarkasmenya Kiky menurut gue mewakili keresahan banyak orang.” (Dandi, 17 Juni 2025)

Berbeda dengan keduanya, Ninda tidak sepakat dengan istilah musuh rakyat, namun tetap mengakui adanya jarak komunikasi antara DPR dan masyarakat. Ia menegaskan bahwa,

“Aku kurang setuju dengan statement bahwa realitanya DPR musuh rakyat. Tapi aku setuju bahwa DPR itu seharusnya menyuarakan suara rakyat... pun kita sebagai rakyat juga ga ada loh jembatan untuk menyuarakan aspirasi kita ke DPR.” (Ninda, 16 Juni 2025)

Dalam perspektif Ninda, masalah utama bukan sekadar pengkhianatan fungsi DPR, melainkan keterputusan kanal aspirasi rakyat. Sementara itu, Rangga mempersepsikan sindiran Kiky dalam kerangka demokrasi yang lebih luas. Ia menilai bahwa DPR telah menyimpang dari prinsip dasar demokrasi yaitu, dari, oleh, dan untuk rakyat. Sebagaimana ia menyatakan,

“Yang diartikan sebagai musuh rakyat itu adalah dimana kebijakannya itu yang harusnya DPR berpihak kepada rakyat... malah menguntungkan para oligarki.” (Rangga, 8 Juli 2025)

Senada dengan Rangga, Lugas memandang pernyataan Kiky sebagai deskripsi realitas politik yang dibungkus dalam humor. Ia menilai DPR sering kali tidak menepati janji meskipun mengetahui permasalahan rakyat.

“Kiki sedang mengemas bagaimana kenyataan itu diperdayagunakan dengan kekhasan dia, yakni sebagai komika... DPR seringkali mengkhianati apa yang telah mereka janjikan.” (Lugas, 9 Juli 2025)

Dengan demikian, meskipun stimulus yang diterima sama, yaitu sindiran Kiky terhadap DPR, mahasiswa memprosesnya dengan beragam persepsi. Salsa, Dandi, Rangga, dan Lugas menekankan kegagalan DPR dalam fungsi representatif, sedangkan Ninda menyoroti krisis komunikasi aspirasi. Hal ini memperlihatkan bahwa audiens tidak pasif, melainkan aktif mengorganisasikan dan menafsirkan pesan sarkastik sesuai dengan pengalaman, pengetahuan, dan sudut pandang masing-masing.

- b) 2.21 – 2.50: Scene Kiky Saputri eroasting dengan sarkasme bagaimana DPR jauh dari rakyat karena tidak terjun ke lapangan.

Kiky menyampaikan:

“Oh saya inget bapak ini bapak Masinton kan tapi sebenarnya saya itu lupa saya gatau bapak Masinton itu siapa. Saya sampai searching di google ‘siapa itu Bapak Masinton’ eh googlenya nanya balik.”

Pada scene ini, Kiky menyindir keberadaan anggota DPR yang jauh dari rakyat hingga publik bahkan tidak mengenal sosok mereka. Dandi mempersepsikan sindiran tersebut sebagai kritik yang tepat terhadap perilaku politisi yang hanya dekat dengan masyarakat saat kampanye, lalu menghilang setelah menjabat.

“Bener juga itu ya karena banyak pas kampanye rajin banget nih blusukan segala macem turun ke lapangan tapi pas udah ngejabat ya gitu deh... lupa jalan pulang ke daerah.” (Dandi, 17 Juni 2025)

Bagi Dandi, masyarakat membutuhkan kehadiran nyata wakil rakyat, bukan sekadar tampil di media. Salsa juga menangkap kritik Kiky sebagai sindiran terhadap lemahnya kinerja DPR di lapangan. Ia menilai masyarakat menilai langsung dari realitas yang mereka alami, seperti contoh kerusakan jalan yang tidak segera ditangani.

“Masyarakat menilai kinerja DPR melalui realita yang ada di lapangan... kalau masalah jalan rusak aja tidak ditangani, rakyat merasa haknya diabaikan.” (Salsa, 16 Juni 2025)

Menurut Salsa, kegagalan DPR turun ke masyarakat menciptakan persepsi bahwa wakil rakyat tidak benar-benar memperjuangkan kepentingan konstituen. Sedangkan bagi Ninda, memberi penekanan pada pengalamannya pribadi dalam Pemilu DPRD Sleman. Ia menilai kurangnya keterlibatan langsung membuat banyak calon tidak dikenal rakyat.

“Aku aja gatau ini calon DPRD-nya siapa... aku cuma kenal satu dan itupun dari medsos. Itu menunjukkan mereka cuma nyaleg aja tapi tidak memperkenalkan diri kepada masyarakat.” (Ninda, 16 Juni 2025)

Baginya, kritik Kiky merefleksikan kenyataan bahwa sebagian besar wakil rakyat lebih aktif di media sosial ketimbang benar-benar hadir di tengah masyarakat. Rangga memperkuat pandangan tersebut dengan menegaskan bahwa DPR hanya terlihat dekat dengan rakyat saat masa kampanye.

“Ketika mencaloninya hanya terjun kepada rakyat di awal kampanye... namun ketika sudah jadi, ya sudah. Kita tidak pernah melihat DPR turun kepada rakyat.” (Rangga, 8 Juli 2025)

Persepsi Rangga menekankan adanya pola keterputusan representasi politik, di mana rakyat hanya dijadikan alat elektoral, bukan subjek yang perlu didengarkan secara berkelanjutan. Sejalan dengan itu, Lugas memandang bahwa masalah utama bukan soal jarak geografis, melainkan hilangnya pijakan moral DPR sebagai representatif rakyat.

“Kita tahu anggota DPR datanya hanya sekali, yakni saat momentum pemilu dia hadir. Setelah itu apa yang ia janjikan seolah-olah lupa... sepertinya karena ada hal yang lebih penting daripada rakyat yaitu perut mereka sendiri.” (Lugas, 9 Juli 2025)

Persepsi Lugas menyoroti bahwa kepentingan pribadi lebih diprioritaskan daripada aspirasi rakyat, sehingga kritik Kiky dianggap tepat sasaran.

Dengan demikian, pada scene kedua ini mahasiswa mempersepsikan sindiran Kiky sebagai kritik terhadap keterputusan wakil rakyat dengan masyarakat. Dandi dan Rangga menekankan pola perilaku DPR yang hanya hadir saat kampanye, Salsa melihatnya sebagai kegagalan kinerja konkret di lapangan, Ninda menyoroti minimnya pengenalan diri wakil rakyat kepada pemilih, sedangkan Lugas menekankan hilangnya tanggung jawab moral DPR. Perbedaan sudut pandang ini menegaskan bahwa sarkasme Kiky memunculkan beragam persepsi, namun tetap mengarah pada kritik terhadap absennya kedekatan DPR dengan rakyat.

- c) 5.20 – 5.34: Scene Kiky Saputri meroasting dengan sarkasme kurangnya nasionalisme karena tidak hafal lagu Indonesia Raya lagi.

Kiky menyampaikan:

“Dan satu lagi yang intrik dengan Pak Roy Suryo adalah ketika beliau tidak hafal atau salah lirik dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya. Betul pak kalo kebanyakan nonton video begituan (read: video ga senonoh) suka ngerusak sel otak.”

Pada scene ini, Kiky menggunakan sarkasme untuk mengkritik pejabat publik yang tidak hafal lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kritik tersebut dipersepsikan mahasiswa sebagai sindiran terhadap lemahnya komitmen nasionalisme pada figur publik yang seharusnya menjadi teladan.

Salsa mempersepsikan sindiran tersebut sebagai kritik terhadap simbolisme kosong. Baginya, nasionalisme tidak sekadar ditunjukkan melalui hafalan lagu, tetapi lebih penting pada sikap nyata membela bangsa.

“Nasionalisme bukan soal hafal lagu, tapi soal menjunjung nilai, peduli sesama, taat hukum, dan kontribusi bagi negara. Orang bisa hafal lagu, tapi korupsi. Sebaliknya, ada yang lupa lirik tapi tiap hari membela kebenaran.” (Salsa, 16 Juni 2025)

Persepsi Salsa menekankan bahwa kritik Kiky adalah pengingat agar masyarakat tidak terjebak pada simbol formal tanpa substansi. Sedangkan

Dandi melihat sindiran ini sebagai bentuk humor ringan namun memiliki pesan mendalam.

“Kedengarannya lucu, tapi maknanya dalem. Lagu kebangsaan itu simbol dasar nasionalisme. Kalau sampe nggak hafal, kita jadi mikir: gimana bisa mikirin bangsa?” (Dandi, 17 Juni 2025)

Bagi Dandi, lupa lirik lagu kebangsaan mencerminkan lemahnya komitmen dasar seorang pejabat terhadap nilai-nilai kebangsaan. Lain halnya dengan Lugas yang memberikan penafsiran yang lebih filosofis. Ia menilai lupa lirik bukan hanya soal kelalaian pribadi, tetapi melambangkan ketidakseriusan elite dalam menjalankan prinsip bernegara.

“Seringkali prinsip-prinsip bernegara seperti Indonesia Raya itu tidak terjawantahkan secara konkret. Rakyat dibiarkan mengais kesejahteraannya sendiri, sementara elite hanya menghafal simbol.” (Lugas, 9 Juli 2025)

Menurut Lugas, kritik Kiky adalah bentuk pengingat bahwa nasionalisme harus diwujudkan dalam tindakan nyata, bukan sekadar retorika. Rangga memberikan pandangan yang lebih moderat. Ia menilai bahwa lupa lirik bisa saja disebabkan faktor non-substansial, seperti gugup atau demam panggung.

“Sebenarnya kita nggak bisa langsung nge-judge seseorang bodoh atau nggak nasionalis cuma karena lupa lirik. Mungkin dia lupa karena demam panggung. Jadi menurutku roasting ini nggak terlalu substansial.” (Rangga, 8 Juli 2025)

Meskipun demikian, Rangga tetap mengakui bahwa sindiran Kiky memiliki muatan sosial yang merefleksikan kekecewaan publik terhadap figur yang gagal menampilkan simbol kebangsaan.

Sementara itu, Ninda memberi tanggapan lebih tegas. Ia menilai lupa lirik lagu kebangsaan merupakan kegagalan mendasar bagi seorang pejabat publik.

“Pejabat nggak hafal lagu Indonesia Raya tuh parah banget. Itu basic banget. Dari TK kita udah diajarin. Apalagi DPR, masa nggak hafal? Nasionalismenya di mana?” (Ninda, 16 Juni 2025)

Bagi Ninda, sindiran Kiky adalah bentuk kontrol sosial agar pejabat lebih serius menghargai simbol-simbol dasar kenegaraan.

Dari berbagai persepsi mahasiswa tersebut, dapat dilihat bahwa meskipun cara pandang berbeda, kritik Kiky tetap dipahami sebagai bentuk sindiran terhadap lemahnya komitmen nasionalisme pejabat publik. Salsa dan Lugas menekankan pentingnya nasionalisme substantif, Dandi melihatnya sebagai kritik terhadap komitmen dasar, Rangga memandangnya dengan perspektif

lebih moderat, sementara Ninda menilai lupa lirik sebagai bukti nyata kegagalan moral seorang pejabat.

- d) 6.15 – 6.30: Scene Kiky Saputri meroasting dengan sarkasme Roy Suryo lupa bayar makan, apalagi sama perut rakyat.

Kiky menyampaikan:

“Perut Sendiri Aja Lupa, Gimana Perut Rakyat?”

Pada scene ini, Kiky Saputri menggunakan sarkasme melalui metafora perut untuk menyindir kelalaian Roy Suryo yang lupa membayar makan. Kritik tersebut dipersepsikan mahasiswa sebagai sindiran terhadap lemahnya tanggung jawab moral seorang pejabat, yang bahkan dalam hal kecil pun lalai, sehingga diragukan mampu mengurus kepentingan rakyat.

Salsa menilai sindiran ini sebagai bentuk kritik terhadap kurangnya integritas figur publik.

“Kalau urusan pribadi saja bisa lupa, bagaimana dengan kepentingan rakyat? Kritik itu mencerminkan kekecewaan publik yang dalam.” (Salsa, 16 Juni 2025)

Bagi Salsa, tindakan kecil seperti lupa bayar makan mencerminkan lemahnya komitmen moral, sehingga wajar bila publik meragukan keseriusan pejabat dalam mengurus kepentingan rakyat. Ninda melihat sindiran ini dari sisi yang lebih moderat. Ia menganggap kelalaian bisa saja manusiawi, namun status figur publik menjadikannya berbeda di mata masyarakat.

“Lupa itu manusiawi. Tapi karena beliau publik figur, akhirnya lupa makan aja dikaitin sama rakyat. Ya itu risiko jadi tokoh publik.” (Ninda, 16 Juni 2025)

Persepsi Ninda menekankan bahwa pejabat publik selalu berada dalam sorotan, sehingga tindakan kecil sekalipun dapat dipandang sebagai simbol kegagalan moral. Dandi memandang roasting ini sebagai kritik sederhana yang bermakna dalam.

“Hal-hal kecil aja bisa lupa tanggung jawab. Gimana mau inget perut rakyat? Sarkasme ini meskipun lucu, bikin mikir.” (Dandi, 17 Juni 2025)

Menurut Dandi, sindiran ini efektif karena membungkus kritik serius dalam bentuk humor ringan yang menyentil kesadaran publik.

Rangga menafsirkan sindiran Kiky sebagai bentuk kritik terhadap egosentrisme politisi.

“Yang ingin disampaikan Kiky adalah bahwa pejabat itu udah kenyang sama dirinya sendiri. Perut rakyat kelaparan, tapi dia sibuk mikirin egonya.” (Rangga, 8 Juli 2025)

Persepsi Rangga menegaskan bahwa pejabat publik sering lebih mementingkan kepentingan pribadi daripada kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan itu, Lugas mempersepsikan kritik Kiky sebagai gambaran relasi timpang antara rakyat dan elite.

“Apa yang hendak disampaikan Kiky adalah ironi: ketika rakyat kelaparan, pemilik otoritas malah lupa membayar makanannya sendiri.” (Lugas, 9 Juli 2025)

Menurut Lugas, sindiran ini mencerminkan kondisi rakyat yang hanya bisa menertawakan penderitaannya melalui representasi suara komika.

Berdasarkan kelima tanggapan tersebut, dapat dilihat bahwa mahasiswa memaknai sarkasme Kiky pada scene ini sebagai sindiran terhadap lemahnya tanggung jawab dan moral pejabat publik. Salsa menekankan aspek integritas, Ninda melihat sisi manusiawi namun menyoroti risiko figur publik, Dandi menganggap kritik sederhana namun menyentil, Rangga menyoroti sifat egois pejabat, dan Lugas menekankan ironi relasi rakyat dengan elite. Dengan demikian, persepsi mahasiswa menunjukkan bahwa humor Kiky bukan sekadar hiburan, melainkan alat untuk mengingatkan publik pada tanggung jawab moral pemimpin.

- e) 6.30 – 6.40: Scene Kiky Saputri meroasting dengan sarkasme Roy Suryo selalu menjawab susah mendengar jadi dianggap suka banyak alasan.

Kiky menyampaikan:

“Alasan. Jadi anggota DPR banyak alasan.”

Pada scene ini, Kiky menyindir kebiasaan anggota DPR yang kerap berdalih atau mengelak ketika dimintai pertanggungjawaban. Kritik singkat ini dipersepsikan mahasiswa sebagai gambaran kegagalan komunikasi politik yang akuntabel, sekaligus cermin hilangnya integritas wakil rakyat.

Salsa mempersepsikan sindiran ini sebagai tanda lemahnya akuntabilitas DPR.

“Kalau setiap dikritik jawabannya ngeles dan alasan klasik terus, rakyat bisa hilang kepercayaan. Kalau memang benar, tunjukkan buktinya. Jangan cuma berdalih.” (Salsa, 16 Juni 2025)

Persepsi Salsa menekankan bahwa kebiasaan ngeles justru semakin menjauhkan wakil rakyat dari kepercayaan publik. Sejalan dengan Dandi, mempersepsikan kritik Kiky sebagai representasi keresahan rakyat.

“Rakyat udah capek denger alasan. Yang dibutuhin itu tanggung jawab dan kerja nyata, bukan ngeles terus.” (Dandi, 17 Juni 2025)

Bagi Dandi, sarkasme Kiky menjadi simbol perlawanan rakyat terhadap pola komunikasi manipulatif yang penuh pembenaran tanpa solusi konkret. Bagi Lugas, menyoroti dimensi etis dari sindiran tersebut.

“Seringnya alasan itu tanda dari ketidakkonsistenan dalam berpikir. Roy Suryo dan yang seperti dia lupa bahwa mereka dipilih untuk melayani, bukan untuk menghindar.” (Lugas, 9 Juli 2025)

Persepsi Lugas menunjukkan bahwa perilaku mencari-cari alasan menandakan hilangnya orientasi moral seorang pejabat. Rangga mempersepsikan kritik ini sebagai refleksi dari karakter umum politisi Indonesia.

“Itu memang ciri khas politisi. Ketika dituduh sesuatu, mereka akan sibuk beralasan. Maka, Kiky menyindir: jangan mudah percaya dengan retorika politisi.” (Rangga, 8 Juli 2025)

Menurut Rangga, sindiran Kiky adalah peringatan bagi masyarakat agar tetap kritis terhadap bahasa politik yang manipulatif. Sementara itu, Ninda merespons kritik ini dengan menyinggung gaya komunikasi Roy Suryo dalam perdebatan publik.

“Kesannya tuh bukan diskusi, tapi debat yang gak mau kalah. Ngomong terus dan gak ngasih lawan bicara kesempatan.” (Ninda, 16 Juni 2025)

Persepsi Ninda menekankan bahwa gaya komunikasi semacam itu mencerminkan sikap otoriter, bukan keterbukaan terhadap kritik.

Dari berbagai tanggapan mahasiswa, dapat disimpulkan bahwa sindiran Kiky dipersepsikan sebagai kritik terhadap budaya ngeles yang melekat pada wakil rakyat. Salsa menyoroti akuntabilitas, Dandi menekankan keresahan rakyat, Lugas melihatnya sebagai masalah etis, Rangga mengaitkannya dengan pola umum politisi, dan Ninda menunjukkan bahwa sikap defensif berujung pada komunikasi yang otoriter. Hal ini memperlihatkan bahwa sarkasme Kiky menjadi stimulus yang memunculkan kesadaran kritis mahasiswa terhadap lemahnya tanggung jawab politik di tubuh DPR.

2. Bintang Emon



Gambar 3. 2 Video Bintang Emon

- a) 0.05 – 0.10: Scene Bintang Emon meroasting dengan sarkasme pejabat kalo aneh-aneh kayak difitnah, dituduh korupsi.

Bintang menyampaikan:

“Pusing ga sih jadi anggota dewan?” “jujur aja kalau saya nggak ya karena selama saya nggak aneh-aneh ya itu kemungkinan saya dipecat mendekati zero” (sambil memperagakan main hp ketika sedang rapat dan seolah tidak fokus)

Pernyataan sarkastik Bintang ini memicu beragam persepsi dari audiens mahasiswa. Dandi mempersepsikan frasa aneh-aneh sebagai diksi yang multi-tafsir, sehingga membuka ruang interpretasi audiens.

“Ini sih keren ya, frasa aneh-aneh di sini kan bisa dimaknai beragam oleh penonton... jadi kayak ketika sarkasmenya dilemparkan, penonton diajak berpikir bahwasanya apakah benar aneh-aneh ini mengarah ke yang negatif atau bahkan positif.” (Dandi, 17 Juni 2025)

Menurut Dandi, Bintang berhasil mengemas kritik dengan cara mengajak audiens berpikir kritis terhadap perilaku anggota DPR. Salsa menanggapi dengan mengaitkan pernyataan Bintang pada kinerja DPR di lapangan.

“Masyarakat menilai kinerja DPR melalui realita yang ada di lapangan, sebagai contoh kerusakan jalanan... pihak pemerintah

tidak cekatan dalam menanggapi masalah tersebut.” (Salsa, 16 Juni 2025)

Bagi Salsa, sarkasme Bintang memperkuat persepsi bahwa DPR sering tidak menjalankan fungsi representatifnya dalam menyuarakan aspirasi rakyat. Sedangkan Ninda menekankan bahwa pejabat publik selalu menjadi sorotan masyarakat.

“Aku setuju karena pejabat itu kan orang yang terlihat gitu di masyarakat... apapun yang dia lakukan itu akan menjadi perhatian bagi masyarakat apalagi kalau yang dia lakukan itu aneh, pasti akan menimbulkan kecurigaan.” (Ninda, 16 Juni 2025)

Menurut Ninda, sindiran Bintang menyoroti fakta bahwa perilaku pejabat yang menyimpang mudah menimbulkan prasangka negatif, termasuk dugaan korupsi. Lain halnya dengan Rangga, ia mempersepsikan adegan Bintang sebagai representasi kondisi nyata dalam forum DPR.

“Menurut aku itu sebagai interpretasi dia melihat kondisi anggota dewan... padahal gak ngerti substansi percakapan dalam forum itu apa karena sibuk dengan dirinya sendiri... yang disejahterakan itu juga adalah para pengusaha, teman-teman di sekitar.” (Rangga, 8 Juli 2025)

Persepsi Rangga menegaskan bahwa sarkasme Bintang mengkritik perilaku anggota DPR yang hanya mengikuti arus tanpa memikirkan kepentingan rakyat secara substansial. Senada dengan itu, Lugas menilai Bintang memperlihatkan kepatuhan anggota DPR pada kepentingan partai atau kelompok dominan.

“Yang diperagakan oleh Bintang Emon itu mencerminkan situasi anggota parlemen kita... mereka patuh, tegak lurus terhadap kepentingan partai... sehingga seolah-olah mau tidak mau anggota-anggota DPR ini harus tegak lurus terhadap mayoritas.” (Lugas, 9 Juli 2025)

Menurut Lugas, sarkasme ini menyentil hilangnya kedaulatan rakyat dalam praktik politik legislatif.

Dengan demikian, meskipun stimulus yang sama diterima, mahasiswa mempersepsikan kritik Bintang dengan sudut pandang berbeda. Dandi melihatnya sebagai strategi retorik yang mengajak audiens berpikir, Salsa menekankan kegagalan kinerja DPR, Ninda menyoroti perilaku pejabat yang rentan menimbulkan kecurigaan, Rangga mengaitkan dengan lemahnya substansi peran DPR, sementara Lugas menekankan kepatuhan DPR pada kepentingan partai. Hal ini menunjukkan bahwa audiens tidak pasif, melainkan

aktif mengolah pesan sarkastik Bintang sesuai dengan pengalaman dan pengetahuan mereka.

- b) 0.10 – 0.15: Scene Bintang Emon meroasting dengan sarkasme kalau DPR kerjanya ga ada berbasis Key Performance Indicator jadi aman ga ada dipecat walaupun tidak perform.

Bintang Emon menyampaikan:

“Emang KPInya ga di hitung, pak?” “Jangan samain ini dengan kantor-kantor pada umumnya, kita berbeda. Lebih aneh kantor kamu. Kok ada sih orang absen tapi gajinya dipotong, aneh.”

Sindiran Bintang Emon pada scene ini mengkritik kinerja DPR yang tidak berbasis pada Key Performance Indicator (KPI), sehingga anggota dewan tetap aman meskipun tidak bekerja optimal. Kritik tersebut memunculkan berbagai persepsi dari audiens mahasiswa.

Dandi mempersepsikan sindiran ini sebagai kritik yang cukup cerdas karena membandingkan DPR dengan sistem kerja kantoran pada umumnya.

“Cukup pintar sih ini menurut aku di statementnya yang ini... kalau di kantor lain harus mencapai KPI, tapi kalau kerja di DPR nggak perlu mencapai KPI.” (Dandi, 17 Juni 2025)

Menurut Dandi, Bintang mengemas kritik dengan cara yang relate, terutama bagi audiens yang paham dunia kerja kantoran. Kemudian, Salsa melihatnya dari sudut pandang lebih normatif.

“KPI itu merupakan standar yang dimiliki oleh setiap posisi... apabila DPR memiliki nilai KPI tapi tidak perform secara baik, hal tersebut bisa dipertimbangkan apakah layak untuk dipecat atau tidak.” (Salsa, 16 Juni 2025)

Persepsi Salsa menegaskan bahwa DPR seharusnya memiliki indikator kinerja yang jelas agar fungsi representatifnya dapat diukur dan dipertanggungjawabkan. Begitu pula dengan napa yang disampaikan Ninda yang menyoroti lemahnya transparansi terkait standar kerja DPR.

“Aku sebagai orang awam pun gatau gitu loh standar kerja DPR itu seperti apa... bahkan mungkin karena dia kerjanya tidak berbasis KPI, jadinya pun dia ga perform itu ya aman-aman aja.” (Ninda, 16 Juni 2025)

Bagi Ninda, sindiran Bintang menunjukkan bahwa publik kesulitan menilai kinerja wakil rakyat karena tidak ada ukuran kinerja yang jelas. Bagi Rangga, kritik Bintang sangat tepat dalam menggambarkan realitas.

“Sekalipun lu enggak kerja, enggak masuk kantor, ya tetap digaji. Jadi sarkasme yang dibawa Bintang Emon ini pengen ngasih pesan bahwa DPR itu sekalipun enggak kerja, gajinya enggak bakal dipotong.” (Rangga, 8 Juli 2025)

Persepsi Rangga memperlihatkan bahwa humor Bintang mengungkap ketidakadilan yang dirasakan masyarakat, karena DPR tidak pernah kehilangan hak finansial meskipun absen dari kewajiban. Sejalan dengan itu, Lugas mempersepsikan sarkasme Bintang sebagai kritik tajam terhadap kemunduran demokrasi.

“Anggota DPR itu tidak dinilai berdasarkan kemampuan ataupun kualitas... apabila sarkasma ini benar-benar terjadi, itu menandakan atau mengindikasikan kemunduran dalam demokrasi kita.” (Lugas, 9 Juli 2025)

Menurut Lugas, ketiadaan tolok ukur kinerja mencerminkan bahwa DPR tidak lagi berorientasi pada marwah kedaulatan rakyat, melainkan kepentingan internal semata.

Dengan demikian, meskipun stimulus yang sama diterima, mahasiswa mempersepsikan kritik Bintang dengan sudut pandang yang beragam. Dandi melihatnya sebagai kritik yang relatable dengan dunia kerja, Salsa menekankan pentingnya indikator kinerja formal, Ninda mengaitkannya dengan ketidakjelasan standar kerja DPR, Rangga menyoroti ketidakadilan finansial, sementara Lugas menegaskan bahwa hal ini mengindikasikan kemunduran demokrasi. Perbedaan persepsi ini menunjukkan bahwa audiens mahasiswa aktif mengorganisasikan dan menafsirkan pesan sarkastik Bintang sesuai latar belakang pengetahuan dan pengalaman mereka.

- c) 0.30 – 0.45: Scene Bintang Emon meroasting dengan sarkasme kerjaan DPR beralasan membuat aturan untuk rakyat padahal kenyatannya hanya mementingkan kepentingan pribadi.

Bintang menyampaikan:

“Emang kerjanya ngapain sih pak?” “salah satunya ya, jadi kita ini membuat peraturan untuk menyejahterakan rakyat Indonesia tapi FYI sebelum gua dimarah-marahin itu saya ingetin dulu ya, saya, keluarga saya, CS CS pejabat saya, CS pengusaha saya dan lain-lainnya itu juga bagian dari rakyat Indonesia. Jadi bukan saya ngebela mereka, no, mereka juga rakyat tapi pakai gelang fast track aja.”

Dalam scene ini, Bintang Emon menyampaikan sarkasme tentang anggota DPR yang berdalih membuat peraturan demi rakyat, tetapi pada kenyataannya menguntungkan kelompok atau jaringan dekat mereka sendiri seperti keluarga, kolega, pengusaha. Ia menyebut bahwa semua orang itu juga bagian dari rakyat, termasuk yang mendapat fasilitas seperti gelang fast track (kemudahan akses), sehingga secara tersirat menyatakan bahwa DPR memanipulasi makna rakyat yang digunakan sebagai tameng moral untuk melindungi kepentingan eksklusif. Bintang menggarisbawahi tentang kesejahteraan rakyat sebenarnya sering digunakan untuk membenarkan keputusan yang berpihak pada elit kekuasaan.

Dandi mempersepsikan sarkasme tersebut sebagai gambaran nyata dari praktik legislasi yang tidak berpihak kepada masyarakat.

“Untuk pertanyaan ketiga, gue setuju sih karena pada dasarnya regulator-regulator di Dewan Perwakilan Rakyat pada kenyataannya seringkali produk hukumnya tidak populis gitu. Tidak yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Apalagi sekarang sering ada produk hukum yang hanya mementingkan kepentingan-kepentingan suatu kelompok. Jadi statementnya Bintang Emon yang ini gue rasa sangat mencerminkan apa yang terjadi di Indonesia menurut gue.” (Dandi, 17 Juni 2025)

Bagi Dandi, sarkasme Bintang adalah cerminan dari realita politik yang menempatkan kepentingan kelompok tertentu di atas kepentingan publik. Begitu pula bagi Salsa, ia mendukung pandangan Bintang, namun dengan menambahkan dimensi moral dan tanggung jawab pejabat publik.

“Menurut saya, saya mendukung statement tersebut namun terdapat pertimbangan saya mendukung mengapa karena pada nyatanya di era sekarang ini memang DPR ini sering mementingkan kepentingan pribadi seperti membeli ataupun memiliki ataupun bahkan mengambil hal-hal ataupun hak-hak yang tidak seharusnya mereka dapatkan dikarenakan jabatan ataupun posisi mereka yang mempunyai power.” (Salsa, 16 Juni 2025)

Ia menambahkan bahwa tindakan tersebut sangat merugikan dan juga menjatuhkan ekspektasi dan kebutuhan masyarakat umum, sehingga DPR perlu diingatkan akan tanggung jawab dan dampak dari kebijakan yang mereka ambil. Persepsi Salsa memperlihatkan kesadaran moral bahwa kekuasaan harus dijalankan dengan etika dan keberpihakan terhadap rakyat.

Berbeda dengan keduanya, Ninda menyoroti sarkasme Bintang dengan menautkannya pada konteks kebijakan konkret, yakni UU Cipta Kerja. Ia berpendapat,

“Aku setuju banget di UU Ketenagakerjaan yang diganti sama UU Cipta Kerja... yang paling aku tidak setuju itu perihal pekerja outsourcing atau pekerja lepas... di UU yang baru itu semua pekerjaan bisa dioutsourcing-kan. Itu kan kaya ya ampun kasian pekerjaanya dong.” (Ninda, 16 Juni 2025)

Bagi Ninda, sarkasme Bintang tidak hanya lucu tetapi juga merepresentasikan bentuk protes terhadap kebijakan DPR yang merugikan masyarakat, terutama kaum pekerja. Persepsinya memperlihatkan keterkaitan langsung antara humor politik dan pengalaman sosial nyata.

Rangga menafsirkan ucapan Bintang sebagai bentuk interpretasi sarkastik terhadap konsep rakyat yang diselewengkan oleh pejabat.

“Bintang Emon itu mencoba menginterpretasi bahwa kerjanya para DPR ini menyejahterakan rakyat, yang dimana rakyat yang didahulukan itu adalah rakyat yang dari keluarganya, circle-nya dia, para pengusaha segala macam.” (Rangga, 8 Juli 2025)

Bagi Rangga, sarkasme Bintang bukan sekadar lelucon politik, tetapi bentuk kritik terhadap eksklusivitas kekuasaan. Ia melihat bagaimana humor digunakan untuk menyingkap ketimpangan struktur sosial dan politik dalam praktik representasi rakyat.

Sementara itu, Lugas memaknai sarkasme Bintang dari sudut pandang historis dan ideologis.

“DPR membuat aturan tapi pada kenyataannya dia tetap mementingkan pribadi atau kelompoknya atau keluarganya itu mengindikasikan bahwa mereka tidak mencirikan semangat reformasi. Dulu ketika zaman Orde Baru praktek-praktek KKN itu merebak, dan semangat reformasi itu hendak menghancurkan itu.” (Lugas, 9 Juli 2025)

Menurut Lugas, fenomena yang disindir oleh Bintang menunjukkan bahwa semangat reformasi telah luntur dan digantikan oleh perilaku yang serupa dengan masa lalu. Tanggapannya kembali mencuat yang menyatakan mengenai refleksi diri terhadap pernyataan yang disampaikan Bintang Emon.

“Bintang Emon ini sepertinya sedang mengajak kita untuk merenungi bahwa seringkali DPR yang kita pilih dalam lima tahun sekali itu tidak lagi mementingkan kehidupan kita sebagai masyarakat sipil.” (Lugas, 9 Juli 2025)

Dari seluruh persepsi mahasiswa tersebut, dapat dilihat bahwa sarkasme Bintang Emon dipahami secara berbeda sesuai dengan cara berpikir dan latar belakang mereka. Dandi menyoroti ketimpangan hukum dan kebijakan, Salsa menekankan tanggung jawab moral, Ninda mengaitkannya dengan kebijakan konkret yang merugikan rakyat, Rangga menafsirkan eksklusivitas elit dalam

makna rakyat, sementara Lugas meninjau kembali hilangnya idealisme reformasi. Hal ini menegaskan bahwa audiens mahasiswa aktif menafsirkan kritik sarkastik bukan hanya sebagai hiburan, melainkan sebagai refleksi sosial yang relevan dengan pengalaman dan pengetahuan mereka tentang realitas politik Indonesia.

- d) 0.50 – 0.57: Scene Bintang Emon meroasting dengan sarkasme kalau udah dipilih lupa rakyat

Bintang menyampaikan:

“Di pemilu kemarin katanya mau belain kita semua, bohong nih..”

“Terus kalau saya nggak ngelakuin kamu mau apa?”

Bintang Emon melontarkan sarkasme terhadap perilaku politisi yang sering kali lupa akan rakyat setelah berhasil terpilih dalam pemilu. Ucapan Bintang menjadi sindiran keras terhadap realitas politik, di mana janji kampanye yang manis berubah menjadi sikap acuh setelah memperoleh kekuasaan. Melalui humor sarkastik ini, Bintang memberikan relasi timpang antara penguasa dan rakyat yang diwakilinya.

Dandi mempersepsikan kritik tersebut sebagai gambaran nyata dari kondisi para anggota DPR saat ini.

“Ya benar ini juga satu hal yang lagi-lagi valid gitu karena memang pada kenyataannya semua Dewan Perwakilan Rakyat yang mostly gitu, 80% of it selalu melupakan rakyat yang diwakilinya gitu. Sehingga tidak pernah boro-boro untuk mewakilkan, menyampaikan aspirasi masyarakat. Tapi untuk hadir rapat aja sepertinya banyak yang sering bolos gitu.” (Dandi, 17 Juni 2025)

Dari pernyataannya, tampak bahwa Dandi memaknai sarkasme Bintang dengan logika realistis bahwa kritik tersebut dianggap cerminan langsung dari ketidakhadiran tanggung jawab wakil rakyat terhadap publik. Sementara itu, Salsa mempersepsikan sindiran Bintang dengan melihatnya dari perspektif kejujuran politik.

“Menurut saya, sarkasme tersebut relate dengan yang ada di masyarakat. Seperti contoh, ketika seorang pejabat yang sedang mencalonkan dirinya sebagai wakil daerah pastinya membutuhkan support dari rakyat yang ada di daerahnya. Bentuk mereka dalam mencari dukungan tersebut adalah dengan melakukan kampanye dengan cara blusukan yang diharapkan oleh rakyat ketika mereka terpilih menjadi wakil rakyat, janji yang diberikan atas perubahan harus dilaksanakan. Tetapi, realitanya tidak semua calon menepati janjinya untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Alhasil,

rakyat merasa janji yang telah diberikan hanya janji manis semata.” (Salsa, 16 Juni 2025)

Bagi Salsa, sarkasme Bintang berfungsi sebagai refleksi dari kebohongan politik, di mana citra dan janji digunakan sebagai strategi untuk memperoleh suara rakyat tanpa niat untuk memenuhi tanggung jawab yang dijanjikan. Ninda memaknai sarkasme tersebut dari sudut pandang moralitas individu.

“Ini aku juga setuju karena yang pertama itu pasti dia kalo udah kepilih itu ada rasa keberhasilan atas apa yang dia harapkan selama ini. Tapi sifat dasar manusia yang kalo dia udah mencapai sesuatu itu kadang dia lupa sama akarnya gitu, lupa sama gimana sih caranya dia bisa sampai di titik ini gitu. Sebenarnya itu manusiawi tapi kalo seorang yang udah dipilih sama rakyat terus dia lupa sama rakyat itu kaya kacang lupa sama kulitnya. Maksudnya dia dipilih kan berarti dia membawa amanah dan tanggung jawab yang rakyat berikan gitu loh sama dia terus kalo misalnya dia tiba-tiba lupa sama tanggung jawab yang seharusnya kan berarti itu bisa dibilang mendzolimi rakyat ya.” (Ninda, 16 Juni 2025)

Melalui penjelasannya, Ninda mempersepsikan bahwa kekuasaan sering kali mengubah karakter seseorang, membuatnya lupa akan akar dan amanah rakyat. Rangga menafsirkan pernyataan Bintang secara lebih politis dan struktural.

“Nah terus yang di scene 4 ya... Jadi kan di scene 4 ini kan maksudnya kayak ya kalau misalnya di awal kampanye janji mempro rakyat ngebela keadilan rakyat lah gitu-gitu segala macem, terus Bintang Emon ngomongin ‘kalau misalnya saya tidak ngelakuin ya terus kenapa’. Berarti kan ini ngasih pengumuman ke kita ya bahwa DPR ini kalau udah jadi udah dia lupa rakyat gitu. Jadi sekalipun dia nggak menepati janjinya, dia nggak paham kenapa-kenapa. Artinya bahwa anggota DPR atau orang-orang yang akhirnya mendapatkan jabatan sebagai seorang legislatif itu dia mempunyai kekuasaan untuk mengontrol publik di situ. Karena ketika ada publik yang bertentangan kepada dia, dia bisa ngontrol. Jadi benar apa yang disampaikan oleh Bintang Emon ini.” (Rangga, 8 Juli 2025)

Dari pernyataan tersebut, Rangga mempersepsikan sarkasme Bintang sebagai representasi dari relasi kekuasaan yang timpang, di mana DPR merasa memiliki kendali atas publik dan tidak lagi takut terhadap kritik rakyat. Berbeda dengan yang lain, Lugas menafsirkan sarkasme Bintang secara simbolik dan reflektif.

“Ya di akhir video itu kan Bintang Emon tanpa menggerakkan tangannya, ya semacam secara simbol dia menegaskan kalau bahasa Jawanya itu itaitu, ingainih atau kurang ajar terhadap rakyat. Tentu saja anggota DPR tidak mungkin melakukan itu di

publik. Tetapi dalam ruang-ruang tertentu, dalam rapat-rapat tertentu barangkali yang membicarakan konteks kepentingan rakyat dalam rangka perumusan undang-undang dan sebagainya mereka memperagakan itu. Dia menari-nari di antara penderitaan yang kita rasakan, kesejahteraan yang sangat sulit kita dapatkan, apalagi membicarakan keadilan. Jadi barangkali DPR hari ini, bukan hari ini saja ya, sepertinya dalam sejarah politik hukum kita DPR seringkali menjadi musuh tersembunyi di dalam kita berupaya untuk menjadi warga negara yang mengidamkan nuansa-nuansa keadilan, kesejahteraan dan sebagainya. DPR adalah musuh tersembunyi bagi rakyat.” (Lugas, 9 Juli 2025)

Persepsi Lugas menunjukkan pandangan reflektif bahwa sarkasme Bintang tidak hanya menertawakan perilaku individu, melainkan menggambarkan ironi struktural antara rakyat dan lembaga legislatif yang seharusnya memperjuangkan kepentingan publik.

Dengan demikian, meskipun stimulus yang diterima sama yakni sarkasme Bintang Emon terhadap politisi yang lupa akan rakyat setelah pemilu mahasiswa mempersepsikannya dengan cara yang berbeda. Dandi menyoroti ketidakhadiran tanggung jawab wakil rakyat, Salsa menekankan janji politik yang palsu, Ninda melihat sisi moral dan karakter individu, Rangga menafsirkan kekuasaan sebagai bentuk dominasi terhadap rakyat, dan Lugas memahami sarkasme tersebut sebagai simbol dari ironi politik yang berulang dalam sejarah demokrasi Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa audiens mahasiswa bersifat aktif dan interpretatif dalam memahami pesan sarkastik sesuai dengan pengalaman, nilai, dan kesadaran politik mereka masing-masing.

- e) 1.00– 1.15: Scene Bintang Emon meroasting dengan double sarkasme DPR lagi rapat suka main game, ternyata itu bukan game melainkan judi online.

Bintang menyampaikan:

“Dah saya mau main game candy crush lagi.”

Dalam scene terakhir ini, kalimat yang dilontarkan Bintang Emon menjadi bagian yang bukan hanya sekadar lelucon, melainkan bentuk sindiran tajam terhadap perilaku anggota DPR yang kedapatan bermain *game* saat rapat yang ternyata bukan *games* biasa, melainkan judi online. Sarkasme ini menjadi simbol degradasi etika dan moral dalam lembaga legislatif, sekaligus mencerminkan kemuakan publik terhadap perilaku wakil rakyat yang tidak menghargai tanggung jawabnya di ruang sidang.

Dandi mempersepsikan sindiran Bintang sebagai cerminan dua sisi negatif yang memperburuk citra DPR.

“Ini juga mencerminkan dua variable yang negatif gitu. Yang pertama adalah DPR Dewan Perwakilan Rakyat dan bermain judol kan adalah suatu hal yang seharusnya saling berlawanan gitu. Tapi pada kenyataannya ada anggota DPR yang bermain judol online. Kalau kita bicara pada video ini memang ada. Pada masa itu memang ada anggota DPR yang terbukti bermain judol online gitu ketika rapat. Ini kan artinya mencerminkan seberapa mirisnya yang terjadi di Dewan Perwakilan Rakyat kita gitu.” (Dandi, 17 Juni 2025)

Persepsi Dandi menunjukkan pandangan realistik yang mengaitkan kritik Bintang dengan fakta aktual. Ia melihat sarkasme tersebut sebagai refleksi dari kemerosotan moral dan profesionalisme DPR yang semestinya menjadi lembaga terhormat. Sementara itu, Salsa menyoroti peristiwa tersebut dari sudut pandang etika dan kepercayaan publik.

“Fenomena anggota DPR ini kedapatan bermain di gadget saat rapat sebenarnya ini sudah cukup memprihatinkan karena itu menunjukkan kurangnya tanggung jawab dan juga integritas sebagai wakil rakyat. Tapi ketika diketahui bahwa yang dimainkan bukan sekedar game lain kan judi online, masalah ini menjadi jauh lebih serius dan juga mencerminkan krisis integritas. Hal ini bukan lagi soal etika tapi juga soal hukum dan moral... Hal tersebut menimbulkan rasa kepercayaan rakyat ini bisa percaya lagi atau tidak terhadap lembaga legislatif.” (Salsa, 16 Juni 2025)

Melalui pandangannya, Salsa mempersepsikan sarkasme Bintang sebagai bentuk kritik terhadap krisis kepercayaan publik, di mana tindakan individu anggota DPR mencerminkan persoalan budaya politik yang lebih luas bukan hanya kesalahan personal. Ninda mempersepsikan adegan tersebut dengan rasa kecewa yang lahir dari pengalamannya sebagai penonton yang sejak lama menyaksikan kemerosotan perilaku wakil rakyat.

“Aku setuju karena bahkan pas jaman aku SMA itu aku liat video-video rapat DPR di YouTube, ya ampun miris banget mereka di sana cuma tidur terus kursinya banyak banget yang kosong. Itu kayak anak kecil, padahal DPR itu kan orang yang dipilih sama rakyat, bisa jadi DPR aja harus lewat pemilu, tapi ternyata pas udah kepilih rapat aja nggak dateng, pas rapat tidur, atau justru main game online atau bahkan judi online. Itu kan kayak bare minimum-nya aja nggak ada sama sekali, attitudenya udah nol banget.” (Ninda, 16 Juni 2025)

Persepsi Ninda bersifat emosional dan moralistik ia menilai perilaku tersebut bukan hanya mencoreng etika, tapi juga meruntuhkan citra DPR sebagai

lembaga yang seharusnya menjadi panutan. Rangga menafsirkan sarkasme Bintang dengan mengaitkannya pada peristiwa nyata yang sempat viral.

“Aku ingat banget kejadian salah satu anggota DPR itu waktu itu lagi rapat DPR RI, cewek, terus kebetulan dia main game yang ternyata judi online. Ketika diklarifikasi, dia ngomong itu Candy Crush, padahal jelas-jelas terekam kamera bahwa dia sedang bermain judi. Jadi konten yang dilakukan oleh Bintang Emon ini merupakan sindiran kepada para wakil rakyat. Kalau lu pengen benar-benar jadi DPR, ya kerja benar-benar, jangan main judi apalagi di forum. Lu nggak menghargai forum rakyat. Itu berarti dia menganggap remeh rakyat, karena di dalam forum permusyawaratan itu membahas kebijakan untuk rakyat, tapi dia malah bermain HP.” (Rangga, 8 Juli 2025)

Rangga mempersepsikan sindiran Bintang sebagai teguran moral terhadap perilaku arogan wakil rakyat yang mempermainkan kepercayaan publik, bahkan di forum resmi. Berbeda dari yang lain, Lugas menafsirkan kritik Bintang dengan pendekatan filosofis dan etis.

“Aku rasa Emon sedang memberikan satu ketegasan bahwa seringkali ketika anggota-anggota DPR itu gagal untuk mengentaskan permasalahan sosial, dia selalu menggunakan pendekatan-pendekatan teologis. Padahal ini adalah permasalahan sosial politik yang sebetulnya Tuhan tidak ikut campur di dalam kebengisan yang dibuat oleh anggota DPR itu. Nah kemudian berkaitan dengan anggota DPR yang saat rapat dia main game, apalagi main game yang berbasis judi online, ya aku rasa pandangan masyarakat itu menganggap bahwa satu dia tidak berintegritas, dua dia mencerminkan adanya kekurangajaran yang berlipat ganda, yang dipertontonkan kepada kita. Karena mana mungkin di antara rapat-rapat yang membicarakan kepentingan masyarakat, dia malah buka HP, apalagi judi online. Itu kebodohan yang berlipat ganda aku rasa, dan itu seringkali terjadi.” (Lugas, 9 Juli 2025)

Persepsi Lugas memperlihatkan kedalaman refleksi moral dan intelektual. Ia melihat bahwa sarkasme Bintang tidak hanya menyindir perilaku individu, tetapi juga menelanjangi kemunafikan sistem politik yang kehilangan nilai-nilai dasar tanggung jawab. Dandi menyoroti kemerosotan moral institusi, Salsa menekankan krisis kepercayaan publik, Ninda menyoroti hilangnya etika dan tanggung jawab, Rangga mengaitkannya dengan pelecehan terhadap forum publik, sementara Lugas memaknainya sebagai refleksi mendalam atas kebodohan moral dan etika politik. Hal ini menunjukkan bahwa audiens mahasiswa bersifat aktif dan kritis dalam menafsirkan pesan sarkastik Bintang,

dengan membangun persepsi berdasarkan nilai, pengalaman, dan kesadaran sosial masing-masing.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, ringkasan persepsi mahasiswa terhadap sarkasme Kiky Saputri dan Bintang Emon dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut:

Tabel 3. 3 Persepsi Audiens Mahasiswa terhadap Kritik Sosial dan Sarkasme dalam Stand Up Comedy

No .	Nama Responden	Persepsi Terhadap Kritik Sosial	Persepsi terhadap Sarkasme	Makna atau Kesimpulan Persepsi
1.	Salsa	Menganggap kritik sosial dalam Stand Up Comedy sebagai bentuk penyadaran masyarakat terhadap perilaku elite politik.	Menilai sarkasme sebagai gaya humor yang efektif namun tetap sopan.	Stand Up Comedy menjadi media edukatif yang mudah diterima anak muda.
2.	Dandi	Melihat kritik sosial sebagai cermin realitas politik dan sosial yang dialami masyarakat.	Sarkasme dianggap menyindir tanpa menyinggung, cocok untuk kritik publik.	Komedi berperan sebagai jembatan antara rakyat dan pemerintah.
3.	Rangga	Menganggap kritik sosial sebagai keberanian komika dalam menyuarakan kebenaran.	Sarkasme dipahami sebagai strategi komunikasi agar kritik diterima dengan ringan.	Humor menjadi cara kreatif melawan ketidakadilan sosia
4	Ninda	Menilai kritik sosial penting untuk menjaga keseimbangan demokrasi.	Sarkasme dianggap sebagai seni menyampaikan kejujuran tanpa menyinggung.	Komedi membuka ruang diskusi sosial secara terbuka.

Sumber: Olah Data Wawancara Peneliti, 2025.

C. Temuan Data Politikus

1. Kiky Saputri

- a) 1.55 – 2.05: Scene Kiky Saputri meroasting dengan sarkasme harapannya DPR menjadi pilihan rakyat untuk menyuarakan rakyat, realitanya musuh rakyat.

Kiky menyampaikan:

“Saya senang banget karena mendapat suatu kehormatan bisa tampil di depan para anggota DPR. Itu keren banget. Karena DPR itu adalah satu-satunya lembaga yang dipilih oleh rakyat untuk menyuarakan suara rakyat. Itu harapannya. Seperti yang kita tahu kenyataannya seperti apa bukan. Malah menjadi musuh rakyat.”

Melalui pernyataan tersebut, Kiky menyoroti kontras antara idealisme fungsi DPR sebagai wakil rakyat dengan realitas yang sering kali dianggap jauh dari aspirasi masyarakat. Kritiknya disampaikan secara sarkastik, dengan gaya humor yang menyinggung namun reflektif terhadap persepsi publik tentang lembaga legislatif.

Politisi yang menjadi audiens dalam penelitian ini mempersepsikan kritik Kiky secara beragam, tergantung pada cara mereka memahami konteks dan posisi DPR sebagai lembaga representatif.

Kuswanto, misalnya, mempersepsikan sindiran Kiky sebagai bentuk generalisasi yang tidak sepenuhnya benar.

“Kalau orang itu, anggota Dewannya kan punya nafsi-nafsi, punya kepribadian masing-masing. Selama kepribadian itu tidak menyimpang, ya kita berbuat untuk rakyat, kembali kepada rakyat, dan berbuat untuk rakyat. Tidak ada lah yang Dewan yang neko-neko. Itu hanya beberapa orang yang namanya oknum.” (Kuswanto, 21 Juli 2025)

Dari pandangan ini, Kuswanto mempersepsikan kritik Kiky sebagai cerminan perilaku segelintir individu, bukan sebagai representasi keseluruhan DPR. Ia menegaskan bahwa selama anggota dewan berpegang pada regulasi dan etika, maka fungsi representasi rakyat tetap berjalan sebagaimana mestinya. Persepsi ini menunjukkan kecenderungan defensif dan upaya menjaga citra institusional DPR sebagai lembaga yang masih berintegritas.

Totok menafsirkan sarkasme Kiky dengan pendekatan yang lebih kontekstual.

“Kalau menurut saya tetap DPRD itu menyuarakan aspirasi rakyat, tetap berjuang untuk rakyat, tetap berjuang oleh konstituennya. Hanya saja DPRD kan banyak, seumpamanya DPRD mewakili dari dapil 1 tentu menyuarakan konstituennya di dapil 1. Mungkin dapil 1 ini berteman dengan dapil 6. Nah itu yang jadi persoalan, mungkin miskomunikasinya di sini, dianggap musuh daripada rakyat yang di dapil yang lain.” (Totok, 19 Juli 2025)

Melalui pernyataannya, Totok mempersepsikan kritik Kiky sebagai akibat dari miskomunikasi antara rakyat dan wakilnya di lapangan. Ia menilai

bahwa ketidakpuasan masyarakat muncul karena perbedaan kepentingan antar daerah pemilihan, bukan karena fungsi DPR yang gagal secara menyeluruh. Pandangannya menegaskan adanya kesenjangan persepsi antara politisi dan masyarakat dalam memahami makna menyuarakan rakyat.

Sementara itu, Siswanto mempersepsikan sindiran Kiky sebagai kritik konstruktif terhadap anggota DPR yang belum menjalankan fungsi representatifnya secara utuh.

“Berarti anggota DPR tersebut belum bisa memahami tugasnya. Sehingga masih berbuat yang kurang semestinya, dengan kata lain kurang sesuai dengan fungsi mereka sebagai wakil rakyat. Ketika seorang anggota DPR masih menunjukkan perilaku atau tindakan yang tidak sesuai dengan semestinya seperti melalaikan tanggung jawab, bertindak sewenang-wenang, atau tidak menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi dengan baik maka hal itu menandakan adanya kegagalan dalam memahami esensi peran sebagai pejabat publik.” (Siswanto, 22 Juli 2025)

Siswanto memandang kritik Kiky bukan sebagai serangan, tetapi sebagai cermin evaluatif terhadap rendahnya kesadaran peran di kalangan legislator. Ia menegaskan pentingnya integritas, tanggung jawab moral, serta pemahaman yang lebih dalam terhadap tugas representatif agar DPR benar-benar dapat berfungsi sebagai jembatan antara rakyat dan kebijakan.

Dari ketiga tanggapan tersebut, terlihat bahwa para politisi mempersepsikan sarkasme Kiky Saputri dengan cara yang cenderung defensif dan rasional. Kuswanto menilai kritik Kiky hanya menyasar oknum, Totok melihatnya sebagai persoalan komunikasi antara dapil dan konstituen, sementara Siswanto menanggapinya secara reflektif sebagai masukan moral bagi perbaikan lembaga. Hal ini menunjukkan bahwa, meskipun stimulus yang diterima sama yakni kritik sarkastik terhadap DPR, para politisi memprosesnya sesuai dengan posisi, pengalaman, dan tanggung jawab mereka sebagai bagian dari lembaga yang dikritik. Dengan demikian, persepsi mereka lebih banyak diarahkan untuk menjelaskan dan meluruskan citra DPR, bukan untuk menolak keberadaan kritik itu sendiri.

- b) 2.21 – 2.50: Scene Kiky Saputri *eroasting* dengan sarkasme bagaimana DPR jauh dari rakyat karena tidak terjun ke lapangan.

Kiky menyampaikan:

“Oh saya inget bapak ini bapak Masinton kan tapi sebenarnya saya itu lupa saya gatau bapak Masinton itu siapa. Saya sampai

searching di google 'siapa itu Bapak Masinton' eh googlenya nanya balik."

Kalimat tersebut menyindir bahwa anggota DPR telah sedemikian jauh dari kesadaran publik hingga identitas mereka tak dikenal rakyat. Ini mencerminkan kritik terhadap minimnya kehadiran anggota legislatif di tengah masyarakat, baik secara fisik maupun simbolik. Dari sudut pandang komunikasi politik, sarkasme ini menyoroti kegagalan representasi: ketika seorang wakil rakyat tak lagi dikenali rakyatnya, maka terjadi distorsi mendasar dalam fungsi demokrasi.

Pernyataan ini merupakan bentuk humor yang menyinggung ironi politik, di mana anggota DPR yang seharusnya dikenal dan dekat dengan rakyat justru tampak asing dan tidak dikenal oleh publik. Kritik tersebut menyoroti lemahnya kedekatan sosial antara pejabat legislatif dengan masyarakat yang mereka wakili.

Kuswanto mempersepsikan sarkasme Kiky sebagai bentuk kesalahpahaman antara rakyat dan anggota dewan. Ia menilai bahwa jarak yang terjadi bukan semata-mata kesalahan pihak DPR.

"Ya, kalau anggota Dewan sampai jauh dari rakyat berarti yang salah bukan Dewannya. Kenapa? Dewan ini kan sebagai penyalur aspirasi. Kalau rakyatnya tidak menyampaikan, kan juga tidak tahu apa yang diinginkan oleh rakyat. Jadi kita harus saling bersinergi antara Dewan sama rakyat untuk saling mengisi kelebihan dan kekurangan." (Kuswanto, 21 Juli 2025)

Melalui pandangan ini, Kuswanto mempersepsikan kritik Kiky sebagai bentuk dorongan untuk memperbaiki komunikasi dua arah antara rakyat dan wakilnya. Ia menekankan pentingnya sinergi agar hubungan DPR dan masyarakat tidak terputus, serta menolak anggapan bahwa DPR sepenuhnya jauh dari rakyat. Persepsi ini menggambarkan kecenderungan politisi untuk melihat kritik secara normatif dan menempatkan tanggung jawab secara timbal balik, bukan sepihak.

Totok menafsirkan kritik Kiky dari sudut pandang fungsional dan komunikasi modern. Ia berpendapat bahwa kedekatan dengan rakyat tidak harus selalu diwujudkan melalui kehadiran fisik di lapangan. Ia menjelaskan,

"Menurut pendapat saya tidak demikian, karena apa? Karena kita buktinya seperti kita akan komunikasi terus melalui HP walaupun kita gak pernah terjun ke lapangan. Tetapi rakyat yang banyak tahu apalagi yang milih saya ya, yang milih saya berarti tahu HP saya,

tahu kegiatan saya... Jadi tidak harus ketemu di lapangan. Akan tetapi melalui media-media lain seperti HP tetap terjalin komunikasinya.” (Totok, 19 Juli 2025)

Persepsi Totok menunjukkan pandangan pragmatis bahwa hubungan representatif bisa tetap berjalan melalui teknologi dan komunikasi jarak jauh. Ia berusaha menegaskan bahwa keterlibatan politik tidak selalu identik dengan kehadiran fisik, melainkan juga melalui media interaktif yang memungkinkan komunikasi antara dewan dan konstituennya.

Berbeda dari keduanya, Siswanto justru mempersepsikan sarkasme Kiky sebagai kritik yang relevan terhadap perilaku anggota DPR yang terlalu berjarak dari masyarakat.

“Untuk memaksimalkan kinerja sebagai wakil rakyat, seorang anggota DPR tidak bisa hanya bekerja dari balik meja atau sekadar mengandalkan laporan formal semata, melainkan harus secara aktif turun langsung ke lapangan dan menyatu dengan masyarakat.” (Siswanto, 22 Juli 2025)

Ia menekankan pentingnya interaksi langsung untuk menggali aspirasi, memahami kebutuhan riil masyarakat, serta merasakan secara langsung permasalahan yang mereka hadapi. Persepsi Siswanto menunjukkan kesadaran reflektif bahwa kedekatan simbolik tidak cukup tanpa kehadiran nyata. Baginya, keterlibatan aktif anggota DPR di lapangan tidak hanya memperkuat legitimasi sosial, tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.

Dari ketiga tanggapan tersebut, terlihat bahwa politisi mempersepsikan sarkasme Kiky Saputri dengan cara yang berbeda. Kuswanto melihatnya sebagai ajakan untuk memperkuat sinergi antara rakyat dan DPR, Totok menilai komunikasi digital sudah cukup menjadi jembatan aspirasi, sementara Siswanto menafsirkan kritik tersebut sebagai tuntutan moral agar DPR benar-benar hadir di tengah masyarakat.

Hal ini menunjukkan bahwa persepsi politisi terhadap kritik sarkastik Kiky bersifat rasional dan defensif, di mana mereka berusaha menempatkan diri bukan sebagai objek sindiran, melainkan sebagai pihak yang memahami dan menjelaskan konteks kelembagaan DPR secara proporsional.

- c) 5.20 – 5.34: Scene Kiky Saputri meroasting dengan sarkasme kurangnya nasionalisme karena tidak hafal lagu Indonesia Raya lagi.

Kiky menyampaikan:

“Dan satu lagi yang intrik dengan Pak Roy Suryo adalah ketika beliau tidak hafal atau salah lirik dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya. Betul pak kalo kebanyakan nonton video begituan (read: video ga senonoh) suka ngerusak sel otak.”

Sindiran ini tampaknya ringan, namun menyimpan dua lapis kritik: pertama, terhadap pejabat yang gagal menunjukkan nasionalisme dasar, dan kedua, terhadap praktik tidak etis yang melekat pada figur publik yang seharusnya menjadi teladan moral. Di mata audiens, sarkasme ini menggugah pertanyaan tentang sejauh mana nasionalisme dipraktikkan oleh para pemegang kuasa.

Melalui lelucon ini, Kiky menggabungkan unsur humor dan kritik moral yang menyentil kurangnya nasionalisme pada sosok pejabat publik yang seharusnya menjadi teladan dalam menghormati simbol negara.

Kuswanto mempersepsikan sarkasme tersebut secara humanis dan penuh toleransi.

“Ya mungkin kalau di sini video ini terkait Pak Roy Suryo. Ini mungkin dia pada waktu menyanyi, pikirannya tidak mengabdikan Indonesia Raya. Pikiran yang lain, sehingga dia lupa. Kalau kita sebagai warga negara Indonesia, lagu Indonesia Raya itu dinyanyikan mulai kita SD sampai sekarang tetap menyanyikan Indonesia Raya. Mudah-mudahan kita tidak lupa. Kalau lupa wajar lah manusia, wajar punya lupa. Tetapi tidak dibuat-buat untuk melupa.” (Kuswanto, 21 Juli 2025)

Persepsi Kuswanto menunjukkan sikap empatik yang menganggap kejadian tersebut sebagai bentuk kelalaian manusiawi, bukan cerminan lemahnya rasa nasionalisme. Ia berupaya menormalkan situasi tersebut dengan menekankan bahwa setiap individu memiliki potensi untuk lupa, selama tidak disengaja atau diulang sebagai kebiasaan.

Totok memberikan pandangan yang lebih normatif dan reflektif terhadap konteks nasionalisme yang disindir Kiky.

“Menanggapi Kiky Saputri tentang Roy Suryo yang tidak hafal lagu Indonesia Raya, menurut pendapat saya memang kita prihatin. Karena itu adalah lagu kebangsaan kita ya. Sejak kecil kita menyanyi. Mulai SD, SMP, SMA bahkan sekarang pun tetap kita kumandangkan. Jadi dalam hal ini ya ini merupakan pelajaran kita semua. Paling tidak kita harus ya hafal dan menghayatinya.” (Totok, 19 Juli 2025)

Bagi Totok, sarkasme Kiky berfungsi sebagai pengingat moral bagi masyarakat dan pejabat publik untuk tetap menghargai simbol kebangsaan. Ia mempersepsikan humor Kiky bukan sekadar ejekan, melainkan sebagai refleksi

agar semua warga negara lebih menanamkan nilai-nilai nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari. Sementara itu, Siswanto menafsirkan sarkasme Kiky dengan pendekatan yang lebih idealis dan konseptual.

“Sebagai warga negara, terlebih lagi sebagai pejabat publik, memahami, menghafal, dan melaksanakan penghormatan terhadap lagu kebangsaan Indonesia Raya bukanlah pilihan, melainkan sebuah kewajiban moral dan konstitusional... lagu Indonesia Raya bukan sekadar rangkaian nada dan lirik, melainkan simbol pemersatu bangsa yang sarat dengan nilai perjuangan, identitas nasional, dan semangat kemerdekaan.” (Siswanto, 22 Juli 2025)

Persepsi Siswanto menggambarkan kesadaran mendalam bahwa seorang pejabat publik memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi teladan dalam menghormati simbol negara. Bagi Siswanto, kelalaian terhadap lagu kebangsaan mencerminkan lemahnya pemahaman identitas nasional dan dapat mengurangi wibawa negara di mata rakyat.

Dari ketiga tanggapan tersebut, tampak bahwa para politisi mempersepsikan sarkasme Kiky Saputri secara beragam namun tetap dalam koridor rasional dan reflektif. Kuswanto melihatnya sebagai kekhilafan manusiawi, Totok menilainya sebagai pelajaran moral bagi semua pihak, sementara Siswanto menganggapnya sebagai kritik terhadap lemahnya nilai nasionalisme dan tanggung jawab pejabat publik.

Hal ini menunjukkan bahwa meskipun stimulus yang diterima sama—yakni sindiran Kiky terhadap kurangnya rasa nasionalisme pejabat—setiap politisi menafsirkan pesan tersebut sesuai dengan latar pemikiran, pengalaman, dan nilai-nilai moral yang mereka anut. Kritik Kiky dengan demikian tidak hanya ditanggapi sebagai humor, tetapi juga sebagai refleksi atas tanggung jawab etis dan simbolik para pejabat publik terhadap bangsa.

- d) 6.15 – 6.30: Scene Kiky Saputri meroasting dengan sarkasme Roy Suryo lupa bayar makan , apalagi sama perut rakyat.

Kiky menyampaikan:

“Perut Sendiri Aja Lupa, Gimana Perut Rakyat?”

Pernyataan ini menjadi bentuk kritik tajam yang dibungkus komedi terhadap sikap abai pejabat terhadap tanggung jawab sosialnya. Melalui sarkasme tersebut, Kiky mengajak penonton untuk merefleksikan ketimpangan

antara kesejahteraan pribadi pejabat dan kondisi rakyat yang masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar.

Kuswanto mempersepsikan sarkasme ini secara rasional dan berupaya mengaitkannya dengan tanggung jawab struktural anggota dewan. Ia menuturkan,

“Terkait dengan lupa, lupa bayar. Memang kita lupa tadi. Mungkin lupa ini karena kita buru-buru atau apa. Tapi kalau urusan kita dengan masyarakat, dengan aturan, ya kita tidak mungkin lupa. Tugas kita setiap hari itu ada tiga. Yang pertama adalah membuat aturan. Yang kedua adalah membuat pembahasan anggaran. Dan yang ketiga adalah membuat mekanisme untuk rapat di anggota Dewan.” (Kuswanto, 21 Juli 2025)

Kuswanto menekankan bahwa selama aturan atau karangan yang dibuat tidak membuat kita lupa kepada masyarakat, maka fungsi legislatif tetap berjalan. Persepsinya menunjukkan kecenderungan untuk menafsirkan sindiran Kiky sebagai peringatan ringan yang tidak perlu direspons berlebihan, karena menurutnya, tanggung jawab kepada rakyat sudah diatur dalam sistem kerja DPR.

Totok menanggapi sarkasme Kiky dengan pendekatan yang lebih simbolik dan optimistis.

“Dalam hal ini saya memang apresiasi ya, apresiasi perutnya sendiri saja lupa apalagi perut rakyat. Tapi tetap anggota DPR yang ideal tetap harus memperjuangkan masyarakat, memperjuangkan konstituen, memperjuangkan rakyat. Pada intinya bagaimana kalau perut rakyat sudah terpenuhi tentunya kemiskinan akan terentaskan.” (Totok, 19 Juli 2025)

Bagi Totok, sarkasme Kiky berfungsi sebagai pengingat moral bahwa kesejahteraan rakyat harus menjadi prioritas utama lembaga legislatif. Ia mempersepsikan humor tersebut sebagai bentuk refleksi yang positif untuk memperkuat komitmen DPR dalam memperjuangkan kebutuhan dasar masyarakat.

Berbeda dengan keduanya, Siswanto menafsirkan sindiran Kiky secara mendalam dengan menekankan aspek moral dan etika pejabat publik.

“Introspeksi dan kontrol diri merupakan dua pilar penting dalam menjaga integritas seorang pejabat publik, di mana pun ia berada dan dalam situasi apa pun. Jabatan sebagai wakil rakyat bukan hanya menyangkut kewenangan formal, tetapi juga tanggung jawab moral yang melekat dalam setiap tindakan, baik di ruang publik maupun privat. Kasus-kasus pelanggaran etika yang dilakukan oleh tokoh publik seperti yang pernah terjadi pada Bapak Roy Suryo

menjadi pengingat keras bahwa kurangnya kontrol diri dapat merusak reputasi pribadi sekaligus mencederai martabat lembaga yang diwakilinya.” (Siswanto, 22 Juli 2025)

Persepsi Siswanto menyoroti pentingnya kesadaran etis dan tanggung jawab moral dalam diri pejabat publik agar tidak terjebak dalam arogansi kekuasaan dan dapat menjadi teladan bagi masyarakat.

Dari ketiga tanggapan tersebut, dapat disimpulkan bahwa para politisi mempersepsikan sarkasme Kiky dengan cara yang cenderung reflektif dan mempertahankan posisi mereka sebagai pelayan publik. Kuswanto menanggapi dengan logika administratif, Totok menekankan pentingnya kesejahteraan rakyat, dan Siswanto melihatnya sebagai kritik terhadap lemahnya moralitas pejabat.

Hal ini menunjukkan bahwa para politisi menafsirkan pesan tersebut berdasarkan nilai, tanggung jawab, dan pengalaman profesional mereka. Kiky melalui sarkasmenya berhasil menggugah refleksi personal sekaligus membuka ruang bagi pejabat publik untuk melakukan introspeksi terhadap perilaku dan integritasnya.

- e) 6.30 – 6.40: Scene Kiky Saputri meroasting dengan sarkasme Roy Suryo selalu menjawab susah mendengar jadi dianggap suka banyak alasan.

Kiky menyampaikan:

“Alasan. Jadi anggota DPR banyak alasan.”

Ucapan ini dilontarkan setelah beberapa sindiran sebelumnya yang menyoroti tindakan Roy Suryo, dan mengarah pada satu kesimpulan bahwa pejabat publik, alih-alih memberikan klarifikasi konkret atas kritik yang ditujukan padanya, justru kerap menghindar dengan dalih yang berputar-putar. Kalimat singkat tersebut menyasar kebiasaan defensif para anggota DPR ketika dimintai pertanggungjawaban sebuah retorika pembenaran yang kerap membuat publik frustrasi.

Kalimat ini dilontarkan setelah menyinggung Roy Suryo yang dikenal sering beralasan sehingga susah mendengar, dianggap simbol dari perilaku wakil rakyat yang sulit menerima kritik dan lebih sibuk mencari pembenaran daripada solusi. Melalui humor ini, Kiky menyoroti budaya beralasan yang mencerminkan lemahnya tanggung jawab moral dan komunikasi publik dari sebagian pejabat.

Kuswanto mempersepsikan kritik Kiky sebagai bagian dari dinamika demokrasi yang sehat dan perlu dihargai.

“Sebagai anggota DPRD, saya pribadi menghargai kritik, termasuk yang disampaikan dalam bentuk komedi seperti yang dibawakan Mbak Kiky Saputri. Itu bagian dari demokrasi, dan kami wajib mendengarkan aspirasi rakyat, apa pun medianya termasuk lewat humor. Tapi saya juga ingin mengajak masyarakat untuk tidak mengeneralisasi. Tidak semua anggota DPR suka beralasan. Banyak dari kami yang bekerja diam-diam, turun ke lapangan, dan fokus menyelesaikan masalah warga. Hanya saja, kadang memang kerja kami tidak selalu terekspos di media.” (Kuswanto, 21 Juli 2025)

Melalui pernyataannya, Kuswanto mempersepsikan sarkasme Kiky sebagai bentuk kontrol sosial yang wajar namun perlu dilihat secara proporsional. Ia menunjukkan sikap terbuka terhadap kritik, tetapi tetap berupaya menjaga citra lembaga legislatif agar tidak dipukul rata oleh opini publik yang negatif.

Totok menafsirkan sarkasme Kiky dengan perspektif birokratis yang menjelaskan batas tanggung jawab legislatif.

“Menanggapi Kiky Saputri tentang Roy Suryo selalu menjawab susah mendengar, jadi dianggap suka banyak alasan. Dalam hal ini kita tahu anggota DPRD itu bukan pengguna anggaran ya. Sebagai pengawas ya. Kalau pengguna anggaran itu adalah eksekutif. Kalau kita ketika ada aspirasi kita menindaklanjuti kepada eksekutif. Eksekutif lah yang akan memutuskan apakah aspirasi yang diberi seorang anggota DPRD ini sesuai dengan program APBD yang akan datang atau tidak.” (Totok, 19 Juli 2025)

Persepsi Totok memperlihatkan upaya untuk meluruskan pemahaman publik bahwa tidak semua keputusan berada di tangan DPR. Ia menilai sarkasme Kiky muncul dari ketidaktahuan masyarakat terhadap mekanisme kerja pemerintahan, dan karenanya perlu dijawab dengan penjelasan yang edukatif.

Siswanto menanggapi sarkasme Kiky dengan pendekatan reflektif dan filosofis. Ia menyoroti pentingnya kontrol diri dan kesadaran moral dalam menghadapi kritik publik.

“Bagaimanapun situasi dan kondisi yang dihadapi, seorang pejabat publik harus senantiasa melakukan introspeksi dan menjaga kontrol diri agar tidak terjerumus dalam sikap lalai, arogan, atau terlena oleh kekuasaan dan fasilitas yang melekat pada jabatannya. Tanpa proses kontrol diri yang kuat, sangat mudah bagi seorang pejabat untuk terbawa arus popularitas, kekuasaan, atau godaan materi yang pada akhirnya menjauhkan mereka dari tujuan mulia pengabdian.” (Siswanto, 22 Juli 2025)

Persepsi Siswanto menggambarkan bahwa humor Kiky tidak sekadar hiburan, tetapi juga menjadi pengingat bagi pejabat untuk senantiasa mawas diri dan menjaga etika jabatan agar tidak kehilangan arah pelayanan publik.

Dari ketiga tanggapan tersebut, dapat dilihat bahwa para politisi mempersepsikan sarkasme Kiky Saputri secara berimbang antara sikap defensif dan reflektif. Kuswanto menilai kritik itu wajar selama tidak digeneralisasi, Totok menjelaskan batas tanggung jawab struktural DPR sebagai lembaga pengawas, sementara Siswanto menafsirkan pesan Kiky sebagai dorongan untuk memperkuat integritas dan kesadaran moral pejabat publik.

Dengan demikian, para politisi memprosesnya sesuai dengan posisi dan nilai-nilai profesional yang mereka anut. Sarkasme Kiky pada akhirnya menjadi ruang refleksi yang mempertemukan kritik publik dan tanggung jawab pejabat dalam bingkai komunikasi demokratis.

2. Bintang Emon

- a) 0.05 – 0.10: Scene Bintang Emon meroasting dengan sarkasme pejabat kalo aneh-aneh kayak difitnah, dituduh korupsi.

Bintang menyampaikan:

“Pusing ga sih jadi anggota dewan?” “jujur aja kalau saya nggak ya karena selama saya nggak aneh-aneh ya itu kemungkinan saya dipecat mendekati zero” (sambil memperagakan main hp ketika sedang rapat dan seolah tidak fokus)

Potongan adegan ini mengandung sindiran terhadap perilaku pejabat publik yang tampak aman dari konsekuensi meskipun menunjukkan ketidakseriusan atau pelanggaran etika ringan dalam menjalankan tugas. Kritik tersebut menyoroti ketimpangan moral dan lemahnya penegakan disiplin di lembaga legislatif.

Kuswanto mempersepsikan sindiran Bintang Emon secara normatif dan struktural. Ia menilai bahwa anggota dewan sudah memiliki regulasi dan aturan yang jelas, sehingga selama bekerja sesuai prosedur, tidak ada hal yang perlu dikhawatirkan.

“Selama kita melakukan aturan yang sesuai dengan perundang-undangnya yang ada, ya kita tetap enjoy aja dan aman-aman saja.” (Kuswanto, 21 Juli 2025)

Dari sudut pandang Kuswanto, kritik yang disampaikan komika tidak dianggap sebagai serangan terhadap etika lembaga, tetapi lebih sebagai bentuk ketidaktahuan publik terhadap mekanisme formal yang mengatur perilaku anggota dewan. Persepsi ini memperlihatkan orientasi kognitif yang menekankan stabilitas sistem dan kepatuhan terhadap aturan, bukan pada aspek moral atau citra publik.

Berbeda dengan Kuswanto, Totok mempersepsikan sindiran tersebut dari perspektif kedisiplinan internal lembaga. Ia menegaskan bahwa perilaku aneh-aneh sebagaimana disindir oleh Bintang Emon memiliki konsekuensi nyata karena setiap anggota DPRD terikat oleh kode etik dan aturan partai.

“Jika anggota DPRD tidak ikut paripurna selama lima kali berturut-turut tanpa izin maka bisa di-PAW,” (Totok, 19 Juli 2025)

Menunjukkan bahwa Totok memahami kritik tersebut sebagai pengingat akan pentingnya ketertiban dan tanggung jawab moral anggota dewan. Persepsi ini bersifat evaluatif, di mana Totok memaknai humor sarkastik bukan sebagai penghinaan, melainkan sebagai stimulus untuk menegaskan kembali pentingnya etika dan aturan internal dalam menjaga kredibilitas lembaga legislatif.

Sementara itu, Siswanto mempersepsikan sindiran Bintang Emon dalam konteks sosial yang lebih luas. Ia memaknai pesan humor tersebut sebagai refleksi atas pentingnya keselarasan antara perilaku pejabat publik dengan nilai-nilai sosial masyarakat. Menurutnya, ketika seorang pejabat menampilkan gaya hidup atau perilaku yang tidak selaras dengan norma masyarakat, hal itu dapat menimbulkan jarak sosial dan menurunkan kepercayaan publik.

“Selaras dengan nilai dan kultur masyarakat, bukan sekadar untuk menjaga citra, tetapi sebagai bentuk empati dan tanggung jawab moral.” (Siswanto, 22 Juli 2025)

Persepsi Siswanto menunjukkan orientasi moral dan sosial yang lebih luas, di mana sarkasme dianggap sebagai kritik terhadap ketimpangan perilaku pejabat, bukan sekadar pelanggaran aturan administratif.

Dengan demikian, ketiga audiens politisi mempersepsikannya secara berbeda. Kuswanto menyoroti aspek kepatuhan terhadap aturan, Totok menekankan dimensi kedisiplinan dan kode etik, sedangkan Siswanto

memaknai kritik tersebut sebagai dorongan moral agar pejabat publik lebih peka terhadap nilai-nilai sosial. Perbedaan persepsi ini memperlihatkan bahwa audiens politisi tidak pasif dalam menerima kritik, melainkan aktif menafsirkan pesan sarkastik sesuai dengan latar belakang, pengalaman, dan orientasi nilai masing-masing.

- b) 0.10 – 0.15: Scene Bintang Emon meroasting dengan sarkasme kalau DPR kerjanya ga ada berbasis Key Performance Indicator jadi aman ga ada dipecat walaupun tidak perform.

Bintang Emon menyampaikan:

“Emang KPInya ga di hitung, pak?” “Jangan samain ini dengan kantor-kantor pada umumnya, kita berbeda. Lebih aneh kantor kamu. Kok ada sih orang absen tapi gajinya dipotong, aneh.”

Sarkasme ini menyoroti fenomena bahwa anggota dewan dianggap tetap menerima gaji penuh meskipun tidak menunjukkan kinerja optimal. Kritik tersebut memunculkan pesan bahwa lembaga legislatif memiliki standar kinerja yang longgar dibandingkan dengan profesi lain yang menuntut akuntabilitas dan penilaian berbasis prestasi.

Kuswanto mempersepsikan sindiran itu secara formal dan regulatif.

“Kita ini wakil rakyat, jadi tugas dan mekanisme kerja kita sudah jelas, termasuk soal gaji dan kewajiban hadir. Gaji pun diatur oleh perundang-undangan, tidak bisa diubah-ubah seenaknya.”
(Kuswanto, 21 Juli 2025)

Ia menjelaskan bahwa sistem penggajian anggota dewan sudah diatur secara resmi oleh peraturan perundang-undangan, sehingga tidak mungkin terjadi manipulasi atau pemotongan gaji di luar mekanisme hukum.

“Gaji pun juga sudah jelas, diatur melalui peraturan perundang-undangan. Kalau gaji yang lain-lain itu sudah di luar sistem.”
(Kuswanto, 21 Juli 2025)

Menunjukkan bahwa Kuswanto memahami kritik tersebut sebagai bentuk ketidaktahuan masyarakat terhadap sistem birokrasi. Persepsi ini menekankan pada aspek legalitas dan prosedur, bukan pada persoalan moralitas atau etos kerja yang menjadi inti kritik Bintang Emon.

Totok, di sisi lain, mempersepsikan sindiran komika ini sebagai salah paham publik terhadap hak keuangan anggota DPRD.

“Masalah gaji tidak dipotong walaupun enggak hadir itu memang hak anggota DPRD. Beda dengan uang perjalanan dinas atau kunjungan kerja, itu baru bisa tidak diberikan kalau tidak ikut. Jadi

antara gaji pokok dan tunjangan kegiatan harus dibedakan.” (Totok, 19 Juli 2025)

Ia menegaskan bahwa gaji adalah hak yang tidak bisa diganggu, sedangkan tambahan seperti tunjangan atau uang perjalanan memiliki mekanisme berbeda. Ia menyatakan, “Kalau gaji itu hak seseorang yang tidak bisa diotak-atik. Tetapi kalau masalah kunker, ketika seseorang nggak ikut jangan dapat apa-apa.”

Persepsi Totok menggambarkan pandangan pragmatis, di mana isu yang diangkat komika tidak dipahami sebagai kritik terhadap akuntabilitas, melainkan sekadar kekeliruan dalam memaknai sistem keuangan anggota legislatif. Artinya, humor sarkastik Bintang Emon ditafsirkan secara literal dan administratif, bukan sebagai refleksi terhadap moral kerja atau tanggung jawab publik.

Berbeda dengan keduanya, Siswanto mempersepsikan sindiran ini dari sudut pandang idealisme dan tanggung jawab moral.

“Sebagai anggota DPR, kewajiban utama yang tidak bisa ditawar adalah bekerja secara maksimal. Jabatan ini bukan prestise, tetapi amanah rakyat. Kehadiran mereka di parlemen harus membawa dampak nyata, bukan hanya formalitas.” (Siswanto, 22 Juli 2025)

Ia melihat pesan Bintang Emon sebagai dorongan agar anggota dewan benar-benar menjalankan perannya sebagai wakil rakyat yang aktif memperjuangkan aspirasi masyarakat. Menurutnya, jabatan anggota DPR bukanlah simbol prestise, melainkan amanah yang harus diwujudkan dalam kerja nyata.

“Kehadiran mereka di parlemen harus membawa arti dan dampak nyata, bukan hanya sebagai simbol representasi, tetapi sebagai motor perubahan.” (Siswanto, 22 Juli 2025)

Persepsi ini menampilkan pemahaman yang lebih reflektif dan etis, di mana kritik sarkastik dipahami sebagai cerminan ekspektasi masyarakat terhadap integritas dan produktivitas lembaga legislatif.

Dengan demikian, ketiga politisi memberikan persepsi yang berbeda. Kuswanto berfokus pada kepastian hukum, Totok menekankan hak administratif anggota dewan, sementara Siswanto menafsirkan kritik itu sebagai dorongan moral untuk bekerja lebih substantif bagi rakyat. Perbedaan persepsi ini menunjukkan bahwa para politisi menanggapi humor sarkastik berdasarkan kerangka berpikir, pengalaman jabatan, dan orientasi nilai mereka masing-masing.

- c) 0.30 – 0.45: Scene Bintang Emon meroasting dengan sarkasme kerjaan DPR beralasan membuat aturan untuk rakyat padahal kenyatannya hanya mementingkan kepentingan pribadi.

Bintang menyampaikan:

“Emang kerjanya ngapain sih pak?” “salah satunya ya, jadi kita ini membuat peraturan untuk menyejahterakan rakyat Indonesia tapi FYI sebelum gua dimarah-marahin itu saya ingetin dulu ya, saya, keluarga saya, CS CS pejabat saya, CS pengusaha saya dan lain-lainnya itu juga bagian dari rakyat Indonesia. Jadi bukan saya ngebela mereka, no, mereka juga rakyat tapi pakai gelang fast track aja.”

Pernyataan ini menyoroti perilaku anggota dewan yang kerap mengatasnamakan “kepentingan rakyat”, padahal kebijakan yang dihasilkan sering kali menguntungkan kelompok tertentu. Melalui humor, Bintang Emon mengkritik kecenderungan DPR untuk menyamarkan kepentingan pribadi di balik narasi representasi publik.

Kritik tersebut memunculkan beragam persepsi dari audiens politisi.

“Peraturan daerah dibuat untuk kepentingan masyarakat di kabupaten. Semua regulasi diarahkan agar kebijakan daerah berpihak pada rakyat, bukan kelompok tertentu.” (Kuswanto, 21 Juli 2025)

Kuswanto mempersepsikan sindiran Bintang Emon sebagai bentuk kesalahpahaman publik terhadap fungsi legislasi. Ia menjelaskan bahwa pembuatan peraturan daerah atau undang-undang selalu berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

“Peraturan daerah dibuat untuk kepentingan masyarakat yang ada di Kabupaten Kediri. Sehingga semua regulasinya berorientasi kepada kepentingan masyarakat,” (Kuswanto, 21 Juli 2025)

Menegaskan bahwa menurut Kuswanto, kritik semacam itu muncul karena masyarakat tidak memahami proses kerja dewan secara teknis. Persepsi ini menggambarkan orientasi kognitif dan normatif, di mana fokus utama ada pada membenaran sistem dan fungsi kelembagaan, bukan pada potensi penyimpangan moral atau kepentingan di balik kebijakan.

“Fungsi DPRD ada tiga: legislasi, budgeting, dan pengawasan. Semua produk aturan harus berorientasi pada masyarakat, bukan kepentingan pribadi. Kalau orientasinya pribadi, itu sudah melanggar fungsi DPRD itu sendiri.” (Totok, 19 Juli 2025)

Totok memiliki persepsi yang senada, tetapi dengan penekanan pada struktur fungsi DPRD. Ia menjelaskan bahwa lembaga legislatif memiliki tiga

fungsi utama legislasi, budgeting, dan pengawasan yang secara prinsip harus mengutamakan kepentingan publik.

“Kalau kita membuat aturan untuk kepentingan pribadi gimana caranya? Belum ada, karena produk daripada aturan itu adalah legislasi.” (Totok, 19 Juli 2025)

Bagi Totok, sarkasme yang disampaikan Bintang Emon tidak relevan dengan realitas kerja legislatif, karena secara ideal setiap keputusan selalu diarahkan untuk masyarakat. Persepsi ini menunjukkan kecenderungan defensif dan formalistik, di mana kritik sosial dianggap sebagai generalisasi negatif terhadap lembaga yang sebenarnya memiliki sistem kerja yang jelas.

Sementara itu, Siswanto mempersepsikan kritik Bintang Emon secara lebih reflektif dan substansial. Ia memahami pesan tersebut sebagai sindiran terhadap bias kepentingan dalam proses legislasi. Menurutnya, peraturan yang berpihak pada kelompok tertentu jelas mencederai nilai keadilan dan mengikis kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif.

“Ketika sebuah regulasi hanya menguntungkan kelompok sendiri, maka nilai keadilan dalam demokrasi menjadi ternodai dan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif pun merosot. Peraturan yang baik harus inklusif dan adil bagi seluruh masyarakat tanpa memandang SARA. Kalau regulasi hanya menguntungkan kelompok sendiri, kepercayaan publik akan merosot. Legislator harus punya keberanian moral untuk berpihak pada kepentingan umum.” (Siswanto, 22 Juli 2025)

Persepsi Siswanto menunjukkan kesadaran moral yang kuat bahwa kritik komika tidak hanya menyentuh persoalan hukum, melainkan juga etika representasi dan tanggung jawab sosial pejabat publik dalam menjaga keadilan.

Dengan demikian, ketiga audiens politisi mempersepsikannya dengan cara yang berbeda. Kuswanto menekankan aspek prosedural dan aturan formal, Totok menyoroti fungsi kelembagaan secara teknis, sementara Siswanto menafsirkan kritik tersebut dalam konteks moral dan keadilan sosial.

Perbedaan persepsi ini menggambarkan bahwa audiens politisi aktif mengonstruksi makna sesuai dengan orientasi nilai, pengalaman jabatan, serta pandangan mereka terhadap peran lembaga legislatif di mata publik.

- d) 0.50 – 0.57: Scene Bintang Emon meroasting dengan sarkasme kalau udah dipilih lupa rakyat

Bintang menyampaikan:

“Di pemilu kemarin katanya mau belain kita semua, bohong nih..”

“terus kalau saya nggak ngelakuin kamu mau apa?”

Dalam scene ini, Bintang Emon menyuarakan kekecewaan masyarakat terhadap janji-janji politik yang tak ditepati. Kalimat terakhir, yang bernada tantangan dan sinis, mencerminkan relasi kuasa yang timpang sebagai wakil rakyat yang merasa tak lagi memiliki kewajiban moral terhadap konstituennya setelah terpilih. Ia menyampaikan bahwa setelah terpilih, banyak anggota DPR yang tidak lagi memperjuangkan nasib rakyat. Bahkan ketika dikritik karena ingkar janji, responsnya justru sinis, ‘Terus kalau saya nggak ngelakuin, kamu mau apa?’ Sindiran ini merepresentasikan krisis akuntabilitas politik dan hubungan satu arah antara wakil dan rakyat pasca pemilu

Kritik tersebut memunculkan beragam persepsi dari audiens politisi.

“Setelah jadi anggota Dewan, yang diwakili bukan satu orang, tapi satu kabupaten. Jadi tidak benar kalau dibilang lupa rakyat, karena semua kebijakan kita dibuat untuk masyarakat.” (Kuswanto, 21 Juli 2025)

Kuswanto mempersepsikan sindiran itu sebagai bentuk kesalah pahaman publik terhadap ruang lingkup kerja anggota dewan. Ia menilai bahwa tuduhan melupakan rakyat tidak sepenuhnya benar karena tanggung jawab seorang anggota DPR mencakup seluruh wilayah, bukan hanya konstituen tertentu.

“Kalau sudah menjadi anggota Dewan, yang diwakili ini sudah sekabupaten Kediri. Jadi, terlepas dari lupa dan tidak itu tergantung dari orangnya. Senyampang kita bekerja untuk kepentingan masyarakat, ya semuanya tidak ada yang kita lupakan.” (Kuswanto, 21 Juli 2025)

Persepsi ini menunjukkan pandangan yang normatif dan defensif bahwa fungsi representatif dipahami secara administratif, bukan emosional. Kuswanto menilai kritik Bintang Emon bukan sebagai bentuk evaluasi moral, tetapi sebagai ekspresi publik yang belum memahami kompleksitas tanggung jawab politik.

“Setelah dipilih itu tergantung orangnya. Anggota DPRD punya aspirasi (pokir) yang disalurkan setiap tahun. Jadi kalau ada warga belum tersentuh, itu karena harus bergiliran, bukan dilupakan.” (Totok, 19 Juli 2025)

Totok mempersepsikan sindiran Bintang Emon secara lebih realistis dan kontekstual. Ia memahami bahwa hubungan antara politisi dan rakyat tidak selalu bisa berjalan ideal karena keterbatasan sumber daya dan luasnya konstituen.

“Setelah dipilih oleh rakyat itu tergantung. Kalau ngopeni orang banyak tentunya juga keberatan. Berapa sih gaji Dewan, kan terbatas.” (Totok, 19 Juli 2025)

Totok menganggap kritik tersebut sebagai pengingat akan ekspektasi publik yang sering kali tidak sebanding dengan kemampuan representatif politisi. Persepsinya menekankan logika praktis dan administratif, bahwa perhatian terhadap rakyat dilakukan secara bergilir dan melalui mekanisme formal seperti pokok-pokok pikiran (pokir) DPRD.

“Setelah terpilih, mandat anggota DPR meluas untuk semua warga, bukan hanya pendukungnya. Jika perjuangan hanya diberikan kepada kelompok tertentu, maka itu mencederai keadilan sosial.” (Siswanto, 22 Juli 2025)

Ia menilai bahwa melupakan rakyat bukan karena niat mengabaikan, tetapi karena keterbatasan struktural dan kebijakan anggaran.

Sementara itu, Siswanto mempersepsikan sindiran Bintang Emon sebagai refleksi moral atas lemahnya komitmen politik pasca pemilu. Ia memahami pesan humor itu sebagai kritik terhadap politisi yang hanya berpihak kepada kelompok pemilih atau pendukungnya.

“Seorang anggota DPR memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memperjuangkan kepentingan masyarakat secara adil tanpa memandang latar belakang politik atau apakah individu tersebut pernah memilihnya atau tidak.” (Siswanto, 22 Juli 2025)

Bagi Siswanto, sarkasme Bintang Emon tidak sekadar ejekan, tetapi juga seruan agar pejabat publik menegakkan prinsip keadilan sosial dan tidak mengubah mandat rakyat menjadi alat balas jasa politik. Persepsi ini berakar pada kesadaran etis bahwa jabatan publik adalah amanah, bukan milik pribadi atau kelompok.

Dengan demikian, ketiga audiens politisi mempersepsikannya secara berbeda. Kuswanto menyoroti fungsi administratif dan cakupan representasi, Totok menafsirkan dalam kerangka realistik terkait keterbatasan sistem, sedangkan Siswanto memaknainya sebagai peringatan moral terhadap penyimpangan komitmen publik.

- e) 1.00– 1.15: Scene Bintang Emon meroasting dengan double sarkasme DPR lagi rapat suka main game, ternyata itu bukan game melainkan judi online.

Bintang menyampaikan:

“Dah saya mau main game candy crush lagi.”

Pernyataan ini mengandung sindiran ganda terhadap perilaku anggota dewan yang kerap terlihat bermain ponsel bahkan saat rapat, seolah tidak menghargai tanggung jawab publik yang mereka emban. Humor tersebut menjadi kritik sosial terhadap citra wakil rakyat yang dianggap tidak serius menjalankan tugas, dan dalam konteks tertentu, juga menyinggung isu penyalahgunaan waktu dan integritas pejabat publik.

Sindiran ini menimbulkan beragam persepsi dari audiens politisi.

“Kalau anggota Dewan sampai main game saat rapat, itu tidak layak. Sebagai wakil rakyat, kita harus jadi teladan, bukan memperlihatkan perilaku yang salah.” (Kuswanto, 21 Juli 2025)

Kuswanto mempersepsikan kritik tersebut secara etis dan normatif. Ia menilai bahwa tindakan bermain game, apalagi jika dikaitkan dengan isu judi online, merupakan perilaku yang tidak pantas bagi pejabat publik. Ia menyampaikan,

“Itu sudah tidak selayaknya lah jadi anggota Dewan melakukan hal semacam itu. Apalagi kita sebagai wakil rakyat, justru malah kita tidak menjadi contoh, malah jadi teladan yang kurang benar.” (Kuswanto, 21 Juli 2025)

Persepsi Kuswanto berakar pada pandangan moral dan tanggung jawab jabatan. Ia memahami sindiran Bintang Emon bukan sebagai ejekan, tetapi sebagai peringatan agar anggota dewan lebih berhati-hati menjaga sikap di ruang publik. Kritik yang dibungkus humor dipersepsikan sebagai refleksi terhadap perilaku yang bisa merusak wibawa lembaga legislatif.

“Kalau ada anggota DPRD main game saat rapat, berarti dia tidak menghargai rapat itu sendiri. Harus ada sanksinya, tergantung dari kode etik partai dan lembaga.” (Totok, 19 Juli 2025)

Totok mempersepsikan sindiran tersebut sebagai isu kedisiplinan dan profesionalitas. Ia menilai bahwa anggota DPR yang bermain game saat rapat berarti tidak menghargai proses sidang dan melanggar etika kelembagaan.

“Kalau sedang rapat DPRD juga main game, berarti oknum tersebut tidak menghargai rapat. Oleh karena itu harus ada sanksinya sesuai kode etik.” (Totok, 19 Juli 2025)

Bagi Totok, humor Bintang Emon memperlihatkan realitas perilaku oknum, bukan gambaran menyeluruh lembaga. Persepsinya bersifat evaluatif dan sistemik: tindakan individu yang mencoreng citra lembaga perlu ditindak sesuai mekanisme partai dan aturan internal. Dengan demikian, sarkasme komika dipahami sebagai masukan yang mengingatkan pentingnya penegakan disiplin di lingkungan legislatif.

“Sebagai pejabat publik, anggota DPR harus menjaga nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab publik. Kalau justru berperilaku tidak pantas, itu akan merusak kepercayaan rakyat dan citra lembaga legislatif.” (Siswanto, 22 Juli 2025)

Sementara itu, Siswanto mempersepsikan sindiran Bintang Emon secara lebih filosofis dan moral. Ia melihat pesan tersebut sebagai refleksi atas tanggung jawab etis seorang pejabat publik. Menurutnya, anggota DPR tidak hanya bertugas membuat kebijakan, tetapi juga menjadi teladan dalam sikap, ucapan, dan perilaku.

“Sikap, ucapan, dan tindakan seorang anggota DPR harus mencerminkan nilai-nilai keteladanan yang luhur, karena mereka adalah figur panutan di mata masyarakat.” (Siswanto, 22 Juli 2025)

Persepsi Siswanto menunjukkan tingkat kesadaran moral yang tinggi, di mana humor dianggap sebagai media korektif terhadap penyimpangan nilai dan etika publik. Bagi Siswanto, kritik Bintang Emon merupakan bentuk partisipasi sosial masyarakat dalam mengingatkan pejabat agar tetap menjaga integritas dan kepercayaan rakyat.

Dengan demikian ketiga politisi memberikan persepsi yang berbeda. Kuswanto menekankan aspek moral dan keteladanan, Totok menyoroti kedisiplinan dan sanksi etik, sementara Siswanto melihatnya sebagai refleksi terhadap tanggung jawab sosial dan simbolisme pejabat publik.

Ringkasan persepsi politikus terhadap kritik sosial dan sarkasme dapat dilihat pada Tabel 3.4 berikut:

Tabel 3. 4 Persepsi Audiens Politikus terhadap Kritik Sosial dan Sarkasme dalam Stand Up Comedy

No	Nama Responden	Persepsi Terhadap Kritik Sosial	Persepsi terhadap Sarkasme	Makna atau Kesimpulan Persepsi
1.	Totok	Menganggap kritik sosial penting, namun harus disampaikan dengan etika.	Sarkasme dinilai berisiko menimbulkan kesalahpahaman publik.	Komedi sebaiknya tetap pada ranah hiburan, bukan politik.
2.	Siswanto	Menilai kritik sosial dalam komedi bisa memengaruhi opini publik secara berlebihan.	Sarkasme dianggap rawan menimbulkan citra negatif.	Komika perlu batas etika agar kritik tetap konstruktif.

3.	Kuswanto	Melihat kritik sosial sebagai ekspresi demokrasi.	Sarkasme dianggap bagian dari kebebasan berekspresi, selama tidak menyerang personal.	Stand Up Comedy punya potensi jadi sarana dialog publik.
----	----------	---	---	--

Sumber: Olah Data Wawancara Peneliti, 2025.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Persepsi Audiens Terhadap Konten *Stand Up Comedy* Kiky Saputri dan Bintang Emon

Berdasarkan Hasil Analisis Temuan Data di Bab III, baik responden audiens mahasiswa maupun responden politisi sepakat bahwa *Stand Up Comedy* memiliki kekuatan simbolik yang signifikan dalam ruang publik. Bagi audiens, *Stand Up Comedy* dipandang sebagai medium kritik sosial politik yang jujur, segar, dan mudah dipahami sekaligus menjadi ruang aman untuk menyuarakan ketidakpuasan terhadap elite tanpa harus berbicara dalam bahasa formal. Bagi sebagian politisi, meskipun bersifat menyindir dan kadang tajam, *Stand Up Comedy* tetap dianggap sebagai bentuk aspirasi masyarakat yang patut dihargai dalam konteks kebebasan berpendapat. Dengan kata lain, *Stand Up Comedy* berfungsi sebagai jembatan antara ekspresi rakyat dan penguasa yang merupakan bagian dari demokrasi, menghibur sekaligus menyadarkan.

Dengan demikian, menurut para responden, *Stand Up Comedy* bukan sekadar panggung tawa, tetapi sebuah ruang wacana alternatif tempat realitas politik yang

disuarakan secara cerdas, tajam, dan komunikatif. Melalui *Stand Up Comedy*, suara rakyat dapat tersampaikan melalui komika yang memiliki banyak pengaruh massa dengan pembawaan secara humoris di permukaan, tapi serius di dalam. *Stand Up Comedy* dapat menjadi instrumen komunikasi politik yang membongkar hipokrisi, memancing dialog, serta menghidupkan kembali relasi kritis antara rakyat dan wakilnya.

B. Analisis Data

1. Persepsi Audiens Mahasiswa Terhadap Video *Stand Up Comedy* Kiky Saputri

a. Kritik Sosial

Dalam menganalisis temuan penelitian ini, penulis menggunakan landasan teori kritik sosial sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto (2017). Menurutnya, kritik sosial merupakan bentuk respons terhadap berbagai masalah sosial yang timbul akibat ketidaksesuaian antara nilai-nilai ideal dalam masyarakat dengan praktik sosial yang terjadi. Kritik sosial diperlukan ketika fungsi lembaga sosial, birokrasi, atau kekuasaan mengalami penyimpangan sehingga menimbulkan keresahan, ketimpangan, dan ketidakadilan dalam kehidupan masyarakat.

Soekanto mengklasifikasikan masalah sosial ke dalam beberapa bentuk, di antaranya adalah masalah moral, birokrasi, dan politik. Masalah moral muncul ketika terjadi penurunan integritas, seperti hilangnya keteladanan, tidak adanya tanggung jawab, serta perilaku menyimpang dari norma etika oleh tokoh-tokoh publik. Sementara itu, masalah birokrasi timbul ketika sistem pemerintahan atau pelayanan publik tidak dijalankan secara efektif, efisien, dan transparan, sehingga justru menghambat akses dan keadilan bagi masyarakat. Sedangkan masalah politik berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan, lemahnya representasi rakyat, serta dominasi kepentingan kelompok tertentu dalam proses pengambilan keputusan. Dalam konteks ini, kritik sosial berfungsi sebagai sarana kontrol terhadap kekuasaan dan sebagai upaya untuk mendorong perubahan sosial ke arah yang lebih adil.

1) Kritik Sosial Dimensi Moral

Berdasarkan hasil temuan wawancara terhadap para informan dari kalangan mahasiswa, video stand up comedy Kiky Saputri dipandang tidak hanya sebagai hiburan, melainkan sebagai bentuk penyampaian kritik sosial

yang menyentuh aspek moral elite politik. Kritik yang disampaikan Kiky melalui teknik *roasting* dinilai berhasil memperlihatkan wajah asli para pejabat publik yang selama ini dianggap gagal menunjukkan integritas dan keteladanan moral dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat. Mahasiswa menilai bahwa sarkasme dalam materi Kiky tidak hanya lucu, tetapi menyentil kesadaran kolektif masyarakat terhadap krisis moral yang mewabah di tubuh birokrasi dan politik Indonesia.

Dalam perspektif teori kritik sosial moral sebagaimana dikemukakan oleh Soekanto (2017), permasalahan moral muncul ketika terjadi ketidaksesuaian antara nilai-nilai ideal yang diharapkan masyarakat dengan kenyataan yang ditunjukkan oleh aktor sosial, khususnya pejabat publik. Kritik sosial menjadi sah ketika muncul sebagai respons terhadap penyimpangan nilai tersebut, dan berfungsi sebagai alat kontrol untuk menjaga stabilitas sosial. Dalam konteks ini, komedi yang dibawakan oleh Kiky menjadi medium alternatif untuk menyuarakan kekecewaan masyarakat atas perilaku elite yang dianggap tidak layak secara etis.

Sebagian besar mahasiswa yang menjadi informan mengungkapkan bahwa kritik yang dibawakan Kiky telah membuka ruang diskusi moral yang selama ini terpendam. Mereka melihat bahwa banyak pejabat publik yang gagal menunjukkan nasionalisme, tidak menepati janji politik, atau bertindak sembrono dalam hal-hal kecil namun bermuatan etis. Melalui pendekatan humor yang jenaka namun tajam, mahasiswa merasa bahwa kritik moral menjadi lebih mudah diterima, bahkan lebih efektif dibandingkan retorika formal. Kritik moral yang disampaikan secara halus melalui *roasting* dinilai mampu menjangkau audiens yang lebih luas, tanpa harus memicu resistensi atau kemarahan secara langsung.

Selain itu, mahasiswa juga menilai bahwa kritik moral dalam materi Kiky bukan sekadar ditujukan kepada individu tertentu, melainkan sebagai bentuk teguran kepada seluruh sistem kekuasaan yang telah kehilangan arah etika. Mereka memaknai komedi tersebut sebagai refleksi dari keresahan rakyat terhadap elite yang lebih mementingkan citra dan kepentingan pribadi, ketimbang tanggung jawab moral sebagai pelayan publik. Dalam pandangan mereka, kemerosotan moral para pejabat tidak hanya terlihat dari tindakan

besar seperti korupsi, tetapi juga dari hal-hal kecil yang menunjukkan ketidakpedulian terhadap rakyat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa persepsi mahasiswa terhadap video stand-up comedy Kiky Saputri sangat erat kaitannya dengan kritik sosial moral. Humor yang ditampilkan dianggap sebagai bentuk penyadaran terhadap krisis nilai yang tengah dihadapi bangsa ini, khususnya dalam ranah kepemimpinan politik. Kritik moral yang disampaikan secara jenaka justru dirasakan lebih mengena, karena menyentuh sisi kemanusiaan sekaligus intelektual audiens. Dalam hal ini, Kiky Saputri telah menjalankan perannya sebagai bagian dari ruang publik alternatif, di mana kritik sosial dapat disampaikan tanpa harus melalui jalur formal institusional, namun tetap memiliki kekuatan untuk menggugah kesadaran moral masyarakat luas.

2) Kritik Sosial Dimensi Birokrasi

Mahasiswa sebagai audiens dalam tayangan stand-up comedy Kiky Saputri tidak hanya menanggapi secara emosional atau humoris, tetapi juga menunjukkan adanya pemahaman terhadap realitas birokrasi yang dikritik melalui pertunjukan tersebut. Dalam penilaian mereka, banyak pernyataan yang disampaikan oleh Kiky mencerminkan potret nyata birokrasi di Indonesia yang dianggap kaku, tidak efisien, tertutup, dan sering kali menjauh dari rakyat.

Bentuk kritik yang disampaikan Kiky melalui roasting dianggap mahasiswa sebagai sindiran terhadap ketidakhadiran fungsi birokrasi sebagai pelayan masyarakat. Banyak mahasiswa menyatakan bahwa para pejabat dan lembaga negara tidak dikenal atau bahkan tidak dapat dijangkau oleh rakyatnya sendiri, yang menandakan adanya jarak yang terlalu lebar antara penguasa dan publik. Hal ini menunjukkan adanya keterputusan komunikasi antara rakyat dengan birokrasi, di mana idealnya, birokrasi menjadi sarana untuk menyalurkan aspirasi, bukan sekadar sistem administratif yang tertutup.

Berdasarkan teori Soekanto (2017), masalah birokrasi merupakan bentuk dari masalah sosial ketika sistem pemerintahan atau lembaga pelayanan tidak berjalan sesuai fungsinya, melainkan menjadi alat kekuasaan yang lamban, tidak transparan, dan bahkan koruptif. Ketika birokrasi tidak lagi mengutamakan pelayanan publik dan justru menghambat akses

masyarakat terhadap hak-haknya, maka kritik sosial menjadi penting sebagai bentuk koreksi terhadap sistem yang menyimpang tersebut.

Dalam konteks ini, mahasiswa memandang bahwa kritik yang disampaikan Kiky merupakan suara dari keresahan publik terhadap birokrasi yang tidak akuntabel. Mereka menilai bahwa dalam sistem birokrasi yang sehat, pejabat seharusnya dikenal oleh publik karena perannya yang aktif dan keterlibatannya dalam menyelesaikan persoalan rakyat. Namun dalam realitas yang ditampilkan secara satir oleh Kiky, justru banyak pejabat yang namanya pun tidak dikenal oleh masyarakat. Hal ini menunjukkan adanya kemandekan komunikasi yang seharusnya dibangun antara lembaga publik dengan rakyat.

Mahasiswa juga menunjukkan bahwa kritik birokrasi yang disampaikan melalui komedi terasa lebih mudah diterima, karena disampaikan dalam bentuk yang tidak frontal namun tetap tajam. Roasting digunakan sebagai alat untuk mengungkap realitas pahit tentang birokrasi yang pasif, teralienasi, dan jauh dari fungsi idealnya sebagai pelayan publik. Di sinilah letak fungsi kritik sosial dalam bentuk seni pertunjukan seperti stand-up comedy: menjadi jembatan alternatif untuk menyampaikan aspirasi rakyat yang selama ini terhambat oleh sistem birokrasi yang tidak responsif.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa persepsi mahasiswa terhadap tayangan stand-up comedy Kiky Saputri menunjukkan kesadaran kritis terhadap realitas birokrasi Indonesia. Kritik sosial yang disampaikan melalui humor dipahami sebagai representasi dari sistem birokrasi yang gagal menjalankan perannya secara fungsional dan moral. Mahasiswa melihat bahwa roasting dalam pertunjukan ini tidak hanya menyindir individu, tetapi juga membongkar kegagalan struktural birokrasi dalam memberikan pelayanan yang adil, transparan, dan partisipatif bagi masyarakat luas.

3) Kritik Sosial Dimensi Politik

Video stand-up comedy Kiky Saputri juga mendapat tanggapan yang kuat dari mahasiswa karena dinilai menyentuh isu-isu sensitif dalam dunia politik, khususnya terkait perilaku dan fungsi wakil rakyat di lembaga legislatif. Mahasiswa menganggap bahwa kritik yang disampaikan Kiky tidak hanya menyoroti tokoh tertentu, tetapi lebih luas menggambarkan krisis representasi dalam sistem politik yang ada saat ini. Melalui humor dan

sarkasme, Kiky menyuarakan keresahan publik terhadap para politikus yang dinilai tidak menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal.

Sebagian besar mahasiswa menyatakan bahwa apa yang dikritik dalam pertunjukan tersebut mencerminkan kenyataan politik yang tidak berpihak kepada rakyat. Para wakil rakyat dianggap lebih sering hadir dalam kepentingan kekuasaan dan partai, ketimbang benar-benar menjadi perwakilan aspirasi masyarakat. Dalam pandangan mereka, pernyataan-pernyataan satir yang dilontarkan Kiky memperlihatkan betapa jauhnya praktik politik di lapangan dari nilai-nilai demokrasi, keterbukaan, dan keberpihakan terhadap rakyat kecil.

Berdasarkan teori Soekanto (2017), masalah politik dalam konteks kritik sosial muncul ketika kekuasaan digunakan tidak sebagaimana mestinya, dan kebijakan yang dihasilkan justru merugikan kepentingan umum. Masalah ini menjadi perhatian ketika terjadi manipulasi politik, penyalahgunaan kekuasaan, hingga kebijakan yang tidak mewakili suara mayoritas rakyat. Politik yang seharusnya menjadi sarana pengorganisasian masyarakat demi keadilan sosial, malah menjadi sumber keresahan karena dikendalikan oleh kepentingan segelintir elite.

Mahasiswa menangkap bahwa kritik Kiky terhadap para politikus dan institusi DPR merupakan bentuk perlawanan terhadap tatanan politik yang elitis dan tertutup. Kritik tersebut dianggap menyuarakan gagasan bahwa politik semestinya tidak hanya bersifat prosedural, tetapi juga substansial di mana pemimpin harus benar-benar mengemban amanah rakyat, bukan sekadar menjabat sebagai simbol kekuasaan. Mahasiswa memandang bahwa komedi yang dibawakan Kiky membuka ruang alternatif bagi publik untuk mendiskusikan dan mengevaluasi kinerja politikus secara lebih jujur dan terbuka.

Dalam konteks teori kritik sosial yang dikembangkan Habermas, kritik semacam ini menjadi bagian dari ruang publik alternatif yang memungkinkan masyarakat menyuarakan pendapatnya di luar forum formal seperti parlemen atau media arus utama. Roasting yang dilakukan Kiky dianggap sebagai bentuk artikulasi diskursus kritis yang berbasis pada pengalaman nyata masyarakat. Mahasiswa tidak hanya menertawakan lelucon tersebut, tetapi

juga merasa bahwa apa yang disampaikan merupakan cerminan kegelisahan kolektif mereka sebagai warga negara yang menginginkan perubahan.

Dengan demikian, persepsi mahasiswa terhadap video stand-up comedy Kiky Saputri menunjukkan bahwa kritik yang disampaikan dalam tayangan tersebut memiliki kedalaman politis. Kritik tidak berhenti pada personalisasi tokoh, tetapi diarahkan kepada struktur kekuasaan yang dianggap tidak bekerja sebagaimana mestinya. Roasting dalam konteks ini menjadi media kritik sosial yang mampu menyampaikan suara publik secara jenaka namun sarat makna, serta membuka ruang diskusi mengenai krisis politik yang tengah berlangsung.

4) Sarkasme

Dalam konteks kritik sosial-politik, video stand-up comedy Kiky Saputri yang menyoroti perilaku anggota DPR menunjukkan relevansi yang kuat dengan teori sarkasme prefiks sebagaimana dirumuskan oleh Elizabeth Camp. Sarkasme prefiks adalah bentuk sindiran yang menggunakan pernyataan deklaratif yang diawali oleh penanda seperti "seperti...", "kayak...", atau struktur pengantar lain yang memberi sinyal bahwa yang akan disampaikan bukanlah makna literal, melainkan makna tersembunyi yang menyindir atau mengkritik.

Dalam video tersebut, Kiky secara konsisten menggunakan pendekatan ini untuk membangun sarkasme yang cerdas dan menggugah. Contoh-contoh seperti "Saya senang banget bisa tampil di depan DPR... itu keren banget" yang kemudian diikuti dengan pernyataan kontras "malah menjadi musuh rakyat", menunjukkan struktur sarkastik yang diawali dengan nada formal dan penuh pujian, lalu dibelokkan menjadi kritik tajam. Hal ini adalah karakteristik utama dari sarkasme prefiks yang dimulai dari ekspektasi, lalu dibelokkan dengan kenyataan pahit.

Mahasiswa yang menjadi informan dalam penelitian ini menanggapi gaya sarkasme Kiky dengan sangat antusias dan reflektif. Mereka tidak hanya memahami pesan tersirat dalam sindiran tersebut, tetapi juga merasa bahwa humor itu menyuarakan kegelisahan kolektif. Menurut Salsa, gaya sindiran Kiky menyentuh isu representasi politik secara struktural; bagi Dandi, sarkasme itu adalah bentuk realisasi frustrasi masyarakat terhadap DPR;

sementara Rangga melihat sarkasme Kiky sebagai “perlawanan simbolik” terhadap dominasi elit dan lemahnya akuntabilitas publik.

Bentuk sarkasme prefiks dalam video Kiky bukan hanya menghadirkan humor, melainkan menjadi medium komunikasi politik yang menggabungkan ironi dengan kritik moral. Penggunaan frasa-frasa seperti “seperti yang kita tahu...”, “kayak anggota DPR nggak pernah korupsi aja...”, atau pernyataan yang disampaikan dengan nada diplomatis namun disambung dengan kritik sinis, menegaskan bahwa Kiky menyampaikan pesan dengan teknik yang sejalan dengan teori Camp tentang komunikasi tidak langsung. Penonton diajak memahami makna sesungguhnya melalui konteks, nada suara, dan pengetahuan kolektif mereka tentang realitas DPR.

Relevansi sarkasme prefiks dalam video ini juga tampak dari cara mahasiswa merespons yaitu, mereka tidak hanya tertawa, tetapi juga merenung. Teknik ini menjadi alat yang efektif karena memberikan ruang bagi penonton untuk membangun makna secara aktif. Dengan memanfaatkan topeng humor, Kiky berhasil menembus batas formal komunikasi politik yang kaku, dan justru memperluas ruang partisipasi kritik di tengah audiens muda.

Secara keseluruhan, sarkasme prefiks dalam video Kiky Saputri bukan sekadar strategi linguistik, tetapi juga metode untuk membongkar absurditas kekuasaan, menyuarakan ketimpangan, dan mendorong refleksi. Berdasarkan wawancara dengan mahasiswa, dapat disimpulkan bahwa teknik ini tidak hanya dikenali secara teoritik, tetapi juga dirasakan secara emosional dan sosial. Kiky menggunakan bahasa yang akrab namun tajam, menyampaikan kritik dengan cara yang menghibur, namun tetap menyengat. Hal ini menjadikan karyanya relevan tidak hanya sebagai hiburan, tetapi juga sebagai wacana politik alternatif yang efektif.

2. Persepsi Audiens Mahasiswa Terhadap Video *Stand Up Comedy* Bintang Emon

a. Kritik Sosial

1) Kritik Sosial terhadap Masalah Moral

Video stand-up comedy Bintang Emon yang mengangkat isu-isu sosial-politik juga menuai respons yang kuat dari kalangan mahasiswa. Melalui gaya komedi yang cerdas, tajam, dan mengalir, Bintang Emon menyampaikan kritik terhadap berbagai perilaku menyimpang yang dilakukan oleh pejabat

publik, khususnya dalam konteks moralitas individu yang memegang jabatan strategis. Audiens mahasiswa menangkap bahwa komedi yang dibawakan Bintang bukan sekadar bahan tertawaan, tetapi menjadi ruang untuk merefleksikan kondisi moral pejabat publik yang semakin dipertanyakan.

Sebagian besar mahasiswa menyatakan bahwa pesan-pesan yang disampaikan dalam pertunjukan Bintang Emon menyentuh persoalan mendasar dalam kehidupan sosial-politik, yakni melemahnya integritas dan tanggung jawab moral pejabat negara. Dalam pandangan mereka, tindakan pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan, terlibat dalam perilaku tidak etis, atau bersikap tidak sensitif terhadap penderitaan rakyat merupakan bentuk degradasi moral yang tidak bisa lagi ditoleransi. Komedi Bintang Emon memperlihatkan bahwa perilaku menyimpang dari elite kerap dibungkus dalam formalitas jabatan, padahal substansinya bertentangan dengan nilai dan norma masyarakat.

Menurut teori kritik sosial dari Soekanto (2017), masalah moral merupakan salah satu bentuk masalah sosial yang serius, karena berhubungan langsung dengan keretakan nilai-nilai dasar masyarakat. Ketika para pemimpin atau tokoh publik tidak lagi menjadi teladan dalam hal kejujuran, tanggung jawab, dan kepedulian sosial, maka masyarakat akan mengalami krisis kepercayaan yang berujung pada disintegrasi nilai. Dalam konteks ini, kritik sosial menjadi sarana penting untuk menegur penyimpangan moral yang dilakukan oleh aktor-aktor kekuasaan.

Mahasiswa menilai bahwa Bintang Emon berhasil menyampaikan kritik moral dengan cara yang halus namun berdampak. Dalam komentarnya, mereka menyebut bahwa materi stand-up Bintang sering mengangkat isu-isu etika seperti manipulasi, kemunafikan, dan sikap tidak adil, yang kerap dilakukan oleh tokoh publik. Penyampaian yang jenaka, tetapi sarat makna, membuat pesan tersebut dapat diterima dengan baik oleh generasi muda. Hal ini membuktikan bahwa komedi dapat menjadi sarana untuk menyampaikan kritik etis secara efektif, terutama dalam menghadapi kondisi sosial yang penuh ironi.

Lebih dari sekadar hiburan, mahasiswa memandang bahwa komedi yang dibawakan Bintang Emon menciptakan ruang evaluasi kolektif terhadap moralitas dalam pemerintahan. Ketika tindakan yang tidak etis dilakukan oleh

mereka yang seharusnya menjadi panutan, maka rakyat perlu memiliki saluran untuk menyuarakan keresahannya. Dalam hal ini, stand-up comedy menjadi media alternatif untuk membicarakan hal-hal yang sering kali diabaikan oleh media arus utama maupun forum politik formal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa persepsi mahasiswa terhadap tayangan stand-up comedy Bintang Emon menunjukkan kesadaran bahwa kritik sosial terhadap masalah moral tidak harus disampaikan melalui cara-cara serius atau formal. Roasting dan sarkasme yang dibalut dalam humor menjadi strategi efektif untuk mengungkap penyimpangan nilai yang dilakukan oleh elite, serta mengajak masyarakat untuk tidak membiarkan praktik tersebut menjadi kebiasaan. Mahasiswa memandang bahwa kritik semacam ini penting untuk menjaga kewaspadaan kolektif terhadap merosotnya integritas moral dalam kehidupan publik.

2) Kritik Sosial terhadap Masalah Birokrasi

Dalam video stand-up comedy yang dibawakan oleh Bintang Emon, audiens mahasiswa menangkap sejumlah kritik tajam yang ditujukan terhadap sistem birokrasi di Indonesia. Melalui pendekatan yang jenaka namun sarat makna, Bintang Emon berhasil membongkar realitas birokrasi yang sering kali tidak berjalan sebagaimana mestinya. Kritik tersebut tidak diarahkan pada satu instansi tertentu, melainkan menggambarkan gambaran umum tentang sistem pemerintahan yang lambat, tidak responsif, dan kurang memihak pada kepentingan masyarakat.

Mahasiswa menilai bahwa materi yang disampaikan Bintang merepresentasikan kekecewaan masyarakat terhadap birokrasi yang justru menjadi penghambat dalam memperoleh layanan publik yang layak. Dalam tanggapan mereka, birokrasi tidak jarang dianggap mempersulit proses, baik dalam hal administratif, penyaluran bantuan, maupun pengaduan masyarakat. Kritik yang disampaikan melalui humor oleh Bintang dinilai sebagai bentuk perlawanan terhadap birokrasi yang terlalu prosedural, tidak efisien, dan sering kali bersifat eksklusif bagi mereka yang memiliki akses atau kedekatan kekuasaan.

Berdasarkan teori kritik sosial dari Soekanto (2017), masalah birokrasi menjadi masalah sosial ketika sistem administrasi negara tidak lagi berpihak pada rakyat, melainkan menjadi sarana mempertahankan kekuasaan dan

status quo. Ketika birokrasi dipenuhi praktik KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme), serta tidak berorientasi pada pelayanan, maka masyarakat akan kehilangan kepercayaan terhadap institusi publik. Dalam konteks ini, kritik sosial melalui media populer seperti stand-up comedy menjadi penting sebagai kontrol sosial yang muncul dari bawah.

Mahasiswa memahami bahwa kritik Bintang terhadap birokrasi bukan hanya mengenai lambannya pelayanan publik, tetapi juga menyangkut persoalan transparansi dan akuntabilitas. Dalam berbagai bagian materi komedinya, Bintang kerap menyentil bagaimana pejabat publik seolah lebih sibuk membangun citra di media sosial ketimbang bekerja menyelesaikan persoalan masyarakat. Hal ini ditangkap mahasiswa sebagai bentuk kegagalan birokrasi dalam menjalankan fungsinya secara substantif, bukan sekadar formalitas administratif.

Mahasiswa juga mencermati bahwa kritik terhadap birokrasi yang dibawakan Bintang mencerminkan adanya ketimpangan dalam akses layanan negara. Mereka melihat bahwa rakyat kecil sering kali kesulitan dalam mengakses hak-haknya, sementara mereka yang memiliki kekuasaan atau koneksi justru dapat memanipulasi sistem. Melalui roasting yang dilakukan Bintang, mahasiswa menyadari bahwa birokrasi yang tidak adil adalah masalah struktural yang perlu dibenahi, bukan hanya dipermasalahan secara kasuistik.

Dengan demikian, persepsi mahasiswa terhadap tayangan stand-up comedy Bintang Emon menunjukkan bahwa mereka memahami adanya kritik sosial yang kuat terhadap kegagalan sistem birokrasi. Melalui komedi, Bintang menyuarakan pengalaman sehari-hari masyarakat dalam berhadapan dengan sistem yang lamban, tidak peka, dan sering kali tidak adil. Roasting digunakan sebagai alat untuk memperlihatkan bahwa perubahan tidak bisa dilakukan hanya dari atas, tetapi juga memerlukan suara dan kesadaran dari publik. Dalam hal ini, stand-up comedy menjadi ruang alternatif yang efektif untuk menyampaikan kritik birokrasi secara cerdas dan menyentuh.

3) Kritik Sosial terhadap Masalah Politik

Dalam tayangan stand-up comedy-nya, Bintang Emon menyampaikan kritik sosial yang kuat terhadap dinamika politik di Indonesia. Melalui gaya khas yang satir dan reflektif, ia menyuarakan berbagai keresahan masyarakat

mengenai penyalahgunaan kekuasaan, lemahnya representasi politik, serta ketimpangan antara elite politik dan rakyat. Audiens mahasiswa yang menyaksikan video tersebut menangkap bahwa materi komedi Bintang bukan sekadar hiburan, tetapi sarat dengan muatan kritik terhadap sistem politik yang dinilai tidak lagi berpihak pada kepentingan publik.

Mahasiswa melihat bahwa Bintang secara konsisten menyoroti kegagalan para pemegang kekuasaan dalam menjalankan peran mereka sebagai wakil rakyat. Dalam pandangan mereka, banyak pejabat politik lebih sibuk menjaga citra dan kepentingan pribadi daripada menjalankan tugas konstitusional untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat. Hal ini menggambarkan kegagalan dalam fungsi representasi politik, di mana rakyat merasa tidak lagi terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan mereka.

Dalam kerangka teori kritik sosial, Soekanto (2017) menyebutkan bahwa masalah politik merupakan bentuk masalah sosial ketika kekuasaan tidak dijalankan secara adil, transparan, dan partisipatif. Ketika sistem politik dikuasai oleh segelintir elite yang hanya mengedepankan kepentingan kelompok, maka kepercayaan publik akan melemah, dan proses demokrasi kehilangan makna substantif. Dalam konteks ini, kritik sosial menjadi instrumen untuk menegur dan menata ulang arah politik yang menyimpang dari prinsip keadilan dan keberpihakan.

Mahasiswa merespons bahwa gaya penyampaian Bintang yang ringan namun kritis memungkinkan mereka merenungkan situasi politik dengan cara yang tidak menggurui. Mereka menyadari bahwa banyak realitas yang selama ini sulit dibahas secara terbuka seperti manipulasi opini publik, ketidakhadiran pejabat dalam isu penting, dan lemahnya tanggung jawab politik justru berhasil diangkat melalui komedi. Kritik tersebut tidak hanya menampilkan kegagalan individu, tetapi juga menunjuk pada lemahnya sistem politik yang memungkinkan penyimpangan itu terus terjadi.

Mahasiswa juga memaknai bahwa Bintang Emon berhasil membangun ruang diskusi alternatif yang membongkar ilusi formalitas dalam politik. Komedi yang ia tampilkan merepresentasikan suara publik yang selama ini sulit tersalurkan dalam forum formal, baik karena represi maupun karena ketidakpercayaan terhadap mekanisme politik yang ada. Dalam hal ini,

mahasiswa menilai bahwa stand-up comedy bukan sekadar sarana hiburan, melainkan media reflektif yang membuka kesadaran kritis tentang hubungan antara rakyat dan kekuasaan.

Dengan demikian, persepsi mahasiswa terhadap tayangan stand-up comedy Bintang Emon menunjukkan bahwa mereka memahami esensi dari kritik politik yang dibawakan melalui komedi. Kritik yang disampaikan tidak hanya menggambarkan fenomena permukaan, tetapi mengarah pada kegagalan struktural dalam sistem politik yang selama ini cenderung tertutup dan elitis. Roasting yang digunakan oleh Bintang menjadi alat untuk menyoroti bahwa politik seharusnya menjadi arena perjuangan rakyat, bukan panggung bagi aktor-aktor kekuasaan yang melupakan tanggung jawab sosialnya. Dalam konteks ini, mahasiswa melihat bahwa komedi memiliki fungsi strategis sebagai media kritik sosial yang mendorong pemulihan demokrasi yang lebih partisipatif dan bermoral.

4) Sarkasme

Video roasting yang dibawakan oleh komika Bintang Emon terhadap perilaku wakil rakyat secara umum menunjukkan kesesuaian yang erat dengan bentuk sarkasme proposisi sebagaimana dikemukakan oleh Elizabeth Camp. Dalam teori ini, sarkasme proposisi merujuk pada bentuk sindiran yang terdapat pada tingkat isi pernyataan (proposisi), di mana makna literal dari pernyataan secara sadar bertentangan dengan makna yang sebenarnya ingin disampaikan. Bintang Emon dalam pertunjukannya kerap menyampaikan pernyataan yang terdengar mendukung atau netral secara literal, namun justru dimaksudkan untuk menyindir dan membongkar ironi dari perilaku elite legislatif. Misalnya, kalimat seperti, *“Saya nggak pusing jadi anggota dewan, selama saya nggak aneh-aneh, kemungkinan dipecat itu zero”* merupakan bentuk tipikal sarkasme proposisi yang secara literal kalimat tersebut terdengar santai dan afirmatif, tetapi makna sebenarnya adalah kritik tajam terhadap DPR yang permisif terhadap ketidakaktifan anggotanya, selama tidak mencolok secara negatif.

Para mahasiswa yang menjadi informan dalam penelitian ini menangkap bentuk sarkasme tersebut sebagai kritik mendalam yang disampaikan dalam bungkus humor. Menurut Salsa, sarkasme Bintang menggambarkan kegagalan etik dan profesional anggota DPR, yang hadir

secara fisik namun absen secara tanggung jawab. Dandi bahkan menyebut bahwa frasa-frasa seperti “kerja DPR tidak pakai KPI” adalah “sindiran pintar” yang mewakili keresahan masyarakat pekerja yang sehari-hari dibebani target kerja, sedangkan DPR tidak dinilai dari performa kerjanya. Ninda dan Rangga menambahkan bahwa ironi dalam pernyataan Bintang membongkar kenyataan pahit bahwa sistem kerja legislatif justru tidak transparan dan sulit diawasi publik.

Bentuk sarkasme proposisi dalam video Bintang Emon berjalan melalui pola yang konsisten: pernyataan bernada wajar atau bahkan positif, namun dalam konteks sosial dan politik Indonesia, justru menyiratkan tuduhan. Misalnya, saat ia menyebut “*CS saya juga rakyat*” dalam konteks pembenaran DPR soal “membuat aturan untuk rakyat”, ia sebenarnya membongkar praktik manipulasi retorika bahwa yang disebut ‘rakyat’ oleh elite sering kali hanyalah keluarga atau kolega mereka sendiri.

Mahasiswa menilai bahwa teknik ini berhasil menyampaikan kritik tanpa perlu menyebut pihak secara eksplisit, namun tetap efektif menumbuhkan kesadaran kritis. Lugas, salah satu informan, menyebut bahwa sarkasme proposisional Bintang adalah “*medium ideologis*” yang mampu menyingkap pengaburan makna dalam politik kontemporer. Dengan memanfaatkan bentuk literal sebagai tameng, namun membalikkan makna melalui konteks, Bintang menunjukkan bahwa komedi bisa menjadi alat pembongkaran wacana kekuasaan.

3. Persepsi Audiens Politisi Terhadap Video *Stand Up Comedy* Kiky Saputri

a. Kritik Sosial

1) Kritik Sosial Dimensi Moral

Analisis persepsi audiens terhadap video *Stand Up Comedy* yang dibawakan oleh Kiky Saputri dilakukan dengan mengaitkan bentuk kritik sosial yang terkandung di dalamnya dengan teori kritik moral menurut Soekanto (2017). Kritik sosial dalam bentuk sarkasme dan humor satiris yang digunakan oleh Kiky ditujukan pada perilaku anggota legislatif yang dianggap tidak sejalan dengan harapan dan nilai-nilai moral masyarakat. Dalam hal ini, video *Stand Up Comedy* tersebut menjadi media ekspresi publik terhadap ketimpangan etika dan kegagalan fungsi pejabat publik dalam menjalankan perannya sebagai wakil rakyat.

Berdasarkan teori Soekanto, salah satu bentuk masalah sosial yang mendasari kritik moral adalah masalah moralitas, yang berkaitan dengan merosotnya standar etika dan kurangnya keteladanan dari para pemimpin. Hal ini tercermin dalam sindiran Kiky terhadap anggota DPR yang lupa lagu kebangsaan, lupa bayar makan, atau memberi alasan defensif atas kegagalannya. Para informan dari kalangan politisi menanggapi dengan berbagai cara mulai dari pembelaan terhadap oknum, penjelasan struktural, hingga tanggapan reflektif tentang pentingnya integritas moral dan kesadaran etis dalam menjalankan tugas kenegaraan.

Sebagian besar informan menyadari bahwa terdapat ketidaksesuaian antara idealisme sebagai wakil rakyat dengan kenyataan yang ditampilkan dalam kritik. Misalnya, sindiran bahwa DPR tidak memiliki Key Performance Indicator (KPI) menjadi refleksi terhadap lemahnya sistem akuntabilitas dalam birokrasi legislatif. Para politisi menanggapi dengan menyebut mekanisme kerja dan pengawasan yang ada, namun tidak menampik bahwa kritik tersebut menggambarkan keresahan masyarakat yang sesungguhnya.

Informan memaknai kritik tersebut sebagai bentuk masukan yang sah dalam sistem demokrasi. Beberapa politisi bahkan mengakui bahwa kritik yang disampaikan Kiky melalui komedi merupakan pengingat moral yang efektif. Kritik moral menurut Soekanto tidak hanya mengarah pada perilaku individu yang menyimpang, tetapi juga pada sistem yang gagal menyediakan mekanisme untuk menjaga etika, akuntabilitas, dan tanggung jawab sosial. Dalam konteks ini, kritik dalam video *Stand Up Comedy* Kiky Saputri dipahami sebagai refleksi dari masyarakat terhadap masalah moral, birokrasi, dan politik yang telah mengalami degradasi nilai.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa persepsi audiens politisi terhadap video *Stand Up Comedy* Kiky Saputri menggambarkan bahwa kritik sosial melalui humor dapat menyentuh lapisan-lapisan terdalam dalam sistem kekuasaan. Humor yang digunakan tidak hanya menghibur, tetapi juga membuka ruang refleksi, menyoroti penyimpangan moral, serta membangkitkan kesadaran kolektif akan pentingnya integritas dalam kepemimpinan. Kritik moral yang disampaikan melalui *Stand Up Comedy* menjadi representasi dari kegelisahan publik terhadap para pemimpin yang

dianggap tidak lagi menjadi panutan, dan dengan demikian berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang kuat dan relevan di era demokrasi saat ini.

2) Kritik Sosial Dimensi Birokrasi

Dalam konteks teori kritik sosial yang dikemukakan oleh Soekanto (2017), masalah birokrasi menjadi salah satu sumber ketidakpuasan publik terhadap institusi negara. Masalah birokrasi tidak hanya mencakup ketidakefisienan administrasi, tetapi juga praktik korupsi, penyalahgunaan kewenangan, dan rendahnya kualitas pelayanan publik. Dalam video *Stand Up Comedy* yang dibawakan oleh Kiky Saputri, kritik terhadap birokrasi legislatif tersirat dalam berbagai sindiran, mulai dari ketidakhadiran anggota dewan di lapangan, lemahnya pengawasan, hingga budaya defensif yang menjadikan alasan sebagai tameng dari kegagalan kerja.

Para politisi menyadari bahwa kritik Kiky menyentil langsung praktik kerja DPR yang dianggap lamban, kurang transparan, dan jauh dari aspirasi rakyat. Humor tentang “anggota DPR banyak alasan” atau “komunikasi lewat WA saja sudah cukup” menyoroti realitas birokrasi legislatif yang terlalu berjarak dengan konstituen. Dalam hal ini, kritik Kiky tidak lagi bersifat personal, melainkan menysasar sistem kelembagaan yang selama ini gagal menjalankan fungsinya secara maksimal.

Para informan menanggapi sindiran tersebut dengan memberikan klarifikasi atas mekanisme kerja birokrasi legislatif, seperti adanya reses, pokok-pokok pikiran (pokir), atau komunikasi melalui media digital. Namun demikian, penjelasan tersebut justru memperkuat kritik bahwa birokrasi kerap tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat karena terlalu terfokus pada prosedur, bukan pada hasil yang nyata. Hal ini sesuai dengan kritik sosial terhadap birokrasi versi Soekanto, yaitu ketika lembaga birokratik kehilangan nilai substansial dalam menjalankan peran pelayan publik, dan lebih menonjolkan formalitas yang tidak produktif.

Pada tahap interpretasi, para politisi menunjukkan beragam sikap. Beberapa mencoba mempertahankan citra lembaga dengan menyatakan bahwa kritik tidak mencerminkan keseluruhan DPR, sementara yang lain, seperti Siswanto, secara terbuka mengakui pentingnya keterlibatan langsung dan integritas dalam menjalankan fungsi sebagai anggota dewan. Dalam konteks ini, kritik sosial dalam video Kiky berfungsi untuk mengungkap

distorsi dalam birokrasi, yaitu ketika kekuasaan tidak lagi dijalankan untuk kepentingan rakyat, melainkan untuk kenyamanan individu atau kelompok.

Kritik terhadap birokrasi juga tampak dalam sindiran mengenai gaji yang tetap berjalan meskipun anggota DPR tidak menunjukkan kinerja yang terukur. Dalam masyarakat birokratis ideal, indikator kinerja seharusnya menjadi acuan utama dalam mengukur keberhasilan pejabat publik. Namun kenyataan bahwa sistem legislasi tidak memiliki tolok ukur performa yang ketat menunjukkan adanya disfungsi dalam tata kelola birokrasi legislatif. Kritik ini menggarisbawahi pentingnya reformasi kelembagaan agar birokrasi tidak hanya menjadi simbol kekuasaan, tetapi juga alat pelayanan rakyat yang sesungguhnya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kritik sosial yang muncul dalam *Stand Up Comedy* Kiky Saputri merepresentasikan bentuk perlawanan simbolik terhadap birokrasi yang stagnan dan tidak adaptif. Para politisi sebagai audiens menyadari bahwa bentuk kritik seperti ini merupakan ekspresi dari keresahan masyarakat terhadap pelayanan publik yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Humor dalam konteks ini menjadi sarana untuk memperjelas kebuntuan birokrasi, dan pada saat yang sama membuka ruang refleksi tentang perlunya perubahan struktural yang lebih transparan, akuntabel, dan berpihak pada rakyat.

3) Kritik Sosial Dimensi Politik

Dalam perspektif teori kritik sosial yang dikemukakan oleh Soekanto (2017), masalah politik merupakan salah satu bentuk permasalahan sosial yang muncul ketika sistem kekuasaan tidak lagi berjalan berdasarkan prinsip keadilan dan demokrasi. Masalah ini dapat mencakup praktik politik uang, lemahnya akuntabilitas, manipulasi kekuasaan, serta pengabaian terhadap kepentingan rakyat. Melalui video *Stand Up Comedy*-nya, Kiky Saputri menyampaikan kritik terhadap realitas politik tersebut melalui sindiran yang lugas namun tetap menghibur. Kritik yang ia bangun menyasar perilaku dan mentalitas wakil rakyat yang kerap kali berjarak dari janji-janji kampanye dan fungsi representatif mereka.

Pada tahap sensasi, para politisi sebagai audiens menangkap isi sindiran Kiky yang mengarah pada kritik terhadap praktik politik yang manipulatif. Kalimat seperti “perut sendiri aja lupa, apalagi perut rakyat” atau “terus kalau

saya gak ngelakuin, kamu mau apa?” secara tidak langsung menyingkap wajah asli politik kekuasaan yang bersandar pada retorika, namun minim aksi nyata. Kritik tersebut menunjukkan bahwa setelah terpilih, banyak anggota DPR seolah merasa tidak memiliki kewajiban moral terhadap konstituennya. Hal ini menjadi gambaran dari bentuk masalah politik, yaitu ketika hubungan antara rakyat dan wakilnya berubah dari hubungan representatif menjadi hubungan dominatif.

Para politisi merespons secara bervariasi. Beberapa membela dengan mengatakan bahwa semua anggota dewan tidak bisa disamaratakan, dan bahwa tugas DPR dijalankan sesuai mekanisme formal seperti reses, pikir, dan fungsi pengawasan. Namun, sebagian lain seperti Siswanto mengakui bahwa sering kali terjadi penyimpangan dalam pelaksanaan mandat politik, di mana fokus pelayanan hanya diberikan kepada kelompok pemilih tertentu, bukan seluruh masyarakat. Pernyataan ini menunjukkan adanya refleksi terhadap krisis representasi politik yang selama ini dikeluhkan oleh masyarakat.

Sindiran Kiky tentang politisi yang hanya aktif saat kampanye lalu menghilang setelah terpilih, menjadi bentuk kritik terhadap minimnya akuntabilitas dalam praktik politik. Kritik ini mengungkap lemahnya hubungan dua arah antara pemilih dan yang dipilih, serta menggambarkan bahwa demokrasi yang tidak dibarengi dengan kontrol dan kesadaran etis hanya akan melahirkan politisi oportunis. Dalam hal ini, *Stand Up Comedy* menjadi ruang diskursus yang mampu menyampaikan pesan politik secara lebih inklusif, menarik perhatian publik tanpa menggurui, dan membuka ruang refleksi yang jujur di kalangan elit.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa persepsi audiens politisi terhadap video *Stand Up Comedy* Kiky Saputri dalam konteks masalah politik mencerminkan adanya kesadaran bahwa praktik politik di Indonesia masih menyimpan banyak persoalan mendasar. Kritik sosial yang dikemas secara humoris terbukti mampu mengungkap persoalan relasi kuasa, akuntabilitas politik, dan krisis representasi yang menjadi keresahan publik. Humor menjadi senjata yang efektif untuk menembus formalitas politik, dan menjadikan *Stand Up Comedy* sebagai ruang publik alternatif tempat suara rakyat dapat disampaikan secara terbuka. Kritik dalam bentuk ini bukan

sekadar hiburan, tetapi menjadi peringatan bahwa politik tanpa etika adalah sumber dari ketidakadilan dan ketimpangan sosial yang terus berulang.

4. Persepsi Audiens Politisi Terhadap Video Bintang Emon

a. Kritik Sosial

1) Kritik Sosial Dimensi Moral

Dalam teori kritik sosial yang dikemukakan oleh Soekanto (2017), masalah moral merupakan salah satu bentuk ketidakharmonisan sosial yang timbul akibat menurunnya standar etika, penyalahgunaan kekuasaan, serta hilangnya keteladanan dari para pemimpin. Bintang Emon, melalui video *Stand Up Comedy*-nya, menyampaikan kritik tajam terhadap fenomena ini dengan cara yang jenaka namun penuh makna. Roasting yang ia tampilkan menggambarkan kegelisahan masyarakat terhadap perilaku pejabat publik yang kerap bertindak tidak etis, tidak bertanggung jawab, dan cenderung menghindari kritik.

Para informan politisi secara sadar menangkap bentuk sindiran yang dilontarkan oleh Bintang, khususnya pada hal-hal yang berkaitan dengan perilaku pribadi anggota legislatif yang mencerminkan lemahnya kontrol moral. Kritik terhadap pejabat yang lupa membayar makanan, bermain game saat rapat, hingga bersikap sinis terhadap tanggung jawab sebagai wakil rakyat menunjukkan adanya kemerosotan nilai integritas dalam tubuh lembaga legislatif. Bintang menyampaikan bahwa ketika seorang pejabat publik tidak mampu bertanggung jawab atas hal kecil, seperti urusan pribadi, maka mustahil ia bisa dipercaya untuk mengurus urusan rakyat yang lebih besar. Hal ini sejalan dengan pemikiran Soekanto bahwa masalah moral sering kali memicu kegagalan sosial secara lebih luas.

Beberapa politisi mencoba menormalisasi tindakan yang dikritik, seperti menyebut lupa sebagai hal manusiawi. Namun, sebagian lain, seperti Siswanto, memberikan respons reflektif dengan menegaskan bahwa pejabat publik tidak bisa memisahkan perilaku pribadi dari tanggung jawab publiknya. Dalam pandangan ini, kritik Bintang menjadi pengingat bahwa jabatan politik bukan hanya soal wewenang, melainkan juga menyangkut tanggung jawab moral untuk menjadi teladan bagi masyarakat.

Masalah moral yang dikritisi oleh Bintang juga menyentuh aspek kepemimpinan yang transaksional, di mana janji kampanye tidak ditepati, dan

hubungan antara rakyat dengan wakilnya berubah menjadi relasi yang penuh manipulasi. Kalimat “kalau saya nggak ngelakuin, kamu mau apa?” menggambarkan bentuk arogansi kekuasaan yang lahir dari hilangnya rasa tanggung jawab moral. Dalam teori Soekanto, kondisi seperti ini adalah bentuk krisis moral yang berbahaya karena mengikis legitimasi lembaga negara dan merusak harmoni sosial dalam jangka panjang.

Dengan demikian, persepsi politisi terhadap video *Stand Up Comedy* Bintang Emon menunjukkan bahwa humor yang dikemas dengan kritik moral mampu mengangkat kembali kesadaran akan pentingnya etika dalam kepemimpinan publik. Para informan menyadari bahwa di balik tawa, terdapat pesan yang menegur cara mereka memaknai jabatan dan tanggung jawab sosial. Kritik sosial yang disampaikan Bintang bukan sekadar sindiran, melainkan bentuk kontrol sosial terhadap kemerosotan moral yang terjadi dalam dunia politik. Ketika sindiran tentang lupa bayar makan, main game saat rapat, atau perilaku defensif menjadi cermin dari realitas, maka humor tidak lagi menjadi pelengkap, tetapi menjadi pusat dari diskursus etika yang harus diperhatikan oleh para pemegang kekuasaan.

2) Kritik Sosial Dimensi Birokrasi

Dalam teori kritik sosial menurut Soekanto (2017), masalah birokrasi merupakan salah satu bentuk kegagalan sosial yang muncul akibat ketidakefisienan sistem pemerintahan, praktik korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, dan buruknya pelayanan publik. Birokrasi yang seharusnya menjadi alat negara untuk melayani rakyat, justru seringkali berubah menjadi institusi yang lamban, tertutup, dan jauh dari kepentingan masyarakat. Hal ini menjadi sorotan dalam video *Stand Up Comedy* yang dibawakan oleh Bintang Emon, yang dengan gaya khasnya menyindir berbagai praktik birokrasi dalam tubuh lembaga legislatif.

Audiens politisi secara sadar menerima sindiran tajam yang disampaikan Bintang, terutama saat ia mempertanyakan absennya sistem evaluasi kinerja di DPR, menyamakan lembaga negara dengan kantor aneh yang gajinya tetap cair meski pegawainya tidak hadir. Humor ini membuka realitas bahwa birokrasi legislatif, yang idealnya transparan dan akuntabel, justru berjalan tanpa tolok ukur yang jelas. Dalam perspektif kritik sosial, ini

menggambarkan sebuah sistem birokrasi yang mengalami stagnasi dan kehilangan orientasi pelayanan publik.

Para politisi memberikan klarifikasi terkait struktur gaji dan tunjangan, menjelaskan bahwa meskipun gaji pokok tetap berjalan, beberapa insentif berbasis kegiatan tidak diberikan jika tidak hadir. Namun penjelasan ini justru menguatkan kritik Bintang, bahwa tidak adanya sistem Key Performance Indicator (KPI) yang konkret menjadikan lembaga legislatif cenderung imun terhadap pengawasan kinerja. Birokrasi seperti ini menurut Soekanto adalah cerminan kegagalan sistem untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan masyarakat yang semakin kritis.

Sebagian politisi menunjukkan sikap reflektif terhadap kelemahan birokrasi legislatif. Siswanto, misalnya, menekankan pentingnya kehadiran anggota DPR bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara substantif sebagai agen perubahan. Dalam pandangan ini, kritik Bintang dianggap sah karena menunjukkan ketimpangan antara struktur formal lembaga dan kenyataan di lapangan. Kritik sosial yang dibawa melalui humor menjadi mekanisme kontrol terhadap praktik birokrasi yang tidak transparan dan tidak adaptif terhadap kebutuhan rakyat.

Sindiran Bintang tentang anggota DPR yang bermain game saat rapat atau memberi alasan berulang untuk menutupi kegagalan, juga menjadi simbol dari buruknya etos kerja dalam sistem birokrasi. Tindakan seperti itu bukan sekadar persoalan personal, melainkan mencerminkan lemahnya disiplin kelembagaan. Menurut Soekanto, birokrasi yang tidak berjalan secara fungsional akan menghambat pencapaian tujuan kolektif masyarakat, serta menciptakan jarak antara lembaga negara dan rakyat yang seharusnya dilayani.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa video *Stand Up Comedy* Bintang Emon mampu menggambarkan secara tajam dan jenaka bagaimana struktur birokrasi dalam lembaga legislatif mengalami disfungsi. Persepsi audiens politisi menunjukkan adanya pengakuan, baik secara defensif maupun reflektif, terhadap kritik tersebut. *Stand Up Comedy* menjadi medium alternatif yang efektif dalam menyuarakan kegelisahan publik terhadap sistem birokrasi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Humor bukan lagi sekadar hiburan, melainkan alat komunikasi sosial yang membongkar realitas

kekuasaan yang tertutup, dan mengingatkan pentingnya reformasi birokrasi demi keadilan dan kesejahteraan masyarakat.

3) Kritik Sosial Dimensi Politik

Menurut Soekanto (2017), masalah politik muncul ketika sistem kekuasaan tidak berjalan sesuai dengan prinsip keadilan dan demokrasi. Hal ini bisa terlihat dari praktik politik uang, manipulasi kekuasaan, kebijakan yang tidak berpihak pada rakyat, serta krisis representasi dalam lembaga-lembaga negara. Dalam konteks tersebut, Bintang Emon, melalui video *Stand Up Comedy*-nya, menyampaikan kritik sosial terhadap realitas politik Indonesia yang sarat dengan ketimpangan, jarak antara wakil rakyat dan masyarakat, serta lemahnya akuntabilitas setelah pemilu.

Respon dari para politisi memperlihatkan dua kecenderungan. Di satu sisi, terdapat pembelaan yang menyatakan bahwa pelayanan dilakukan secara bergilir atau berdasarkan pokok-pokok pikiran (pokir). Namun di sisi lain, seperti dalam pernyataan Siswanto, disampaikan secara eksplisit bahwa jika seorang politisi hanya memperjuangkan kelompok pemilihnya, maka jabatan tersebut telah disalahgunakan untuk kepentingan balas jasa politik. Hal ini mencerminkan kegagalan dalam menjalankan prinsip keadilan sosial dan demokrasi yang inklusif, sebagaimana dijelaskan Soekanto sebagai ciri utama dari masalah politik.

Para informan menunjukkan pemahaman bahwa kritik Bintang Emon menasar langsung pada wajah politisi yang sering kali hanya hadir saat kampanye dan menghilang setelahnya. Bintang menggambarkan situasi ini melalui satire, di mana wakil rakyat mengklaim mewakili semua orang, termasuk elit dan kolega bisnisnya, sambil mengenakan gelang fast track yaitu sebuah simbol dari akses istimewa dan praktik eksklusif dalam pengambilan keputusan politik. Kritik ini menyentil praktik nepotisme dan kolusi yang menyusupi proses legislasi, di mana rakyat dijadikan simbol, tapi bukan prioritas.

Sindiran lainnya, seperti kritik terhadap gaya kerja anggota DPR yang tidak berbasis indikator kinerja (KPI), turut memperlihatkan bagaimana sistem politik dijalankan tanpa ukuran yang jelas terhadap keberhasilan atau kegagalan. Hal ini menegaskan adanya krisis akuntabilitas dalam lembaga legislatif, yang merupakan bagian dari masalah politik struktural sebagaimana

dijelaskan dalam teori kritik sosial. Bintang mengemas pesan tersebut secara satiris dengan membandingkan DPR dan “kantor biasa”, untuk menunjukkan bahwa ruang kekuasaan publik justru bebas dari mekanisme kontrol yang berlaku di ruang kerja masyarakat umum.

Ketika Bintang mengangkat isu tentang pejabat yang ikut arus saja supaya aman atau tidak berani bersikap kritis karena takut dipecat, ia sedang menyampaikan kritik terhadap mentalitas politik yang oportunis. Ini menggambarkan bagaimana politik menjadi ruang kompromi moral, bukan lagi arena perjuangan ideologis dan representasi kepentingan rakyat. Dalam pandangan Soekanto, hal semacam ini mengindikasikan adanya disfungsi dalam sistem politik yang menyebabkan distorsi arah kebijakan publik dan tergerusnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.

Dengan demikian, persepsi politisi terhadap video *Stand Up Comedy* Bintang Emon dalam konteks masalah politik memperlihatkan adanya pengakuan tersirat bahwa banyak kritik yang disampaikan memang mencerminkan realitas politik hari ini. Meski sebagian tanggapan bersifat defensif, namun sebagian lainnya menyampaikan bahwa kritik tersebut adalah bentuk ekspresi rakyat yang sah dan perlu diperhatikan. *Stand Up Comedy*, dalam hal ini, berfungsi sebagai cermin sosial yang memperlihatkan kegagalan-kegagalan dalam praktik demokrasi dan representasi politik. Melalui sindiran dan satire, Bintang Emon tidak hanya menghibur, tetapi juga menggugat struktur kekuasaan yang abai terhadap prinsip keadilan, keterwakilan, dan tanggung jawab publik.

C. Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi audiens terhadap penggunaan teknik roasting dalam *Stand Up Comedy* yang dibawakan oleh Kiky Saputri dan Bintang Emon sebagai bentuk kritik sosial dan sarkasme terhadap politikus. Pada bagian ini, hasil penelitian yang telah diperoleh akan dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu guna menyoroti adanya relevansi, perbedaan penelitian, serta pembaharuan dalam penelitian ini.

Pertama, penelitian Muhammad Rivaldi (2025) tentang “*Stand Up Comedy* Sebagai Alat Kritik Sosial dan Budaya di Negara Indonesia (Studi Kasus Pandji Pragiwaksono)” menunjukkan bahwa *Stand Up Comedy* yang dibawakan Pndji

Pragiwaksono efektif sebagai media kritik sosial dan budaya. Melalui humor yang cerdas dan sarkastik, Pandji menyuarakan isu-isu sensitif seperti intoleransi dan stereotip, sekaligus mendorong audiens berpikir kritis. Gaya komunikasi yang diberikan dapat menciptakan ruang aman untuk refleksi dan dialog di tengah tantangan keberagaman di Indonesia. Penelitian ini memiliki kesamaan fungsi *Stand Up Comedy* sebagai alat untuk menyampaikan kritik sosial dan politik. Teknik roasting yang disampaikan melalui humor sarkasme dinilai efektif dalam menyampaikan isu sensitif. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini mencakup objek dan pendekatan audiens. Muhammad Rivaldi berfokus pada satu komika (Pandji Pragiwaksono) dan pendekatan yang dilakukan melalui analisis respons audiens secara umum melalui komentar dan tawa pada video pertunjukkan yang sedang berlangsung, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada dua komika (Kiky Saputri dan Bintang Emon) dan pendekatan yang diperoleh melalui wawancara langsung kepada audiens dan politisi yang menjadi objek kritik.

Kedua, penelitian Augustinus Cheasea Jossy Pratama (2023) tentang “Kritik Sosial Pada Pemerintah (Analisis Wacana Kritis Bintang Emon di Kanal YouTube Deddy Corbuzier Episode Somasi)” menunjukkan bahwa *Stand Up Comedy* Bintang Emon dalam kanal YouTube *Somasi* menyiratkan kritik tajam kepada pemerintah dan mengajak masyarakat lebih peka terhadap isu publik. Bintang dapat menyampaikan keresahannya dengan gaya sarkasme kritis namun humoris, dengan begitu ia mendapat apresiasi atas keberaniannya dalam mewakili suara rakyat. Persamaan dalam kedua penelitian ini terletak pada adanya pengakuan bahwa *Stand Up Comedy* berfungsi sebagai alat kritik sosial yang efektif kepada pemerintah serta adanya kesadaran pada audiens dalam memahami kritik sebagai bentuk kegelisahan publik terhadap pemerintah. Sedangkan perbedaan dalam penelitian ini terletak pada sudut pandang peneliti, metode analisis, dan data informan yang digunakan. Penelitian yang dilakukan Augustinus berfokus pada analisis teks yang menggunakan analisis wacana kritis Teun Van Dijk dan data informan yang diperoleh melalui analisis teks serta dokumentasi, sedangkan pada penelitian ini berfokus pada persepsi audiens yang menggunakan wawancara mendalam pada audiens seorang mahasiswa dan politikus.

Ketiga, penelitian Kesiya dan Ahmad (2023) tentang “*Stand Up Comedy* dan Kritik Sosial di Indonesia (Analisis Wacana pada Abdurrahim Arsyad)” menunjukkan bahwa materi dalam video Reformasi Dikorupsi dan Bahasa Unik di Indonesia sarat akan kritik sosial yang mencerminkan realitas masyarakat kecil. Abdurrahim Arsyad

dalam videonya, menyuarakan ketimpangan yang terjadi di masyarakat, seperti pembangunan yang tidak merata, akses jalan yang sulit, persoalan ekonomi yang disebabkan minimnya lapangan kerja, dan keterbatasan kebebasan berpendapat. Melalui gaya komedinya, Abdurrahim menjadikan *Stand Up Comedy* sebagai media untuk menyampaikan aspirasi rakyat dengan cara yang kritis namun tetap komunikatif. Persamaan dalam penelitian ini adalah adanya pengakuan bahwa terjadi efektivitas *Stand Up Comedy* sebagai media kritik sosial dengan pendekatan humor namun tetap kritis. Sedangkan perbedaannya, penelitian Kesiya fokus pada struktur teks dan isi pesan. Penelitian ini berfokus pada pendalaman efek pesan melalui pengalaman dan respon dari audiens.

Keempat, penelitian Dina Safira Putri (2022) tentang “Kritik Satire pada Pejabat Negara Indonesia Melalui Roasting *Stand Up Comedy* Kiky Saputri di YouTube” menunjukkan adanya pemanfaatan YouTube sebagai media kritik satire melalui *Stand Up Comedy*. Dalam video yang diunggah tersebut, Kiky Saputri dinilai melakukan roasting kepada kinerja pejabat dengan strategi yang tepat yaitu, memberi pujian, berdasarkan fakta dan data yang diperoleh, adanya selipan pantun, dan pembawaan yang santai. Dengan begitu, kritik yang disampaikan tetap menghibur tanpa menyinggung. Persamaan penelitian ini terletak pada subjek, jenis kritik sosial yang digunakan, dan tujuan penelitian. Subjek yang digunakan adalah Kiky saputri dengan menggunakan jenis kritik sosial politik dan kedua penelitian ini memiliki tujuan untuk menyampaikan kritik sebagai bahan evaluasi serta edukasi kesadaran politik pada publik. Sedangkan, perbedaan dalam penelitian ini terletak pada metode penelitian yang digunakan. Pada penelitian Dina menggunakan metode etnografi virtual dengan pendekatan observasi komentar YouTube dan wawancara via DM ke penonton, sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode fenomenologi dengan pendekatan wawancara langsung dengan mahasiswa dan politisi anggota DPRD Kab. Kediri.

Kelima, penelitian Yulius Kurniadi (2023) tentang “Humor and Gen Z: A Reception Study of Bintang Emon’s *Stand Up Comedy* in Somasi Content” menunjukkan bahwa adanya perubahan terhadap panggung komika ketika pandemi global. Namun, perubahan tersebut tetap memberikan kedekatan kepada penonton *Stand Up Comedy* melalui kanal YouTube dengan tetap menyampaikan kritik sosial dengan gaya bahasa sarkas ironi. Video Bintang Emon dalam acara *Somasi* menunjukkan bahwa Gen Z, sebagai penonton utama, merespon materi dengan beragam posisi *dominant, oppositional, dan negotiated* yang mencerminkan

keberagaman pandangan dalam generasi tersebut. Persamaan pada kedua ini adalah adanya kesepakatan bahwa *Stand Up Comedy* terbukti efektif sebagai sarana hiburan sekaligus media kritik yang relevan dan berdampak, serta memiliki potensi besar untuk terus berkembang di era digital pascapandemi. Sedangkan, perbedaan pada penelitian ini terletak pada teori, subjek, dan pendekatan yang digunakan. Pada penelitian Yulius, menggunakan teori resepsi milik Stuart Hall yang menggunakan subjek seorang gen z berusia 20-21 tahun dengan melakukan pendekatan konstruktivisme, sedangkan pada penelitian ini menggunakan teori persepsi audiens, kritik sosial, dan sarkasme yang menggunakan objek seorang mahasiswa dan politikus dengan melakukan pendekatan fenomenologi.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penelitian ini memiliki rumusan masalah mengenai persepsi audiens terhadap kritik sosial dan sarkasme dalam *Stand Up Comedy* yang dibawakan oleh Kiky Saputri dan Bintang Emon.

Menurut hasil analisis data responden mahasiswa dan politisi, ditemukan adanya kandungan kritik sosial dimensi moral, birokrasi, dan politik pada Video *Stand Up Comedy* Kiky Saputri dan Bintang Emon. Pada kritik sosial dimensi moral, mahasiswa menyoroti adanya persoalan integritas dan teladan pejabat publik, seperti sindiran Kiky terhadap kurangnya nasionalisme dan tanggung jawab figur DPR dan sindiran Bintang terhadap perilaku elite yang mengutamakan kepentingan pribadi. Pada kritik sosial dimensi birokrasi, terdapat sorotan terhadap pelayanan publik yang lamban, keterputusan komunikasi antara wakil rakyat dan masyarakat, serta prosedur yang berbelit-belit. Terakhir, pada kritik sosial dimensi politik tampak dalam sindiran terhadap kebijakan yang tidak pro-rakyat, absennya wakil rakyat di lapangan, dan kecenderungan politisi menghindari akuntabilitas melalui alasan atau retorika defensif.

Persepsi mahasiswa menunjukkan bahwa mahasiswa cenderung memaknai sarkasme sebagai alat kontrol sosial yang efektif. Bagi mereka, kritik moral, birokrasi, dan politik yang disampaikan Kiky maupun Bintang menjadi cermin keresahan publik, sekaligus edukasi politik yang relevan dengan realitas sehari-hari. Mahasiswa melihat sarkasme sebagai sarana untuk mengungkap fakta yang sering ditutupi oleh wacana formal, sehingga membantu membentuk kesadaran kritis dan keberanian untuk mengkritik kekuasaan.

Sementara itu, responden politikus memiliki pandangan yang lebih berhati-hati. Mereka mengakui adanya kritik sosial dimensi moral, birokrasi, dan politik dalam materi kedua komika, namun menilai sarkasme sering kali terlalu menajamkan sentimen publik dan berpotensi menimbulkan generalisasi yang tidak sepenuhnya adil bagi seluruh institusi atau individu. Politikus cenderung menunjukkan sikap defensif terhadap materi yang dibawakan. Bagi sebagian politikus, humor kritik yang terlalu personal berisiko memicu kesalahpahaman.

Adanya kontras persepsi ini memperlihatkan bahwa humor, khususnya yang sarat sarkasme, dapat menjadi arena tarik-menarik antara fungsi hiburan, penyadaran politik, dan citra institusi. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa *Stand Up Comedy* Kiky Saputri dan Bintang Emon bukan hanya hiburan, melainkan medium yang memanfaatkan sarkasme untuk mengangkat kritik sosial dimensi moral, birokrasi, dan politik. Namun, penerimaan terhadap kritik tersebut sangat dipengaruhi oleh latar belakang sosial dan posisi audiens dalam relasi kuasa, sehingga respon mahasiswa dan politikus menunjukkan perbedaan yang signifikan baik dari segi apresiasi maupun penilaian terhadap dampaknya.

B. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada aspek waktu. Penyesuaian waktu dengan para responden menjadi tantangan tersendiri karena sebagian besar responden, baik dari kalangan mahasiswa maupun politisi, memiliki agenda yang padat. Hambatan ini lebih signifikan pada responden dari kalangan politisi dimana tingkat kesibukannya relatif lebih tinggi dibanding mahasiswa. Kondisi tersebut menyebabkan beberapa kali penjadwalan ulang wawancara dengan para responden. Akibatnya, durasi pelaksanaan penelitian menjadi lebih panjang daripada rencana awal, sehingga berpengaruh pada efektivitas dan efisiensi proses penelitian secara keseluruhan.

C. Saran

Berdasarkan hasil dan keterbatasan penelitian ini, peneliti memberikan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya:

1. Penelitian ini terbatas pada responden di wilayah tertentu. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan informan, misalnya dengan melibatkan kalangan pekerja, aktivis sosial, masyarakat umum, atau politisi dari berbagai daerah agar memperoleh sudut pandang yang lebih beragam.
2. Selain responden mahasiswa dan politikus, peneliti selanjutnya disarankan untuk lebih banyak melibatkan para komika sebagai informan utama. Dengan begitu, diharapkan dapat memperoleh data yang lebih mendalam mengenai bagaimana proses kreatif, pertimbangan konten, serta strategi komunikasi komika dalam menyampaikan kritik sosial dan sarkasme melalui *Stand Up Comedy*.

DAFTAR PUSTAKA

- Adinna Islah Perwita, N. M. (2023). *Interpretasi Khalayak terhadap Humor Sexist dalam Tayangan Komedi Lapor Pak! Trans 7*. Purwokerto: Jurnal Ilmu Komunikasi.
- Aditya Priyatna Darmawan, S. G. (2022, April 4). *Penalaran Deduktif dan Induktif: Pengertian Serta Contohnya*. Retrieved from [kompas.com: https://www.kompas.com/skola/read/2022/04/04/151500169/penalaran-deduktif-dan-induktif-pengertian-serta-contohnya?page=all](https://www.kompas.com/skola/read/2022/04/04/151500169/penalaran-deduktif-dan-induktif-pengertian-serta-contohnya?page=all)
- Agung Ghani Putra, D. (2023). Analisis Wacana Kritik Sosial Kiky Saputri Roasting Erick Thohir dalam Acara Lapor Pak! Trans 7. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*.
- Ali, A. R. (2018). *Stand Up Comedy Indonesia Sebagai Medium Satire Terhadap Isu Diskriminasi Sosial (Studi Semiotik Stand Up Comedy Indonesia Periode 2011 – 2018 di Kompas TV)*.
- Anggreani, N. D. (2019). Pengaruh Berita Hoax Penculikan Anak di Grup Facebook Liputan Kendal Terkini Terhadap Perilaku Masyarakat Desa Karangnom Kecamatan Weleri Kabupaten Kendal.
- Area, U. M. (2023, September 20). *Mengetahui Pengertian dari Analisis Data*. Retrieved from Uma.ac.id: <https://uma.ac.id/berita/mengetahui-pengertian-dari-analisis-data>
- Aritama, R. (2021, 6 3). *Industri Komedi dan Stand Up Comedy di Indonesia: Bagaimana Perkembangannya?* Retrieved from kumparan: <https://kumparan.com/rifky-aritama/industri-komedi-dan-stand-up-comedy-di-indonesia-bagaimana-perkembangannya-1vs3gVVNh1A>
- Ayu. (2014). *Pengaruh Program Stand Up Comedy Show di Metro TV Terhadap Aktualisasi Diri Penonton (Studi Kasus Pengaruh Tayangan Stand Up Comedy Show di Metro TV Terhadap Aktualisasi Diri Penonton di Cafe Coffee Toffee, Kalimalang)*. Bekasi.
- Azis, Y. A. (2023, Maret 21). *Penelitian Terdahulu: Tabel, Cara Membuat, dan Contoh*. Retrieved from Deepublishstore.com: <https://deepublishstore.com/blog/penelitian-terdahulu/>
- Daud William Marhot Tua, A. M. (2022). Pengaruh Tingkat Pendidikan Dan Pengalaman Kerja Terhadap Kinerja Karyawan Bagian Keperawatan Rumah Sakit Umum Daerah Padang Sidempuan. *Journal Akutansi, Manajemen, dan Ilmu Ekonomi (Jasmien)*.
- Dina Safira Putri, D. (2022). Kritik Satire Pada Pejabat Negara Indonesia Melalui Roasting *Stand Up Comedy* Kiky Saputri di YouTube. *Jurnal Nomosleca*.
- Dingkol, W. (2023). Stand Up Komedi Sebagai Media Kritik Sosial (Analisis Wacana Kritis Video Stand Up Komedi Abdur Arsyad Edisi Ke- 4 Tahun 2014 di Channel YouTube Suci Kompas TV).
- Faizal, A. (2022, November 23). *Menilik Sejarah Humor Indonesia dari Masa ke Masa*. Retrieved from [goodnewsfromindonesia.id: https://www.goodnewsfromindonesia.id/2022/11/23/menilik-sejarah-humor-indonesia-dari-masa-ke-masa](https://www.goodnewsfromindonesia.id/2022/11/23/menilik-sejarah-humor-indonesia-dari-masa-ke-masa)

- Faturosyiddin, a. h. (n.d.). Analisis Resepsi Khalayak Remaja Mengenai Pesan Moral Dalam Film Doraemon Stand By Me 2.
- Fierda Sagita, A. R. (2023). *Strategi Penciptaan Humor Stand Up Comedy dalam Channel Youtube Pandji Pragiwaksono World Tour dan Implikasinya Terhadap Pembelajaran Bahasa Indonesia di SMP*. Tegal: Jurnal Pendidikan Tambusai.
- Gatot Wijayanto, D. (2022). Pemulihan Ekonomi Pada Masa Pandemi Covid-19 Melalui Digitalisasi Markeing Pada Sektor UMKM. *Jurnal Sosial dan Teknologi (Sostech)*.
- Hadiulya, N. A. (2019). Pelayanan Pelanggan Pada Bengkel Mobil New Ferry Semarang.
- Hafidan Hutomo, d. (2023). *Analisis Sindiran Dalam Konten Video Akun Instagram Bintang Emon*. Jurnal Ilmu Komunikasi dan Media Sosial (JKomdis).
- Imron, H. A. (2012). Media Massa, Khalayak Media, The Audience Theory, Efek Isi Media dan Fenomena Diskursif (Sebuah Tinjauan Dengan Kasus pada Surat Kabar Rakyat Merdeka). *Jurnal Studi Komunikasi dan Media*.
- Khairally, E. T. (2023, Juli 17). *Responden Adalah: Ini Definisi, Karakteristik, Syarat dan Contohnya*. Retrieved from Detik.com: <https://www.detik.com/edu/detikpedia/d-6826307/responden-adalah-ini-definisi-karakteristik-syarat-dan-contohnya#:~:text=Responden%20adalah%20subjek%20yang%20penting,responden%20berperan%20dalam%20kegiatan%20wawancara>.
- Lenaini, I. (2021). Teknik Pengambilan Sampel Purposive dan Snowball Sampling. *Jurnal Kajian, Penelitian, dan Pengembangan Pendidikan Sejarah*.
- Mayangsari, E. D. (2016). Persepsi Audiens Pada Tayangan Talk Show Rumpi “No Secret” di Trans Tv.
- Medina, M. I. (2023, Agustus 28). *Analisis Audiens: Definisi, Jenis, dan Manfaat*. Retrieved from Glints.com: <https://glints.com/id/lowongan/analisis-audiens-adalah/>
- Meydiawati, I. (2023). *Kritik Sosial dalam Konten Komedi “Ingin Jadi Rakyat Yang Baik” di Akun Instagram @Bintangemon*. surabaya.
- Mitang, M. P. (2020). *Wacana Humor Kritik Sosial dalam Stand Up Comedy Indonesia Season 4 di Kompas TV: Tinjauan Pragmatik*. Yogyakarta: Jurnal Ilmiah Kebudayaan Sintesis.
- Muhammad Yusup Rezeki Damuya. (2023). *Analisis Roasting Dalam Prespektif Demokrasi (Studi Roastingan Kiky Saputri Terhadap Ridwan Kamil dan Sandiaga Uno di Kanal YouTube Indosiar)*. Palembang: Jurnal Studi Ilmu Politik (JSIPOL).
- Nurzal, E. R. (2020, september). *7 Pertanyaan Penting Untuk Mengetahui Tentang Audiens Presentasi Anda*. Retrieved from lldikti.kemdikbud.go.id: <https://lldikti6.kemdikbud.go.id/2020/09/02/7-pertanyaan-penting-untuk-mengetahui-tentang-audiens-presentasi-anda/>
- Ramadhan, M. B. (2019). Pesan Kritik Sosial dalam Lirik Lagu Seperti Rahim Ibu yang Dipopulerkan Oleh Najwa Shihab dan Band Efek Rumah Kaca.
- Ranteallo, D. (2014). *Stand Up Comedy: Menyuarakan Demokrasi di Indonesia*.
- Ranteallo, I. C. (2014). *Stand Up Comedy : Menyuarakan Demokrasi di Indonesia*.
- Setyaningrum, C. P. (2021). Resepsi Audiens Tentang Playlist Berjudul Vlog Pada Channel YouTube Hansol.
- Somantri, G. R. (2005). Memahami Metode Kualitatif. *Makara, Sosial Humaniora*.

- Theresia Octastefani, d. (2020). Satu Dekade *Stand Up Comedy* di Indonesia : Anak Muda, Kreativitas Humor, dan Kritik Politik. *Jember University Press*.
- Yuni Setyowati, N. (2020). Analisis Peran Religiusitas dalam Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus pada Rumah Zakat Jakarta Timur).
- Yusup. (2023). *Analisis Roasting Dalam Prespektif Demokrasi (Studi Roastingan Kiky Saputri Terhadap Ridwan Kamil Dan Sandiaga Uno di Kanal YouTube Indosiar)*. Palembang: Jurnal Studi Ilmu Politik (JSIPOL).

LAMPIRAN

No	Scene	Pertanyaan	Jawaban Informan
1	 <i>“Saya senang banget karena mendapat suatu kehormatan bisa tampil di depan para anggota DPR. Itu keren banget. Karena DPR itu adalah satu-satunya Lembaga yang dipilih oleh rakyat untuk menyuarakan suara rakyat. Itu harapannya. Seperti yang kita tahu kenyataannya seperti apa bukan. Malah menjadi musuh rakyat.”</i>	Harapannya DPR menjadi pilihan rakyat untuk menyuarakan suara rakyat, relitanya musuh rakyat. Bagaimana tanggapan Anda?	Salsa: Menurut saya, untuk studi kasus di poin no. 1 mengenai harapannya DPR menjadi pilihan rakyat untuk menyerahkan suara rakyat realitanya musuh rakyat menurut saya, pada dasarnya DPR ini mungkin dipilih rakyat dengan harapannya dapat menjadi penganjalan suara mereka di tingkat pemerintahan masyarakat ini sendiri menginginkan wakil yang mampu memahami aspirasinya untuk memperjuangkan kepentingan umum dan juga menjaga keseimbangan antara kebocoran negara dan kebocoran rakyat namun memang realitanya seringkali tidak sejalan dengan harapan yang diharapkan oleh masyarakat pada umumnya banyak kebijakan yang diambil terasa jauh dari kebutuhan rakyat semena-mena dan bahkan dalam beberapa kasus justru mungkin menimbulkan ketidakpercayaan pada publik hal ini mungkin memang memunculkan bawasannya adanya anggapan bahwa DPR ini telah menjadi musuh rakyat karena tidak lagi berpihak pada harapan dan kebutuhan yang diharapkan oleh rakyat ini sendiri mungkin sebenarnya hal itu merupakan bentuk kepedulian pada masyarakat itu sendiri artinya mungkin rakyat ini masih berharap besar pada DPR agar bisa berubah menjadi lembaga yang benar-benar representatif dan juga transparan serta akuntabel terhadap kebutuhan dan juga harapan pada rakyat itu sendiri menurut saya sebagai mahasiswa,

		saya disini melihat bawasannya perbaikan ini masih sangat mungkin dilakukan namun memang hal itu harus dimulai dari kesadaran dan juga komitmen dari individu-individu atau para oknum-oknum yang melakukan kebijakan yang tidak sesuai dengan yang seharusnya karena itu ketika DPR kembali pada fungsi idealnya sebagai wakil rakyat maka kepercayaan publik pun akan pulih juga dengan sendirinya secara natural serta harapannya juga ke depannya DPR bisa kembali dengan fungsi yang lebih baik dan juga mewakili serta lebih mendengar kebutuhan rakyat ini sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pada masyarakat, terutama masyarakat di kalangan bawah Ninda: Aku kurang setuju dengan statement bahwa realitanya DPR musuh rakyat. Tapi aku setuju bahwa DPR itu seharusnya menyuarakan suara rakyat tetapi nyatanya DPR itu menurut aku tidak sepenuhnya menyuarakan suara rakyat karena suara rakyat yang mana sih yang mereka bela di depan rapat paripurna itu. Pun kita sebagai rakyat juga ga ada loh jembatan untuk menyuarakan aspirasi kita ke DPR itu gimana caranya, bahkan mungkin orang-orang tertentu itu gatau loh kalo kita bisa menyuarakan aspirasi kita ke DPR. Kaya contoh kecilnya misalnya jalan di depan rumah kita rusak, itu kan sebenarnya bisa loh kita aspirasikan tapi kenapa ga di tambal? Udah bertahun-tahun juga ga di tambal. Atau kaya ad pembangunan perumahan jadi kaya banyak truk gede lewat depan rumah jadi mengakibatkan jalan depan rumah rusak itu kan sebenarnya bis akita permasalahan
--	--	---

		gitu loh, bisa dijadiin topik untuk dibahas oleh para anggota dewan ini. Tapi kan nyatanya kita mau ngelaporin hal itu aja ga ada jembatannya atau mungkin pun udah dilaporkan tapi ga ditindaklanjuti tetep aja tu jalan rusak gitu. Dandi: Menurut saya, ya memang kerasanya gitu ya, DPR kan dipilih ya buat wakilin suara rakyat tapi malah realitanya ngambil keputusan yang ga nyambung sama kebutuhan masyarakat. Jadi harusnya sarkasme pointnya Kiky harusnya cukup menyentil yak arena mewakili keresahan banyak orang juga. Rangga: Oke terus untuk Scene satu Yang Kiki Saputri Ini sebenarnya menarik ya Karena Memang kan sistem Di Indonesia sendiri kan Mengenai sebuah Sistem demokrasi Yang dimana Demokrasi itu diartikan Sebagai dari, Oleh, dan untuk rakyat Dimana itu mengacu kepada Definisi demokrasi Dari Abraham Lincoln Seperti itu Terus akhirnya Kiki menyampaikan Lembaga DPR itu adalah Salah satu lembaga Yang menyuarakan aspirasi rakyat dan blablabla segala macam Menjadi harapan rakyat, Harapannya Seperti itu kan Tapi ternyata itu Menjadi musuh rakyat Jadi sebenarnya Menurut aku Apa yang disampaikan Kiki ini Sebenarnya Dalam Musuh rakyat itu Sebenarnya dalam Tanda kutip sebenarnya Yaitu adalah Sebuah Apa ya Sebuah lembaga DPR Yang harus nyampur kepada rakyat Dimana Karena DPR ini kan Ini sebuah lembaga Legislatif Yang
--	--	---

		dimana Legislatifnya adalah Sebuah lembaga perundang-undangan Membentuk dan mengawasi Jalannya Perundang-undangan Seperti itu kan Maka Dari perkataan Kiki itu Kita bisa pahami Bahwa Yang diartikan sebagai Musuh rakyat itu Adalah dimana Kebijakannya itu Yang harusnya DPR itu Berpihak Kepada rakyat Melalui kebijakannya Melalui perundang-undangan Segala macam Cuma nyatanya Apa yang dibuat oleh DPR Baik itu melalui kebijakan Untuk perundangan Segala macam ataupun Melalui forum musyawarah Keputusan yang ada di musyawara itu Malah Kontra dengan Apa yang diperlukan masyarakat Malah menguntungkan Para oligarki Nah itu Jadi menurut aku Apa yang disampaikan kiky Ini disampaikan secara eksplisit ya Kaya gitu Lugas: Oke, pernyataan dari saudara Kiki Saputri ini yang mencoba untuk mendeskripsikan atau memberikan keterangan tentang situasi DPR hari ini. Barangkali menurut saya hematnya adalah Kiki sedang mengemas bagaimana kenyataan itu atau realitas politik kita memang demikian. Artinya dalam suasana komunikasi politik, Kiki Saputri hendak mengemas bagaimana kenyataan itu diperdayagunakan dengan kekhasan dia, yakni sebagai komika. Jadi kurasa untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh Kiki, itu ya dia semacam mendeskripsikan situasi politik kita. Karena memang seringkali DPR mengkhianati apa yang telah mereka janjikan. DPR seringkali tidak mengebris permasalahan-permasalahan konkrit yang sebetulnya mereka tahu. Akan
--	--	--

		tetapi mereka tidak selesai mungkin untuk menyudahinya atau memberikan solusi terhadap permasalahan sosial yang ada. Kuswanto: Kalau orang itu, anggota Dewannya kan punya nafsi-nafsi, punya kepribadian masing-masing. Selama keperibadian itu tidak menyimpang, ya kita berbuat untuk rakyat, kembali kepada rakyat, dan berbuat untuk rakyat. Tidak ada lah yang Dewan yang neko-neko. Itu hanya beberapa orang yang namanya oknum. Kalau insya Allah, kalau kita memang melaksanakan tugas sesuai dengan regulasi yang ada. Totok: Kalau menurut saya tetap DPRD itu menyuarakan aspirasi rakyat, tetap berjuang untuk rakyat, tetap berjuang oleh konstituennya. Hanya saja DPRD kan banyak, seumpamanya DPRD mewakili dari dapil 1 tentu menyuarakan konstituennya di dapil 1. Mungkin dapil 1 ini berteman dengan dapil 6. Nah itu yang jadi persoalan, mungkin miskomunikasinya di sini, dianggap musuh daripada rakyat yang di dapil yang lain. Padahal berangkatnya mesti menyalakan konstituennya. Contohnya kalau saya di dapil 1 tentu saya akan memperjuangkan konstituen saya di dapil 1. Terima kasih. Kalau sedang rapat DPRD juga main game, berarti oknum DPRD tersebut tidak menghargai daripada rapat tersebut. Oleh karena itu tanggapan saya kalau ada DPRD yang main game ketika ada rapat berarti ada konsekuensinya. Konsekuensinya silakan saja, mungkin tergantung dari kode etiknya dan dari partai itu sendiri. Apakah ada kira-kira kategorisasi
--	--	--

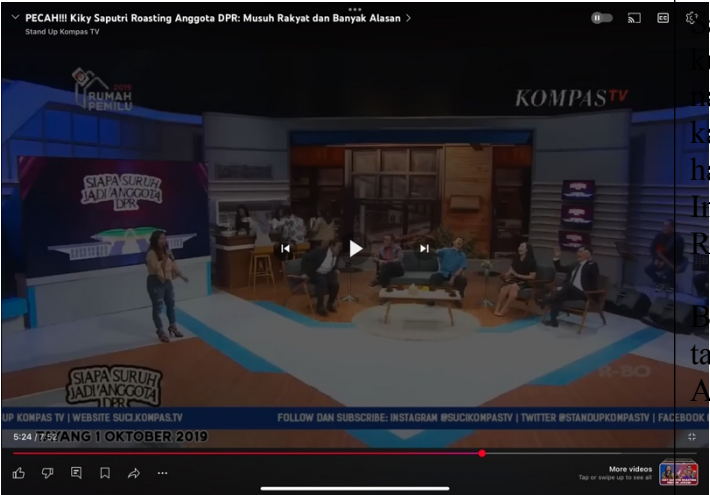
		secara tertulis? Kemudian apakah ada sanksi yang lain? Menurut pendapat saya konsekuensinya harus ada sanksinya kalau anggota Dewan bermain game ketika ada rapat. Siswanto: Berarti anggota DPR tersebut belum bisa memahami tugasnya. Sehingga masih berbuat yang kurang semestinya, dengan kata lain kurang sesuai dengan fungsi mereka sebagai wakil rakyat. Ketika seorang anggota DPR masih menunjukkan perilaku atau tindakan yang tidak sesuai dengan semestinya seperti melalaikan tanggung jawab, bertindak sewenang-wenang, atau tidak menjalankan fungsi pengawasan dan legislasi dengan baik maka hal itu menandakan adanya kegagalan dalam memahami esensi peran sebagai pejabat publik. Seorang anggota DPR tidak sekadar hadir di ruang sidang atau menandatangani dokumen kebijakan, tetapi memiliki tanggung jawab yang kompleks dan mendasar, yakni menyuarakan aspirasi masyarakat, mengawasi jalannya pemerintahan, serta menyusun peraturan perundang-undangan yang berpihak pada kepentingan rakyat. Jika seorang anggota DPR masih terjebak dalam pola kerja yang tidak produktif, apatis terhadap masalah rakyat, atau bahkan menyalahgunakan wewenang untuk kepentingan pribadi atau golongan, maka ia telah menyimpang dari fungsi representatif yang melekat pada jabatannya. Dalam konteks tersebut, diperlukan evaluasi diri dan peningkatan kapasitas, baik secara moral, intelektual, maupun etis, agar para wakil rakyat benar-benar memahami tanggung jawab yang diemban dan mampu
--	--	--

			menjalankan tugas secara profesional serta penuh integritas.
2	 <i>“Oh saya inget bapak ini bapak Masinton kan tapi sebenarnya saya itu lupa saya gatau bapak Masinton itu siapa. Saya sampai searching di google ‘siapa itu Bapak Masinton’ eh googlenya nanya balik.”</i>	Sarkasme bagaimana anggota DPR jauh dari rakyat karena tidak terjun ke lapangan. Bagaimana tanggapan Anda?	Salsa: Menurut saya, masyarakat menilai kinerja DPR melalui realita yang ada di lapangan, sebagai contoh kerusakan jalanan di suatu daerah yang mungkin dirasa oleh masyarakat pihak pemerintah tidak cekatan dalam menanggapi masalah tersebut. Seperti yang kita tahu, bahwa DPR disini berfungsi untuk menyuarakan rakyat, maka rakyat disini merasa bahwa hak perlu dipenuhi. Ninda: Nah ini aku setuju banget. Karena pas pemilihan DPRD Sleman kemarin ya, kebetulan aku orang Sleman jadi aku nyoblosnya disana. Itu tu kaya bahkan aku aja gatau ini calon DPRD-nya siapa. Dari kemarin-kemarin tuh ada kaya lima atau tujuh, aku tuh ga ada yg ngeh. Aku tuh Cuma kenal satu dan itupun dari medsos, itu kan berarti menunjukkan bahwa, ya mereka tuh cuma nyaleg aja tapi mereka tidak memperkenalkan diri kepada masyarakat. Mungkin cara mereka memperkenalkan itu dengan aktif di medsos atau kalau terjun itu cuma ke satu atau dua daerah gitu loh, sedangkan yg milih dia kan banyak ya, jadi kalo dia ga terjun ke semuanya gimana orang-orang tau dia. Pun temen-temen aku kemarin itu tuh milihnya oh yaudah yang dia tau dari medsos aja atau kaya oh yang diomongin orang-orang bagus oh ini anaknya siapa kek gitu-gitu. Itu karena mereka ga terjun langsung ke lapangan atau kaya contohnya si ini DPR RI yang deket sama Fuji (read: Verrel Bramasta) itu kan kaya dia jadi DPR karena dia artis doang.

		Maksudnya ya aku gatau ya kinerja dia di DPR RI sana kaya gimana tapi bahkan aku tidak pernah melihat story dia karena kebetulan aku ngikutin ignya. Aku bahkan ga pernah liat story dia itu terjun ke lapangan. Ya it utu cuman yaa paling setahun sekali gitu. Dandi: Bener juga itu ya karena banyak pas kampanye rajin banget nih blusukan segala macam turun ke lapangan tapi pas udah ngejabat ya gitu deh.. lupa jalan pulang ke daerah, jadi buat gue sih kritik2 kaya gitu mohon maaf banget ya karena rakyat butuhnya waktu yang hadir bukan cuma di tv doang Rangga: Dimana Kalo yang di Nah Di scene 2 ini Ini dilihat bagaimana Bahwa Kiki menyampaikan Saya Senang bertemu dengan Panji pragiwaksono, Roy Suryo, Lalu ada si Siapa tuh Washington tadi ya Gitu kan Terus Malah search engine nya Nanya balik Mungkin maksudnya adalah Washington Ya kan sebenarnya ini menunjukkan bahwa Ya DPR DPR ketika mencaloninya Hanya terjun kepada rakyat Di awal kampanye Seperti itu Cuman ketika dia Sudah menjadi Bagian dari legislative itu sendiri Dia melupakan rakyat Dia Kalo pun ditanya Apakah dia terjun kepada masyarakat Kita gak pernah tau Karena kita gak pernah ngeliat bahwa Kapan sih DPR itu turun kepada Rakyat Kita gak pernah Kita gak pernah liat itu Baik itu damage Atau secara langsung Nah jadikan penyampaian hal Seperti ini kan Sebuah hal yang Apa ya Menunjukkan realita Dimana kalo Misalnya sebuah Anggota DPR Ketika dia sudah terpilih Sudah dia lupa dengan rakyat Dia hanya
--	--	--

		berkenalan kepada rakyat Hanya akrab dengan rakyat Itu ketika masa kampanye Seperti itu Namun ketika sudah jadi Ya sudah Gitu Dia tidak mikirkan apapun Gitu sih Lugas: Ya, tanggapan mengenai video itu aku rasa sebetulnya DPR secara keadaan geografis tidak jauh ya. Tapi barangkali DPR sudah kehilangan pijakan dia sebagai representatif rakyat. Oleh sebab itu yang disampaikan oleh Kiki tadi, lagi-lagi itu bukan suatu hal yang sulit untuk kita ketahui ya. Karena kita tahu anggota-anggota DPR datanya hanya sekali, yakni saat momentum-momentum pemilihan umum, pemilihan legislatif dia hadir. Setelah itu lagi-lagi apa yang ia janjikan, visi-visi dia terhadap perkembangan masyarakat dan sebagainya seolah-olah lupa. Akan tetapi yang kita sorot adalah apa yang menyebabkan anggota DPR itu luput terhadap kepentingan masyarakat. Sepertinya karena ada suatu hal yang lebih penting daripada rakyat yaitu perut mereka sendiri. Kuswanto: Ya, kalau anggota Dewan sampai jauh dari rakyat berarti yang salah bukan Dewannya. Kenapa? Dewan ini kan sebagai penyeluruh aspirasi. Kalau rakyatnya tidak menyampaikan, kan juga tidak tahu apa yang diinginkan oleh rakyat. Jadi kita harus saling bersinergi antara Dewan, sama rakyat, sama masyarakat untuk saling mengisi kelebihan dan kekurangan. Sehingga sinergitas, hubungan kita antara warga sama Dewan tetap terjalin. Tidak mungkin sampai tidak tahu anggota Dewan. Karena kita sendiri juga sama-sama jadi masyarakat.
--	--	---

		Totok: Menanggapi Kiki Saputri tentang anggota DPRD jauh dari rakyat karena tidak terjun ke lapangan. Menurut pendapat saya tidak demikian. Karena apa? Karena kita buktinya seperti kita akan komunikasi terus melalui HP walaupun kita gak pernah terjun ke lapangan. Tetapi rakyat yang banyak tahu apalagi yang milih saya ya, yang milih saya, berarti tahu HP saya, tahu kegiatan saya. Kalian tidak harus ketemu tapi lewat WA, lewat telepon itu sudah ada komunikasi ya. Apalagi ada aspirasi mesti disampaikan. Jadi tidak harus ketemu di lapangan. Akan tetapi melalui media-media lain seperti HP tetap terjalin komunikasinya. Paling tidak hari raya mesti kita ketemu. Ada masalah reses ketemu. Ada masalah pokir ketemu. Ada masalah-masalah yang berkaitan dengan individu. Masalah hajatan ini itu kadangkala kita diundang juga dating. Itu salah satu bentuk-bentuk ketemuan ya. Siswanto: Untuk memaksimalkan kinerja sebagai wakil rakyat, seorang anggota DPR tidak bisa hanya bekerja dari balik meja atau sekadar mengandalkan laporan formal semata, melainkan harus secara aktif turun langsung ke lapangan dan menyatu dengan masyarakat. Interaksi langsung ini sangat penting untuk menggali aspirasi, memahami kebutuhan riil masyarakat, serta merasakan secara langsung permasalahan yang mereka hadapi. Dengan hadir secara fisik di tengah-tengah rakyat, anggota DPR akan memperoleh informasi yang lebih otentik dan kontekstual, sehingga keputusan maupun kebijakan yang
--	--	---

			dirancang menjadi lebih tepat sasaran dan berdampak nyata. Proses ini juga memungkinkan adanya umpan balik langsung dari masyarakat terhadap kinerja pemerintah maupun lembaga legislatif itu sendiri. Aspirasi-aspirasi yang terkumpul inilah yang seharusnya menjadi dasar dalam menyusun program-program di ranah eksekutif maupun regulasi di tingkat legislatif. Selain itu, pendekatan ini juga memperkuat legitimasi sosial seorang wakil rakyat karena menunjukkan bahwa mereka tidak sekadar menjadi simbol perwakilan, tetapi benar-benar menjalankan perannya sebagai jembatan antara rakyat dan negara. Melalui keterlibatan aktif di lapangan, anggota DPR dapat memperkuat kepercayaan publik, meminimalisir kesenjangan antara kebijakan dan kebutuhan riil masyarakat, serta menjadikan legislatif sebagai lembaga yang responsif dan relevan dalam pembangunan bangsa.
3	 <i>“Dan satu lagi yang intrik dengan Pak Roy Suryo adalah ketika beliau tidak hafal atau salah lirik dalam menyanyikan lagu Indonesia Raya. Betul pak kalo kebanyakan nonton video begituan (read: video ga senonoh) suka ngerusak sel otak.”</i>	sarkasme kurangnya nasionalisme karena tidak hafal lagi Indonesia Raya. Bagaimana tanggapan Anda?	Salsa: untuk tanggapan selanjutnya mengenai tanggapan dari statement sarkasme ini kurangnya sarkasme kurangan nasionalisme karena tidak hafal lagu Indonesia Raya nah, menurut saya menyindir atau membuat sarkasme mengenai kurangan nasionalismenya seorang hanya karena tidak hafal lagu Indonesia Raya memang bentuk sarkasme yang terlalu menderanakan makna nasionalisme itu sendiri nasionalisme itu tidak hanya diukur dari beberapa hafalnya seorang menyanyikan lagu kebangsaan tapi lebih luas lagi mungkin bagaimana kita melihat sudut pandang dari bersikap

		terhadap bangsa apakah ia menjunjung nilai-nilai pancasilanya, peduli terhadap sesama, taat hukum dan juga kontribusi positif bagi negara. Memang hafal lagu kebangsaan itu mungkin adalah bagian dari identitas ataupun simbol kecintaan terhadap tanah air sebagai masyarakat Indonesia Raya itu sendiri dari kita kecil sampai kita hingga dewasa menyanyikan lagu Indonesia Raya itu merupakan lagu yang sering dilakukan dan juga sering diimplementasikan di setiap kegiatan-kegiatan formal namun memang kita juga harus berhati-hati juga agar simbol itu tidak menjadi satu-satunya tolak ukur bisa saja seseorang itu hafal lagu Indonesia Raya dengan sempurna namun dalam praktiknya justru memang merugikan bangsa lewat tindakan seperti korupsi, intoleransi ataupun tidak peduli dengan kondisi-kondisi sosial sekitarnya itu sendiri sebaliknya juga ada juga orang yang mungkin tidak hafal secara sempurna tapi setiap hari mereka bekerja keras membela kebenaran, membantu sesama dan juga menjaga lingkungan-lingkungan hal itu cukup terjadi cukup banyak di lingkungan-lingkungan saya pribadi dan hal-hal tersebut justru menunjukkan nasionalisme dalam tindakan nyata jadi menurut saya daripada mungkin memperlakukan atau menyindir secara sarkastik mengenai statement hal tersebut akan jauh lebih baik bijak kita saling mengingatkan, mengedukasi dan juga memperkuat rasa cinta tanah air kita dengan cara membangun karena mungkin esensi nasionalisme itu bukan hanya diucapkan tapi perlu diwujudkan oleh kita sendiri seperti itu
--	--	--

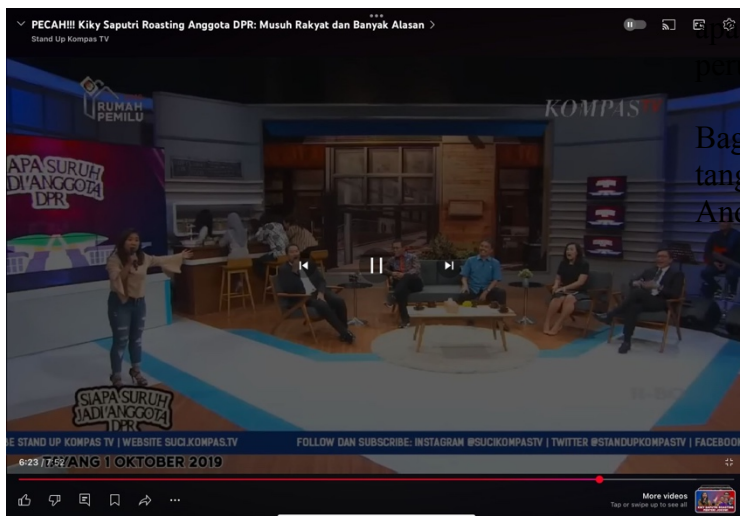
		Ninda: Jujur kalo seorang Pejabat tidak hafal lagu Indonesia Raya tuh parah banget ya, karena itu kan lagu basic yang dari TK pun itu udah pasti diajarin gitu. Jadi kalo misalnya seorang DPR apalagi dia menjadi wakil rakyat dan dia ga hafal lagu Indonesia Raya itu amat sangat nilai nasionalismenya ga ada sih. Dandi: Sebenarnya basicnya lucu sih ini, ga hafal lagu Indonesia Raya kurang nasionalis. Kedengarannya lucu tapi kalo dipikir-pikir kaya sindiran yang lumayan pedes ya karena lagu kebangsaan kan harusnya jadi symbol dasar nasionalisme gitu, kalo sampe ga hafal yaa kita mikirnya gimana bisa mikirin kepentingan bangsa gitu, jadi sarkas yang itu ada benarnya juga sih Rangga: Oke Roy Suryo ya Roy Suryo ini Aku gak tau ya Apakah Roy Suryo ini Sebenarnya anggota DPR Atau enggak Karena yang aku tau waktu itu Dia cuma sekedar jadi menteri Gak sih Aku gak tau ya Dia sebagai Jadi anggota DPR Atau enggak Cuma terlepas dari itu Dia punya jabatan Tertentu lah Di Republik ini gitu Dan memang Pernah waktu itu Aku pernah Memang pernah ngeliat Roy Suryo ini memang Apa namanya Ada sebuah video Pokoknya itu kan video Tentang Bukan tentang Maksudnya video Sepak bola gitu Maksudnya lagi euforia Mereka kemenangan Atau apa gitu Terus Roy Suryo itu nyanyi Indonesia Raya Cuma habis itu Dia nge-freeze Karena dia lupa lagi Segala macam baru lanjut lagi Dan sebenarnya kan Sarkasan Kiki ini Menurut aku Apakah ditanya
--	--	--

		Sarkasan yang subtansif Menurut aku Enggak terlalu juga Karena kan kita sebenarnya Kita gak bisa langsung nge-judge Apakah Roy Suryo ini Memang dia ini Gak hafal lagi Indonesia Raya Atau sebenarnya lupa Karena memang ada beberapa Kondisi tertentu Dimana seseorang itu Sebenarnya mengingat Ataupun Hafal akan suatu hal Cuma ketika dia Berada di situasi tertentu Dia ini lupa Kayak gitu Karena adanya dorongan Desakan tadi Jadi menurut aku ya Untuk konteks sarkasan Kiki Saputri ini ya Yang di scene ketiga ini Kalau dibilang subtansif Enggak Cuma ini menurut aku terlalu personal Enggak terlalu Maksudnya Mengarahi ke personal Kayak gitu Karena Ya balik lagi Kita gak bisa nge-judge Seorang Siapapun itu Entah itu tokoh publik Ataupun Bukan Kita gak bisa langsung nge-just Oh ini orang Ini bodoh orang Ini ga apal Indonesia Raya Atau semacamnya Karena itu Sifatnya kondisional Kayak gitu Lugas: Untuk tidak hafalnya lirik Indonesia Raya itu, aku rasa memang mungkin ada keadaan ke-diri-an Roy Surya yang mungkin agak merasa semacam dredek apa bahasanya. Ya mungkin dia demam panggung lah ya. Aku tidak bisa memberikan satu respon yang berkaitan dengan semangat nasionalisme, tapi karena barangkali posisi Roy Surya ketika menyanyikan itu kemudian tidak hafal lagu Indonesia Raya atau mungkin dalam penggalan tertentu ada yang salah, aku rasa dia dalam keadaan demam panggung saja. Tapi kalau misalkan itu dihubungkan dengan sarkasmo dalam konteks politik kita, aku rasa
--	--	--

		Roy Surya hendak memberikan satu simbol terhadap kepada kita semua bahwa seringkali Indonesia Raya dengan prinsip-prinsip bernegara dan sebagainya itu memang tak pernah terjawabntahkan secara konkret. Artinya masyarakat atau warga negara, warga Indonesia itu dibiarkan untuk mengais kesejahteraan mereka sendiri daripada menunggu yang tidak pasti dari pihak negara. Kuswanto: Ya mungkin kalau di sini video ini terkait Pak Royusuryo. Ini mungkin dia pada waktu menyanyi, pikirannya tidak mengabalkan Indonesia Raya. Pikiran yang lain, sehingga dia lupa. Kalau kita sebagai warga negara Indonesia, lagu Indonesia Raya itu dinyanyikan mulai kita SD sampai sekarang tetap menyanyikan Indonesia Raya. Mudah-mudahan kita tidak lupa. Kalau lupa wajar lah manusia, wajar punya lupa. Tetapi tidak dibuat-buat untuk melupa. Mungkin itu ya. Totok: Menanggapi Kiki Saputri. Kiki Saputri tentang Roy Suryo yang tidak hafal lagu Indonesia raya, menurut pendapat saya memang kita prihatin. Karena itu adalah lagu kebangsaan kita ya. Sejak kecil kita menyanyi. Mulai SD, SMP, SMA bahkan sekarang pun tetap kita kumandangkan. Jadi dalam hal ini ya ini merupakan pelajaran kita semua. Paling tidak kita harus ya hafal dan menghayatinya. Siswanto: Sebagai warga negara, terlebih lagi sebagai pejabat publik, memahami, menghafal, dan melaksanakan penghormatan terhadap lagu kebangsaan Indonesia Raya
--	--	--

bukanlah pilihan, melainkan sebuah kewajiban moral dan konstitusional. Lagu Indonesia Raya bukan sekadar rangkaian nada dan lirik, melainkan simbol pemersatu bangsa yang sarat dengan nilai-nilai perjuangan, identitas nasional, dan semangat kemerdekaan. Oleh karena itu, tidak pantas jika ada individu, khususnya yang menduduki jabatan publik, yang tidak mengetahui atau bahkan bersikap abai terhadap lagu kebangsaan tersebut. Penghormatan terhadap lagu Indonesia Raya mencerminkan rasa nasionalisme, kesadaran sejarah, dan sikap patriotik yang seharusnya tertanam kuat dalam diri setiap anak bangsa. Lebih dari itu, pejabat publik memiliki tanggung jawab moral untuk menjadi teladan bagi masyarakat, termasuk dalam hal-hal mendasar seperti menghormati simbol negara. Ketika seorang pemimpin mengetahui dan menjalankan penghormatan terhadap lagu kebangsaan dengan sepenuh hati, maka ia turut menanamkan nilai cinta tanah air kepada generasi muda. Sebaliknya, ketidaktahuan atau ketidakpedulian terhadap lagu kebangsaan merupakan indikasi lemahnya pemahaman terhadap identitas kebangsaan dan berpotensi menurunkan wibawa negara di mata rakyat. Maka, sudah sepatutnya setiap pejabat dan warga negara menjadikan Indonesia Raya sebagai bagian dari jati diri nasional yang dijaga, dihormati, dan dibanggakan dalam setiap kesempatan.

Roy Suryo Salsa:
lupa bayar selanjutnya untuk statement
makan, mengenai pendapat seorang figur



“Ada satu kasus yang tak terlupakan, yaitu Pak Roy Suryo lupa bayar rawon setan pas makan di Surabaya. Perut sendiri aja lupa gimana perut rakyat.”

lagi sama perut rakyat.

Bagaimana tanggapan Anda?

publik atau pemerintah mengenai bawasannya figure tersebut lupa bayar makan apalagi sama perut rakyat menurut saya kasus lupa bayar makan ini yang melibatkan figure publik ini mungkin terdengar sepele jika dilihat dari mungkin nilainya dan juga habit yang dilakukan karena pada nyatanya masyarakat umum pun sering melakukan hal seperti itu juga namun memang yang menjadi highlight karena menyangkut figure publik yang pernah memiliki jabatan penting di pemerintahan ketika seseorang yang pernah menjalankan kekuasaan dianggap lalai terhadap hal yang sesederhana itu wajar jika masyarakat kemudian mempertanyakan kalau urusan pribadi saja bisa lupa bagaimana dengan kepentingan rakyat pernyataan tersebut cukup terbilang sarkastik dan juga lumayan satir karena apabila apalagi sama perut the mention about apalagi sama perut rakyat it's mirroring tentang kekecewaan publik yang mungkin lebih dalam terhadap perilaku para pejabat baik yang masih menjabat maupun yang sudah tidak aktif. hal ini mungkin bukan hanya mungkin sekedar tagihan soal makanannya saja namun bentuk responsibility atau tanggung jawab itu sendiri how to match integrity dan juga sensitivitas terhadap kepercayaan publik sebagai mahasiswa saya melihat di sini bagaimana cerminan penting bahwasannya setiap tindakan publik ini sekecil apapun tetap memiliki dampak terhadap citra dan juga kepercayaan masyarakat hal ini juga mungkin menjadi pengingat bahwasannya kita semua terutama generasi muda yang kelak mungkin nantinya memegang peran-peran penting di pemerintahan ataupun di tingkat atas bisa menjadi pemimpin yang

bukan hanya mencontohkan hal-hal mengenai habit perilakunya saja tapi mencerminkan bagaimana background dan juga posisi yang mereka sedang pegang karena hal tersebut merupakan salah satu etika dan juga bentuk kesadaran serta nilai ataupun value yang dimiliki oleh para pemerintah itu sendiri

Ninda:

Mmm kalo lupa makan, ga lupa makan doang ya, lupa sesuatu itu kan sebenarnya hal yang manusiawi ya. Tapi karena disini beliau orang yang terlihat, publik figure gitu jadinya kaya ya lupa bayar makan aja dikaitkan sama bagaimana dengan perut rakyat gitu kan. Jadi y aitu, lupa sesuatu itu hal yang biasa tapi karena dia publik figur, jadinya dia lupa sesuatu aja langsung dikaitin dengan rakyat gitu.

Dandi:

Ya ini lucu juga tapi bikin mikir Roy Suryo hal-hal kecil aja bisa lupa tanggung jawab gitu gimana mau inget perut rakyat gitu. Kritikan kaya gini simple tapi maknanya dalem kalo aku nangepnya gitu ya.

Rangga:

Oke Untuk yang scene keempat ini Menarik sebenarnya Jadi Kiki Saptri ini kan Berangkat dari sebuah Apa ya Sebuah kejadian unik Untuk yang di scene keempat ini Dimana Roy Suryo ini Memang pernah Waktu itu Di Surabaya itu Dia itu makan Terus dia lupa bayar Segala macam Nah jadi Kejadian ini Dijadikan oleh Kiki Saputer itu Sebagai bahan Untuk Merosting gitu Untuk melakukan sebuah sarkasma Kepada para Pejabat Kayak gitu Terutama pada Kontesnya disini Karena Roy

Suryo Kayak gitu kan Jadi dia jadikan bahan Kejadian itu Sebagai bahan sarkasma Yang mengatakan Oh ini lo perut sendiri aja lupa apalagi perut rakyat yang dimana kita memahami seperti ini sih yang bisa kita pahami adalah yang ingin disampaikan kiky ini adalah pejabat ini kenyang atas dirinya sendiri gitu kan, cuman perut rakyat ini ya tetep kelaparan maksudnya kita seorang pejabat itu sudah menjadi seorang yg besar karena dia Cuma mikiran dirinya sendiri dan segala macem ya dia ga mikirin orang lain lagi bahkan perut sendiri aja ga kepikiran karena dia Cuma mikirin egonya sendiri tujuannya sendiri gitu tanpa memikirkan orang lain termasuk rakyat itu sendiri apalagi masalah perut lagi lah yang menurutku aku ini unik sih

Lugas:

Oke, untuk hal ini aku rasa aku melihat dulu respon publik atau orang yang ada di sana cukup terhibur dengan mengekspresikan tawa. Sebetulnya mereka itu sedang merayakan ironisnya kalangan-kalangan DPR yang lagi-lagi barangkali jauh dari kepentingan masyarakat. Artinya apa yang hendak disampaikan oleh Kiky, lagi-lagi dia mengemas bagaimana keironian, bagaimana penderitaan yang secara tidak langsung ataupun langsung diberikan DPR, diberikan oleh mereka pemilik otoritas kepada kita masyarakat sipil ini. Jadi perut saja atau perut sendiri yang dipikir kemudian dia lupa terhadap perut rakyat, itu mengindikasikan adanya keironian di dalam praktek berpolitik kita yang disumbangsikan oleh pemilik otoritas.

Kuswanto:

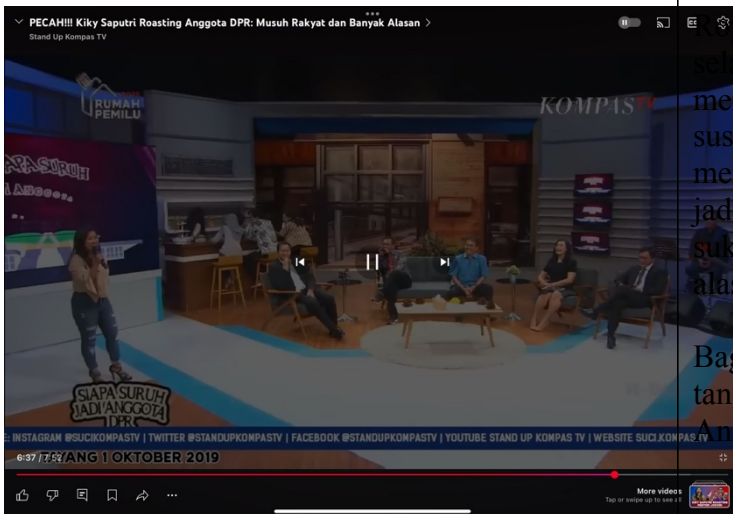
Terkait dengan lupa, lupa bayar.

Memang kita lupa tadi. Mungkin lupa ini karena kita buru-buru atau apa. Tapi kalau urusan kita dengan masyarakat, dengan aturan, ya kita tidak mungkin lupa. Tugas kita setiap hari itu ada tiga. Yang pertama adalah membuat aturan. Yang kedua adalah membuat pembahasan anggaran. Dan yang ketiga adalah membuat mekanisme untuk rapat di anggota Dewan. Jadi tugas kita jelas. Ga mungkin lupa itu ya. Ya kalau lupa, memang Dewan itu kemana-mana kan tugasnya kan membuat karangan. Jadi membuat karangan, membuat aturan, membuat kebijakan. Tapi selama aturan atau karangan yang dibuat, tidak membuat kita lupa kepada masyarakat. Apalagi terkait dengan lupa bayar. Bayar itu beda. Bayar yang mana yang dimaksud ini? Kalau kita membayar terkait dengan makan, ya mungkin kita ada staff, ada apa. Tapi kalau membayar dengan kegiatan, pasti kita yang bertanggung jawab wong anggota Dewan. Mungkin itu tanggapan saya.

Totok:

Dalam hal ini saya memang apresiasi ya, apresiasi perutnya sendiri saja lupa apalagi perut rakyat. Tapi tetap anggota DPR yang ideal tetap harus memperjuangkan masyarakat, memperjuangkan konstituen, memperjuangkan rakyat. Pada intinya bagaimana kalau perut rakyat sudah terpenuhi tentunya kemiskinan akan terentaskan. Itu jelas. Kita kan kesana arahnya semua kita berbangsa dan bernegara itu arahnya untuk mengurangi kemiskinan. Termasuk untuk memperhitungkan masalah urusan perut rakyat semuanya. Terima kasih.

			Siswanto: Introspeksi dan kontrol diri merupakan dua pilar penting dalam menjaga integritas seorang pejabat publik, di mana pun ia berada dan dalam situasi apa pun. Jabatan sebagai wakil rakyat atau penyelenggara negara bukan hanya menyangkut kewenangan formal, tetapi juga menyangkut tanggung jawab moral yang melekat dalam setiap tindakan, baik di ruang publik maupun privat. Seorang pejabat dituntut untuk senantiasa mawas diri, mengontrol sikap dan perilakunya agar tidak menyimpang dari norma hukum, etika, dan kepatutan sosial. Kasus-kasus pelanggaran etika yang dilakukan oleh tokoh publik seperti yang pernah terjadi pada Bapak Roy Suryo menjadi pengingat keras bahwa kurangnya kontrol diri dapat merusak reputasi pribadi sekaligus mencederai martabat lembaga yang diwakilinya. Maka, introspeksi bukan hanya dilakukan saat terjadi masalah, tetapi harus menjadi kebiasaan berkesinambungan yang mendorong pejabat untuk terus memperbaiki diri dan tidak terjebak dalam arogansi kekuasaan. Pejabat publik semestinya menjadi contoh dalam menjaga kesantunan, kejujuran, dan tanggung jawab sosial, karena perilaku mereka diawasi dan dicontoh oleh masyarakat luas. Ketika kontrol diri dilepaskan, maka kerusakan tidak hanya menimpa individu, tetapi juga melemahkan kepercayaan rakyat terhadap institusi negara. Oleh sebab itu, menjaga kesadaran moral, etika, dan perilaku yang terpuji harus menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas seorang pemimpin yang amanah.



“Alasan. Jadi anggota DPR banyak alasan.”

Suryo
selalu menjawab,
susah mendengar
jadi dianggap
suka banyak
alasan.
Bagaimana
tanggapan
Anda?

Salsa:

Menurut saya, makna dari penyampaian Roy Suryo setiap kali ditanya atau dikritik, jawabannya selalu terkesan tidak mendengar tanpa kejelasan atau kesannya dinilai menghindari. Tidak heran jika rakyat menilai bahwa dirinya hanya “ngeles”. Jika terus-terusan kesannya akan menjadi defensive atau menghindari rakyat bisa saja kehilangan kepercayaan. Singkatnya, kalau dirasa benar silakan tunjukkan bukti, jika hanya bergulat pada alasan klasik siap-siap saja dikritik.

Ninda:

Ini aku setuju banget karena waktu itu tuh aku liat yang acara tentang ijazah Jokowi yang palsu itu antara Roy Suryo dengan Yakub Hasibuan. Itu tuh kaya aku yang ngeliat aja tuh gregetan karena kaya si Yakubnya menjelaskan perspektif dia kenapa dia membela Pak Jokowi karena dia sebagai pengacaranya kan ya pasti dia membela dengan dalih-dalih dan alasannya yang memang sudah dia siapkan sebelumnya pun alasan itu menurutku rasional tapi Roy Suryo itu tuh kaya ngomong terus gitu kaya seolah-olah tuh ga memberikan kesempatan pada si Yakub. Ketika si Ykub diberi kesempatan ngomong pun dia cuma ngomong beberapa detik terus abis itu dipotong lagi gitu loh jadi kaya kesannya itu bukan diskusi tapi kaya debat gitu loh, gamau kalah soalnya dianya.

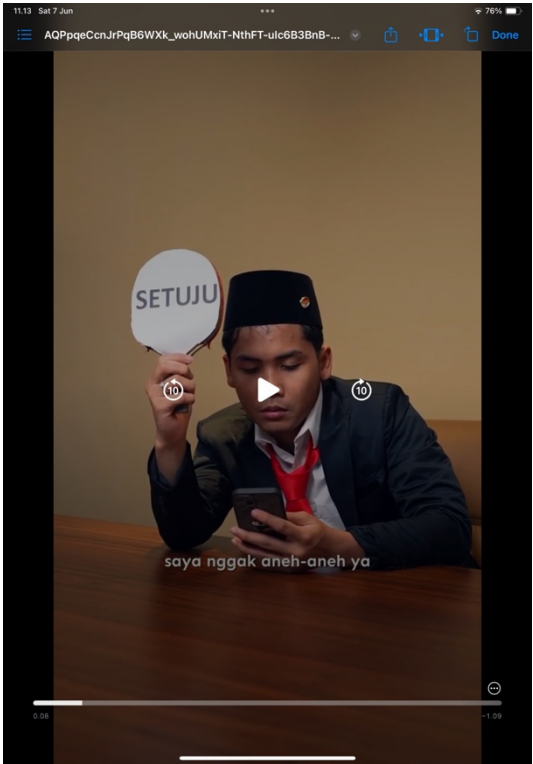
Dandi:

Sering banyak alesan ya, rakyat udah capek banget denger alesan, kan yang dibutuhin tanggung jawab sama kerja nyata ya, jadi kalo untuk sindiran susah mendengar itu nyindir gaya pejabat yang ngeles

			mulu kalo ditagih janji. Rangga: Scene 5 ini kan sebenarnya lanjutan dari scene 4 sebenarnya, koonteksnya makan tad ikan. Cuma sarkasmenya yang disampaikan kiky ini adalah ya banyak alasan, anggota dpr banyak alasan lah gitu kan. Ya sebenarnya itu memang ciri khas orang politisi ya. Maksudnya memang, kiky tuh mau menyampaikan bahwa memang notabenenya politisi itu kan seperti itu. Ketika dia membuat suatu hal segala macam dia akan menggunakan banyak alasan gitu untuk menepis berbagai isu dan tuduhan maka retorika politisi disitu diuji seperti itu, maka kiky disitu menyampaikan ya kita tetep tetep stay dengan tuduha kita dan jangan terlalu percaya dengan retorika seorang politisi gitu. Lugas: Oke, tadi Kiky Saputri hendak memberikan satu tanggapan yang serius terhadap keluputan yang diperagakan oleh Roy Surya. Tapi aku rasa ada suatu istilah yang berkaitan dengan DPR selalu banyak alasan. Nah sebetulnya kalau kita mencoba untuk melihat secara serius, ini adalah problem yang sudah begitu menggejala ya. Artinya reaksi-reaksi yang diberikan oleh anggota DPR sebagai pemilik otoritas seringkali banyak dalih. Nah biasanya orang-orang yang sering mengutarakan banyak alasan dan sebagainya, dalih demi dalih dan sebagainya itu menandakan ketidakkonsistensian dia di dalam berpikir. Apa maksudnya bahwa barangkali Roy Surya lupa mereka itu dipilih oleh rakyat, artinya dia mesti menghendaki seluruh kepentingan masyarakat, bukan dengan atau
--	--	--	--

		merespon dengan alasan-alasan. Jadi aku rasa apa yang disampaikan oleh kiky dengan nada keseriusan meskipun dibingkai dengan kelakar, tapi kayaknya Roy Surya tidak memahami bahwa itu sebagai suatu situasi yang konkret, pandangan masyarakat terhadap DPR yang selalu saja penuh dengan dalih dan alasan. Nah itu buruk sebagai mereka yang memiliki wewenang untuk membentuk, untuk mengatur kehidupan masyarakat agar jauh lebih baik. Karena di posisi dia sebagai politisi dia harusnya mengutamakan atau mengutamakan moral sebagai presentasi di publik. Kuswanto: Saya pribadi menghargai kritik, termasuk yang disampaikan dalam bentuk komedi seperti yang dibawakan Mbak Kiky. Itu bagian dari demokrasi. Tapi saya juga ingin mengajak masyarakat untuk tidak menggeneralisasi. Banyak dari kami yang bekerja diam-diam, turun ke lapangan, tapi kadang memang kerja kami tidak selalu terekspos di media. Totok: Menangkapi Kiki saputi tentang Roy Suryo selalu menjawab susah mendengar. Jadi dianggap suka banyak alasan. Dalam hal ini kita tahu anggota DPRD itu bukan pengguna anggaran ya. Sebagai pengawas ya. Kalau pengguna anggaran itu adalah eksekutif. Eksekutif bupati, jajarannya, wali kota, jajarannya. Kalau DPR RI, presiden, jajarannya itu pengguna anggaran. Kalau kita ketika ada aspirasi kita menindaklanjuti kepada eksekutif. Eksekutif lah yang akan memutuskan apakah aspirasi yang diberi seorang
--	--	--

		anggota DPRD ini sesuai dengan program daripada APBD yang akan datang atau tidak. Apakah sesuai dengan aturan yang ada atau tidak. Kalau sesuai dengan aturan mungkin akan ditindaklanjuti. Tetapi kalau aspirasinya ini tidak sesuai dengan ketentuan hukum tentunya akan dipending. Itu ya. Terima kasih. Siswanto: Bagaimanapun situasi dan kondisi yang dihadapi, seorang pejabat publik harus senantiasa melakukan introspeksi dan menjaga kontrol diri agar tidak terjerumus dalam sikap lalai, arogan, atau terlena oleh kekuasaan dan fasilitas yang melekat pada jabatannya. Introspeksi merupakan proses refleksi batin yang penting untuk menilai kembali apakah tindakan, keputusan, dan sikap yang diambil sudah sesuai dengan nilai-nilai moral, etika, dan amanah yang dipercayakan oleh rakyat. Dalam dunia yang terus bergerak cepat, dengan tekanan sosial dan politik yang beragam, pejabat publik perlu memiliki ketahanan mental dan kedewasaan sikap agar tetap konsisten menjaga komitmen pelayanan kepada masyarakat. Tanpa proses kontrol diri yang kuat, sangat mudah bagi seorang pejabat untuk terbawa arus popularitas, kekuasaan, atau godaan materi yang pada akhirnya menjauhkan mereka dari tujuan mulia pengabdian. Oleh karena itu, kepekaan dan responsivitas terhadap dinamika sosial di lingkungan masyarakat juga menjadi kunci. Seorang pemimpin yang baik harus mampu membaca tanda-tanda zaman, memahami keresahan rakyat, dan merespons secara cepat serta bijak terhadap perubahan atau krisis yang terjadi.
--	--	---

			Ketika introspeksi, kontrol diri, kepekaan sosial, dan kemampuan merespons digabungkan, maka lahirlah sosok pemimpin yang tidak hanya cakap secara administratif, tetapi juga berjiwa luhur dan dihormati karena keteladanannya.
6	 <i>“Pusing ga sih jadi anggota dewan?” “jujur aja kalau saya nggak ya karena selama saya nggak aneh-aneh ya itu kemungkinan saya dipecat mendekati zero” (sambil memperagakan main hp ketika sedang rapat dan seolah tidak fokus)</i>	Sarkasme pada pejabat kalau aneh-aneh nanti difitnah, kayak dituduh korupsi. Bagaimana tanggapan Anda?	Salsa: Menurut saya, masyarakat menilai kinerja DPR melalui realita yang ada di lapangan, sebagai contoh kerusakan jalanan di suatu daerah yang mungkin dirasa oleh masyarakat pihak pemerintah tidak cekatan dalam menanggapi masalah tersebut. Seperti yang kita tahu, bahwa DPR disini berfungsi untuk menyuarakan rakyat, maka rakyat disini merasa bahwa hak perlu dipenuhi. Ninda: Aku setuju karena pejabat itu kan orang yang terlihat gitu di masyarakat. Seorang publik figure gitu. Jadi apapun yang dia lakukan itu akan menjadi perhatian bagi masyarakat apalagi kalo yang dia lakukan atau gerak-geriknya itu aneh, pasti akan menimbulkan kecurigaan di masyarakat. Entah itu curiga dia melakukan korupsi atau dia melakukan apapun itu yang basicnya itu sesuatu hal yang negatif. Dandi: Ini sih keren ya, frasa aneh-aneh di sini kan bisa dimaknai beragam oleh penonton, oleh audiens. Sehingga Bintang Emon ini membiarkan audiens menafsirkan sendiri frasa aneh-aneh ini. Jadi sarkasme yang ini menurut aku sangat on point ya. Jadi kayak ketika sarkasmenya dilemparkan, penonton diajak berpikir bahwasanya apakah benar aneh-

		aneh ini, diksi aneh-aneh ini mengarah ke yang negatif atau bahkan positif. Itu kan tergantung penafsiran masing-masing audiens ya. Rangga: Kalau pendapat dari aku mungkin Berarti ini komentar ya Oh masih komentar ya, berarti ini komentar aku Untuk bintang Bintang Emon ya untuk yang bagian pertama nih Secara visual dia dapet Apa lagi yang pas dia ngomong kayak Apa sih Kerja untuk Rakyat lah gini-gini Terus Ada visual tuh Dia nunjukin kertas tuh Padahal dia lagi main HP segala macam Jadi kan itu kan Apa ya, menurut aku itu sebagai Interpretasi Dia Melihat Kondisi Anggota Dewan Kayak gitu Yang notabene nya ketika ada sebuah forum Musyawarah Yaudah setuju-setuju aja Padahal gak ngerti substansi percakapan dalam forum itu apa Karena sibuk akan Dirinya sendiri Karena dia hanya mentingin dirinya sendiri Itu ditunjukkan oleh bintang Emon melalui dia main HP Terus tiba-tiba Angkat kertas setujuh Dan itu pun juga Dari segi Apa ya, tekstualnya sendiri Kan dia juga ngomong bahwa Menjatuhkan rakyat Indonesia Yang gimana Rekan saya Kolega saya Yang penuntun di perusahaan segala macam Itu adalah Juga rakyat Indonesia Kayak gitu kan Itu kan salah satu bentuk Sarkasme Yang merepresentasikan Bahwa orang Apa ya Bintang Emon tuh pengen menyampaikan Sebuah pesan Dimana Yang disejahterakan itu Juga adalah Apa ya, para pengusaha Teman-teman di sekitar Segala macam Ini putismenya lah Kayak gitu Jadi ya Sarkasme itu ke arah sana Kayak gitu Itu menurut aku ya Dan Ya itu memang adalah Realiti yang terjadi di Perpolitikan
--	--	---

		ya Yang ada di Indonesia Terutama dalam lembaga Legislatif kayak gitu Lugas: Yang diperagakan oleh Bintang Emon itu mencerminkan situasi anggota parlemen kita atau anggota-anggota DPR kita yang selalu ikut arus. Artinya dia tidak mencoba untuk pemberontak ketika dalam keadaan statis atau keadaan stagnan, yang disebut saja pada titik tertentu pembicaraan tentang masyarakat tidak lagi menjadi prioritas. Artinya dia patuh, dia tegak lurus mungkin terhadap kepentingan partai, terhadap kepentingan komplotan-komplotan parlemen yang tidak mengindahkan lagi-lagi kepentingan masyarakat. Nah itu juga seringkali kita ketahui bahwa mereka-mereka yang tidak mengikuti arus maka dia tidak akan mendapatkan apa-apa. Nah dalam konteks ini, dalam konteksnya Bintang Emon ini, DPR-DPR atau anggota-anggota DPR yang tidak manut terhadap, yang menguasai parlemen atau disebut saja partai-partai yang menguasai parlemen, maka dia akan tidak mendapatkan proyek, barangkali juga dituduh diwacanakan buruk, diwacanakan negatif, sehingga seolah-olah mau tidak mau anggota-anggota DPR ini harus tegak lurus terhadap mayoritas pak anggota yang ada di DPR. Itu buruk sebagai semiotik karena tidak mencerminkan apa itu kedaulatan rakyat. Kuswanto: Ya, kalau anggota Dewan, anggota DPRD, khususnya di Kabupaten, ini kan sudah ada regulasinya, sudah ada aturannya. Jadi, kalau dikatakan aneh-aneh, aneh-aneh yang bagaimana? Jadi, kita sudah diatur oleh aturan yang mengikat.
--	--	--

		Selama kita melakukan aturan yang sesuai dengan perundang-undangannya yg ada, ya kita tetap enjoy aja dan aman-aman saja. Begitu mungkin saran saya. Terima kasih. Totok: Menurut pendat saya, masalah pusing enggak sih anggota Dewan. Dalam hal ini kita kembalikan pada tegeling yang ada. Bahasanya setiap anggota Dewan seluruh Indonesia itu sudah diikat melalui peraturan DPRD. Yaitu yang namanya peraturan tentang kode etik. Jadi setiap anggota Dewan, setiap kabupaten, kota, maupun DPR Ri itu sudah ada kode etiknya. Contoh kalau di DPRD kabupaten A. Katakanlah dalam peraturan DPRD itu menyatakan bahwasannya jika anggota DPRD tidak ikut paripurna selama 5 kali berturut-turut tanpa izin maka besar Di PAW. Ini salah satu contoh. Suatu ketika DPRD tersebut benar tidak ikut paripurna selama 5 kali berturut-turut tanpa izin berarti potensinya aneh-aneh itu aja. Berarti melawan aturan mesti akan Di PAW. Itu salah satu contoh. Contoh yang lain di dalam partai. Setiap anggota DPRD se-Indonesia, setiap partai mesti punya anggaran dasar, anggaran rumah tangga sendiri-sendiri. Suatu ketika anggota DPRD pada partai si A tidak mengindakan anggaran dasar, anggaran rumah tangga berarti dia kan aneh-aneh. Mesti indikatornya akan Di PAW sangat dimungkinkan. Jadi masalah aneh-aneh ini dilihat daripada konteksnya. Ketika dia melawan daripada regulasi dari aturan DPRD maupun partai, mesti akan konsekuensinya mesti dapat sanksi berupa PAW atau lain sebagainya. Sementara itu dari saya, terima
--	--	--

		kasih. Siswanto: Hidup di tengah masyarakat menuntut kita untuk mampu memahami dan menyesuaikan diri dengan karakter serta budaya yang berlaku, karena tanpa kemampuan tersebut, seseorang akan mudah dianggap aneh atau menyimpang dari norma sosial yang telah menjadi kesepakatan kolektif dalam komunitas. Hal ini menjadi semakin penting ketika seseorang menduduki posisi sebagai pejabat publik, seperti anggota DPRD, yang tidak hanya berperan dalam pengambilan keputusan politik, tetapi juga menjadi cerminan dan representasi langsung dari masyarakat yang diwakilinya. Oleh karena itu, pola hidup dan gaya hidup seorang pejabat harus selaras dengan nilai-nilai dan kultur masyarakat setempat, bukan sekadar untuk menjaga citra, tetapi sebagai bentuk nyata dari empati, kepekaan sosial, dan tanggung jawab moral terhadap rakyat yang telah memberikan mandatnya. Ketika seorang pejabat mempertontonkan gaya hidup mewah di tengah kondisi masyarakat yang sederhana atau penuh keterbatasan, maka akan muncul jarak sosial yang merusak kepercayaan dan legitimasi publik terhadapnya. Sebaliknya, ketika gaya hidup yang ditampilkan mencerminkan kesederhanaan, kedekatan dengan rakyat, serta penghargaan terhadap budaya lokal, maka kehadirannya akan diterima, dihormati, bahkan dijadikan teladan. Keselarasan antara perilaku pejabat dan nilai-nilai masyarakat inilah yang akan memperkuat posisi dan peran seorang anggota DPRD, karena masyarakat tidak hanya menilai
--	--	--

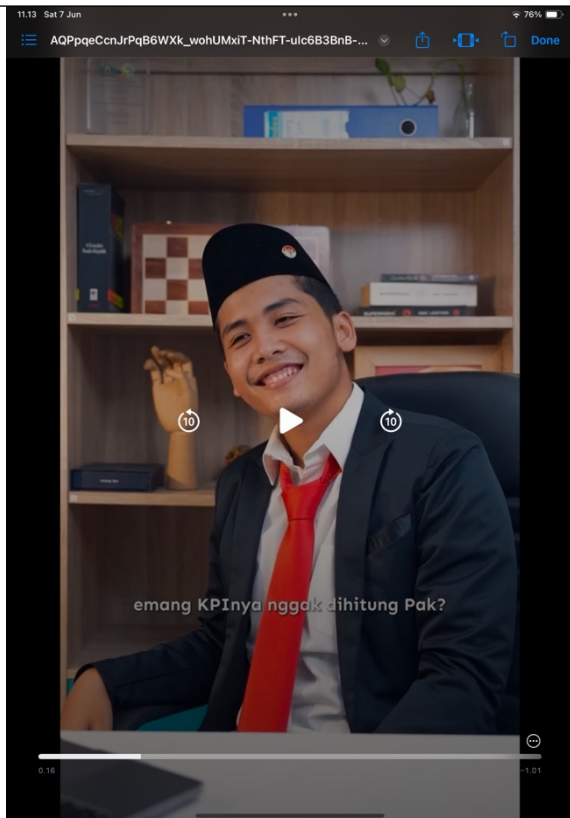
			dari kebijakan yang dihasilkan, tetapi juga dari keseharian dan sikap hidup yang ditunjukkan secara konsisten.
7	 <i>“Emang KPInya ga di hitung, pak?” “Jangan samain ini dengan kantor-kantor pada umumnya, kita berbeda. Lebih aneh kantor kamu. Kok ada sih orang absen tapi gajinya dipotong, aneh.”</i>	Sarkasme kalau DPR kerjanya tidak berbasis <i>key performance indicator</i> jadi aman tidak dipecat walaupun tidak perform. Bagaimana tanggapan Anda?	Salsa: baik selanjutnya untuk poin statement mengenai sarkasme kalau DPR kerjanya tidak berbasis KPI atau performance indicator jadi aman gak kalau dipecat? menurut saya KPI itu merupakan standar yang dipegang ataupun yang dimiliki oleh setiap posisi ataupun setiap jabatan yang ada di perusahaan pemerintahan atau apapun itu di suatu pekerjaan KPI ini menjadi standar pegangan bahwasannya nilai ataupun workflow dari individu tersebut sudah mencapai standar atau belum apabila DPR, Dewan Perwakilan Rakyat ini sendiri memiliki nilai KPI tapi tidak perform secara baik hal tersebut bisa dipertimbangkan apakah layak untuk dipecat atau tidak, apabila KPI tersebut merugikan pihak banyak, pihak masyarakat juga ataupun pihak-pihak yang bekerja sama dengan mereka itu bisa diimplementasikan ataupun direalisasikan sesuai dengan standarnya baiknya atau layaknya KPI tersebut dapat ditindak namun memang apabila KPI tersebut hanya berpengaruh terhadap individu tersebut patut untuk di reminder, diingatkan dan juga patut diberikan semacam warning point terhadap apa yang mereka lakukan, bahwasannya tidak sesuai dan juga tidak baik dilakukan hal tersebut bisa menjadi pegangan oleh figur ataupun masyarakat ataupun bahkan pemerintahan DPR itu sendiri dalam melakukan pekerjaan mereka sesuai dengan standar yang mereka telah miliki itu sendiri

		sebagai bentuk tanggung jawab yang mereka telah lakukan dan juga mereka buat komitmen terhadap peraturan seperti itu Ninda: Ini aku juga setuju karena mmm mungkin aku juga ya yang belum belajar banyak tentang DPR tapi aku sebagai orang awampun itu gatau gitu loh standart kerja DPR itu seperti apa. Maksudnya kan kalo di awal dia terpilih oke dia jadi DPR gitu, tapi dalam kerjanya, dalam dia melakukan tugasnya, standrt dia bisa dikatakan melakukan tugasnya kemudian hukuman apa yang diberikan ketika dia melakukan itu apa... itu kan kaya mungkin pengetahuan umum yang ga semua orang tahu bahkan aku pun gatau gitu. Bahkan mungkin karena dia kerjanya tidak berbasis key Performance Indicator ini jadinya pun dia ga perform itu ya aman-aman aja yang penting orang tau dia DPR, udah, selesai. Kan orang tau dia kerjanya cuma di kantor DPR/DPRD sana gitu. Dandi: Cukup pintar sih ini menurut aku di statementnya yang ini. Ya ini juga, ini mungkin yang paling paham dan paling relate orang-orang kantoran ya, kalau ini mungkin target marketnya audiens yang memahami bahwasanya memang suatu tempat kerja itu harus mencapai KPI. Tapi kalau kerja di DPR tidak ada target-target segala macem. Yang penting tidak aneh-aneh, kembali lagi ke diksi aneh-aneh tadi. Jadi memang cukup menarik sih ini untuk bahwasanya kalau kerja di DPR nggak perlu mencapai KPI. Rangga: Nah kalau yang Scene kedua itu
--	--	---

		kan Ya itu kan menunjukkan Kayak Kayak dia mencoba Si Bintang Emon kan Mencoba nge-compare Kalau di perusahaan lain kan Kalau Absen ya Nggak digaji gitu Cuma kalau di DPR tuh enggak Gitu-gitu Maksudnya Apa sih namanya Ya Sekalipun lu enggak kerja Lu enggak masuk Lu enggak masuk kantor ya Soalnya absen Ya lu tetap digaji Kayak gitu Jadi kan Sarkasme yang dibawa Di Bintang Emon ya Untuk di scene 2 ini Dia pengen Ngasih pesan bahwa Ya DPR itu kalau Sekalipun Sorry Sekalipun dia enggak kerja Ya dia enggak bakal ini Enggak bakal apa sih namanya Enggak bakal dipotong gajinya Kayak gitu Lugas: Ya apabila merujuk dari apa yang disarkaskan oleh Emon ini, lagi-lagi sepertinya anggota DPR itu tidak dinilai berdasarkan kemampuan ataupun kualitas dia dan seterusnya. Tapi kemudian dilanjutkan dengan apa tidak berpotensi untuk dipecat dan sebagainya. Sebetulnya aku rasa DPR atau anggota-anggota DPR atau politisi yang seperti itu, sekali lagi aku tekankan mereka barangkali tidak memahami betul fungsi dari setiap komisi yang ada di DPR yang sebetulnya itu telah disusun secara matang untuk menjaga marwah kedaulatan rakyat. Nah apabila sarkasma yang dibuat oleh Bintang Emon ini benar-benar terjadi, itu menandakan atau mengindikasikan kemunduran dalam demokrasi kita. Jadi aku rasa setiap individu yang merangkak masuk menjadi anggota parlemen, salah satu kunci agar dia layak dianggap sebagai DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat adalah mengutamakan moralitas sebagai pijakan dia berada dalam ruang
--	--	---

		publik termasuk mewakili kepentingan rakyat. Kuswanto: Ya, mungkin kalau tanggapan saya, kita menjadi anggota Dewan ini kan sudah menjadi wakil rakyat. Jadi, tugas kita jelas, aturan kita jelas, dan mekanisme juga jelas. Jadi, gaji pun juga sudah jelas, juga diatur melalui peraturan perundang-undangan. Kalau yang gaji yang lain-lain itu sudah di luar sistem, berarti tidak ada bagi kita. Mungkin itu tanggapan saya terkait dengan gaji yang kita peroleh sebagai anggota Dewan. Totok: Masalah gaji tidak dipotong walaupun dia enggak hadir. Itu memang menjadi hak seseorang, hak anggota DPRD. Anggota DPRD adalah merupakan wakil daerah rakyat. Wakil daerah rakyat sudah ada ketentuannya di dalam undang-undang. Yaitu pemerintahan, undang-undang pemerintahan daerah nomor 23 tahun 2024. Tentu namanya hak kalau dipotong gimana? Kan malah yang motong ini cenderung terjadi korupsi yang motong. Karena menjadi hak seseorang. Beda, kecuali anggota dewan Kalau dia enggak ikut KKLD, kunjungan kerja luar daerah atau kunjungan kerja dalam daerah. Seumpama enggak ikut memang enggak dapat uang, enggak dapat penambahan gaji. Kalau anggota dewan ikut KKLD, KKDD, kunjungan kerja dalam daerah atau kunjungan kerja luar daerah. Kalau ikut tentu dapat uang saku, uang transport, uang dan lain sebagainya. Konsepsi seperti itu. Jadi agak dibedakan antara gaji dengan pendapatan yang lain seperti kunker dan lain sebagainya. Kalau gaji, hak
--	--	---

			seseorang yang tidak bisa di otak-atik. Tetapi kalau masalah kunker, ketika seseorang enggak ikut jangan dapat apa-apa. Itu ya. Terima kasih. Siswanto: Sebagai anggota DPR, apa pun situasi dan kondisi yang sedang dihadapi, kewajiban utama yang tidak bisa ditawar adalah bekerja secara maksimal dalam menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat. Jabatan tersebut bukan sekadar posisi formal atau prestise politik, melainkan amanah yang diberikan secara langsung oleh masyarakat melalui proses demokrasi yang sah. Oleh karena itu, setiap keputusan, tindakan, dan kebijakan yang diambil harus benar-benar mencerminkan kepentingan dan kebutuhan rakyat banyak. Dalam berbagai situasi baik dalam tekanan politik, keterbatasan anggaran, maupun tantangan pribadi seorang anggota DPR dituntut untuk tetap fokus dan konsisten dalam memperjuangkan aspirasi masyarakat, menyerap kebutuhan dari lapisan bawah, serta mengawal program-program pembangunan agar berjalan sesuai dengan harapan rakyat. Kehadiran mereka di parlemen harus membawa arti dan dampak nyata, bukan hanya sebagai simbol representasi, tetapi sebagai motor perubahan dan penggerak kesejahteraan. Dengan demikian, seorang anggota DPR tidak hanya bekerja untuk menjalankan prosedur atau formalitas, tetapi sungguh-sungguh menjadi agen perubahan yang menghadirkan manfaat konkret dan bermakna bagi masyarakat luas yang telah memberikan mandatnya.
8			



“Emang kerjanya ngapain sih pak?” “salah satunya ya, jadi kita ini membuat peraturan untuk menyejahterakan rakyat Indonesia tapi FYI sebelum gua dimarah-marahin itu saya ingetin dulu ya, saya, keluarga saya, CS CS pejabat saya, CS pengusaha saya dan lain-lainnya itu juga bagian dari rakyat Indonesia. Jadi bukan saya ngebela mereka, no, mereka juga rakyat tapi pakai gelang fast track aja.”

Kerjaan DPR beralasan membuat aturan untuk rakyat padahal kenyataannya hanya mementingkan kepentingan pribadi.

Bagaimana tanggapan Anda?

Salsa:

selanjutnya untuk poin ketiga mengenai kerjaan DPR beralasan membuat aturan untuk rakyat padahal kenyataannya hanya mementingkan kepentingan pribadi menurut saya, saya mendukung statement tersebut namun terdapat pertimbangan saya mendukung mengapa karena pada nyatanya di era sekarang ini memang DPR ini sering mementingkan kepentingan pribadi seperti membeli ataupun memiliki ataupun bahkan mengambil hal-hal ataupun hak-hak yang tidak seharusnya mereka dapatkan dikarenakan hal tersebut menjadi hak untuk para masyarakat umum ataupun orang-orang umum seperti itu namun dikarenakan jabatan ataupun posisi mereka yang mempunyai power, mereka dapat mengambil hal tersebut hal tersebut bisa menjadi pertimbangan ataupun menjadi asosiasi untuk dipertimbangkan bahwasannya tidak sepenuhnya apa yang mereka lakukan itu benar dan juga menguntungkan karena pada nyatanya hal tersebut sangat merugikan dan juga menjatuhkan ekspetasi dan juga kebutuhan masyarakat umum oleh karena itu perlu dilakukan tindakan ataupun penguatan responsibility terhadap apa yang telah mereka lakukan dan juga impact yang mereka dapatkan setelah mereka melakukan hal tersebut ataupun kita lihat dari kacamata masyarakat umum ini sendiri mengenai dampak yang mereka dapatkan sejauh ini apakah sudah sangat merugikan ataupun belum dilihat dari kasusnya apabila mereka mementingkan kepentingan pribadi untuk hal-hal yang negatif itu sangat merugikan seperti korupsi, intoleransi ataupun hal-hal semacamnya dan hal tersebut sangat merugikan dan juga tidak

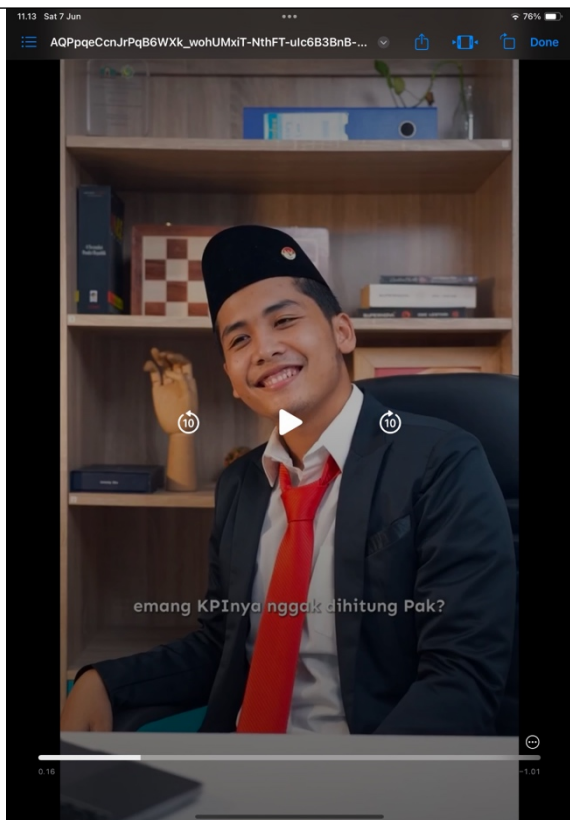
		baik untuk dilakukan dalam jangka panjang terutama untuk kepentingan bangsa dan negara Ninda: Ini aku setuju banget di UU Ketenagakerjaan yang diganti sama UU Cipta Kerja. Itu jujur banyak banget hal yang merugikan masyarakat kaya contohnya, ah yang pertama harus digarisbawahi itu isi UU Cipta Kerja itu banyak banget kalo aku ga salah sekitar dua ribuan lembar gitu. Tapi itu kaya semuanya diatur disitu gitu. Maksudnya kalo kita bandingkan sama UU Ketenagakerjaan yang jelas gitu, maksudnya dia berfokus kepada ketenagakerjaan terus di ganti dengan UU Cipta Kerja yang isinya banyak banget bahkan skripsiku kemarin kan tentang (?) itu hukumannya pake UU Cipta Kerja yang personally aku juga bingung gitu kok dia larinya ke UU Cipta Kerja, tapi nyatanya seperti itu. Terus yang paling aku tidak setuju itu perihal pekerja outsourcing atau pekerja lepas. Jadi kalo di UU yang lama itu pekerja outsourcing cuma boleh dilakukan oleh office boy, satpam sama apa gitu pokoknya cuma lima bidang. Nah, tapi sekarang di UU yang baru itu semua pekerjaan bisa di outsourcing-kan itu kan kaya ya ampun kasian pekerjanya dong kaya misalnya kalo aku ga salah ya, aturannya itu misal bukan di lima bidang itu misal contohnya guru deh, guru itu nanti pas udah di tahun tertentu misalnya di lima tahun itu bisa diangkat menjadi guru tetap, tapi di UU yang baru dimana semua bidang bisa di outsourcing-kan, jadinya pun dia udah kerja 10 tahun 20 tahun ga harus diangkat jadi pegawai tetap bisa tetep outsourcing selama dia hidup, itu kan sangat merugikan
--	--	--

		masyarakat gitu loh. Dandi: Untuk pertanyaan ketiga, gue setuju sih karena pada dasarnya regulator-regulator di Dewan Perwakilan Rakyat pada kenyataannya seringkali tidak, produk hukumnya tidak populis gitu. Tidak yang memang dibutuhkan oleh masyarakat gitu. Apalagi sekarang sering ada produk hukum yang hanya mementingkan yang hanya mementingkan kepentingan-kepentingan suatu kelompok gitu. Jadi statementnya bintang emon yang ini gue rasa sangat mencerminkan apa yang terjadi di Indonesia menurut gue. Rangga: Nah kalau Nah Kalau yang di scene 3 ini Sama kayak yang di scene 1 ya Karena Menurut gue Gini sih sebenarnya Dalam konteks menjahterakan rakyat Tadi ya Aku ngomongin Jadi kan sebenarnya kan Ditanya tuh Tugas DPR itu apa Itu kan adalah membuat Sebuah peraturan perundang-undangan Yang berpihak pada rakyat yang pro pada rakyat Tetapi Bintang Emon di scene ini Menelipkan bahwa Para CS-CS nya Keluarganya Pengusaha Blablabla segala macam Itu bagian dari rakyat Indonesia Yang artinya Bintang Emon itu mencoba Menginterpretasi Dia menginterpretasikan bahwa Kerjanya para DPR ini Menjahterakan rakyat Yang dimana rakyat Yang didahulukan itu adalah Rakyat yang Dari keluarganya Circle-nya dia Para pengusaha gitu-gitu Segala macam Itu merupakan Satu-satu bentuk Interpretasi sarkasma Bintang Emon Terhadap realita Yang dilakukan oleh DPR RI Sekarang ini Seperti itu
--	--	--

		Lugas: Oke perihal itu DPR membuat aturan tapi pada kenyataannya dia tetap mementingkan pribadi atau kelompoknya atau keluarganya itu mengindikasikan bahwa mereka tidak mencirikan semangat reformasi. Bahwa dulu ketika pada zaman Orde Baru di pemerintahannya Soeharto praktek-praktek kolusi korupsi nepotisme atau KKN itu merebak dan semangat reformasi itu hendak mengubah itu, hendak menghancurkan praktek-praktek KKN yang justru mementingkan kepentingan pribadi, kelompok ataupun sana keluarganya. Jadi aku rasa merespon hal ini memang seringkali ya DPR itu hanya atau anggota-anggota DPR itu menggunakan kekuasaan dia atau kewenangan dia, otoritas dia untuk mungkin memperkaya diri ya untuk menebalkan kantong mereka sendiri dan sana keluarganya dan sebagainya. Nah ini lagi-lagi praktek bernegara yang tidak paham atau bahkan kita katakan sebagai bengis karena mereka memiliki otoritas tapi sekali lagi tidak diarahkan tidak memprioritaskan penderitaan yang dirasakan oleh masyarakat pada umumnya. Jadi bintang Emon ini sepertinya sedang mengajak kita untuk merenungi bahwa seringkali DPR-DPR yang kita pilih dalam 5 tahun sekali itu tidak lagi mementingkan kehidupan kita sebagai masyarakat sipil. Jadi kurasa ke depan mungkin kita perlulah untuk merayakan pemilu dengan diam saja di rumah tanpa mencoblos anggota-anggota parlemen yang kita ketahui selalu berkontribusi pada penderitaan kehidupan kita. Kuswanto:
--	--	---

		terima kasih terkait dengan kebijakan yang anggota Dewan. Kebijakan di sini kan regulasinya adalah membuat peraturan perundang-undangan. Jadi, kalau di Kabupaten namanya adalah peraturan daerah. Ya, peraturan daerah dibuat untuk kepentingan masyarakat yang ada di Kabupaten kediri. Sehingga semua regulasinya ya berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Mungkin itu tanggapan saya sebagai pembuat kebijakan atau pembuat peraturan. Totok: Kita lihat ya, Fungsi daripada DPRD. Fungsi DPRD adalah fungsi legislasi, fungsi budgeting, maupun fungsi pengawasan. Ketika DPRD membuat aturan, itu adalah fungsi legislasi. Kalau legislasi, tentu membuat produk legislasi berubah produk apa. Tentu harus orientasinya pada fokusnya ya. Contoh, produk masalah kancan hukum. Tentu pada masyarakat yang ada di daerah tersebut. Otomatis harus mementingkan kepentingan masyarakat daripada kepentingan kita. Kalau kita membuat aturan untuk kepentingan pribadi gimana caranya? Belum ada. Karena produk daripada aturan itu adalah legislasi. Untuk DPRD, Kabupaten, Kota itu membuat suatu perda. Tetapi ketika DPRRI itu membuat undang-undang. Jadi untuk mempertahankan kepentingan pribadi rasanya sangat kecil sekali. Terima kasih. Siswanto: Salah satu fungsi utama seorang anggota DPR adalah membuat peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan hukum dan arah kebijakan publik di berbagai bidang kehidupan. Namun, peraturan tersebut tidak boleh
--	--	--

			dibuat secara sembarangan atau hanya berpihak kepada kelompok tertentu; melainkan harus benar-benar bersifat inklusif, adil, dan menjunjung tinggi prinsip kesetaraan bagi seluruh elemen masyarakat tanpa memandang latar belakang suku, agama, ras, atau golongan (SARA). Ketika sebuah regulasi hanya menguntungkan kelompok sendiri, keluarga, atau kalangan tertentu, maka nilai keadilan dalam demokrasi menjadi ternodai, dan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif pun akan merosot. Oleh karena itu, anggota DPR dituntut untuk memiliki integritas, independensi, dan keberanian moral dalam menyusun kebijakan yang berpihak pada kepentingan umum. Peraturan yang baik adalah yang mampu menjawab kebutuhan riil masyarakat, menyelesaikan masalah sosial, meningkatkan kesejahteraan, serta menjamin hak-hak dasar warga negara secara merata. Proses legislasi pun harus transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi publik agar kebijakan yang dihasilkan benar-benar mencerminkan suara rakyat, bukan hanya suara elite. Dengan begitu, keberadaan anggota DPR bukan hanya sebagai pembuat aturan di atas kertas, tetapi juga sebagai pengawal keadilan sosial yang mampu memberikan dampak positif dan manfaat luas bagi seluruh lapisan masyarakat.
9		Sarkasme kalau udah dipilih lupa rakyat. Bagaimana tanggapan	Salsa: Menurut saya, sarkasme tersebut relate dengan yang ada di masyarakat. Seperti contoh, ketika seorang pejabat yang sedang mencalonkan dirinya sebagai wakil daerah pastinya membutuhkan



“Di pemilu kemarin katanya mau belain kita semua, bohong nih..” “terus kalau saya nggak ngelakuin kamu mau apa?”

Anda?

support dari rakyat yang ada di daerahnya. Bentuk mereka dalam mencari dukungan tersebut adalah dengan melakukan kampanye dengan cara blusukan yang diharapkan oleh rakyat ketika mereka terpilih menjadi wakil rakyat, janji yang diberikan atas perubahan harus dilaksanakan. Tetapi, realitanya tidak semua calon menepati janjinya untuk melaksanakan apa yang telah dijanjikan. Alhasil, rakyat merasa janji yang telah diberikan hanya janji manis semata.

Ninda:

Ini aku juga setuju karena yang pertama itu pasti dia kalo udah kepilih itu ada rasa keberhasilan atas apa yang dia harapkan selama ini. Tapi sifat dasar manusia yang kalo dia udah mencapai sesuatu itu kadang dia lupa sama akarnya gitu, lupa sama gimana sih caranya dia bisa sampai di titik ini gitu. Sebenarnya itu manusiawi tapi kao seorang yang udah dipilih sama rakyat terus dia lupa sama rakyat itu kaya kacang lupa sama kulitnya. Maksudnya dia dipilih kan berarti dia membawa amanah dan tanggung jawab yang rakyat berikan gitu loh sama dia terus kalo misalnya dia tiba-tiba lupa sama tanggung jawab yang seharusnya kan berarti itu bisa dibilang mendzolimi rakyat ya.

Dandi:

Ya benar ini juga satu hal yang lagi-lagi valid gitu karena memang pada kenyataannya semua Dewan Perwakilan Rakyat yang mostly gitu, 80% of it selalu melupakan rakyat yang diwakilinya gitu. Sehingga tidak pernah boro-boro untuk mewakilkan, menyampaikan aspirasi masyarakat. Tapi untuk hadir rapat aja sepertinya banyak

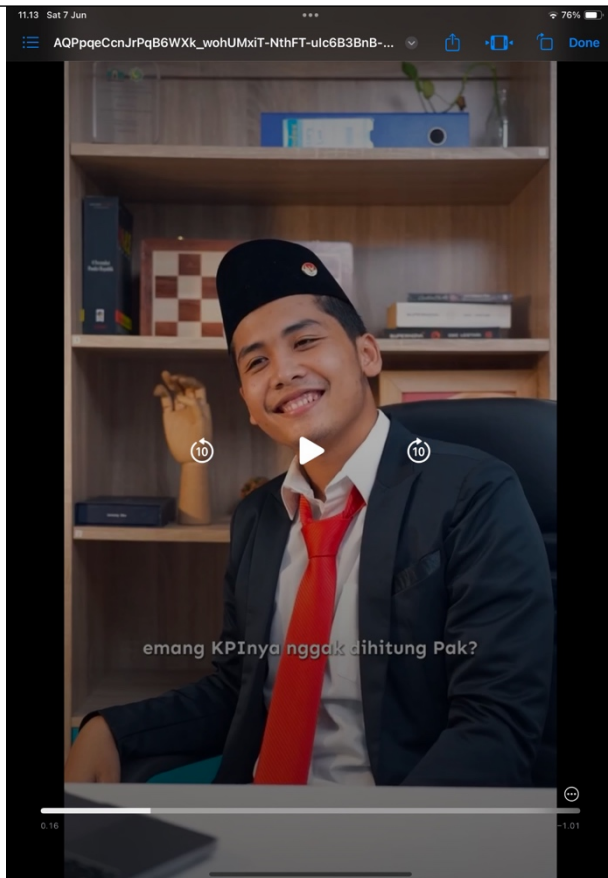
		yang sering bolos gitu. Rangga: Nah terus yang di scene 4 ya Jadi kan di scene 4 Ini kan maksudnya Kayak Ya kalau misalnya Di awal kampanye Janji mempro rakyat ngebela keadilan rakyat lah gitu-gitu segala macem Terus Bintang Emon ngomongin Kalau misalnya Saya Tidak ngelakuin Ya terus kenapa Berarti kan Ini Ngasih pengumuman ke kita ya Bahwa Wanjing Berarti kan DPR ini kan Kalau dia udah jadi Udah dia lupa rakyat gitu Jadi Sekalipun misalnya dia Nggak menuhi janjinya Ini dia nggak paham Kenapa-kenapa Artinya apa Artinya bahwa Anggota DPR ini Ataupun orang-orang yang Akhirnya mendapatkan jabatan Sebagai seorang legislatif itu Dia mempunyai kekuasaan Untuk Mengontrol Publik Disitu Karena ketika ada publik yang bertentangan Kepada dia Jadi bisa ngontrol Ya makanya Bintang Emon disini Menyampaikan sebuah pesan Kalau misalnya Gua nggak ngelakuin Janji-janji gua Ya emang Kenapa Berarti emang kenapa Dia merasa dia punya power Disana Memang artinya seperti itu Dan Memang benar bahwa Aku nggak Ngomong semua anggota DPR Seperti itu Cuma memang Notabene nya Kita melihat Mayoritas anggota DPR Seperti itu Kayak gitu Gitu sih Kalau pendapat aku Dan Memang benar Apa yang disampaikan Dengan bintang Emon ini Kayak gitu Lugas: Ya di akhir video itu kan bintang Emon tanpa menggerakkan tangannya, ya semacam secara simbol dia menegaskan kalau bahasa Jawanya itu itaitu, ingainih atau kurang ajar terhadap rakyat
--	--	--

		tentu saja anggota DPR tidak mungkin melakukan itu di publik. Tetapi dalam ruang-ruang tertentu, dalam rapat-rapat tertentu barangkali yang membicarakan konteks kepentingan rakyat dalam rangka perumusan undang-undang dan sebagainya mereka memperagakan itu. Dia menari-nari di antara penderitaan yang kita rasakan, kesejahteraan yang sangat sulit kita dapatkan, apalagi membicarakan keadilan. Jadi barangkali DPR hari ini, bukan hari ini saja ya, sepertinya dalam sejarah politik hukum kita DPR seringkali menjadi musuh tersembunyi di dalam kita berupaya untuk menjadi warga negara yang mengidamkan nuansa-nuansa keadilan, kesejahteraan dan sebagainya. DPR adalah musuh tersembunyi bagi rakyat. Kuswanto: Tanggapan saya kalau terkait dengan lupa. Anggota Dewan ini kan kalau dulu hanya satu nama saja. Tapi kalau sudah menjadi anggota Dewan, yang diwakili ini sudah sekabupaten kediri. Jadi, terlepas dari lupa dan tidak itu tergantung dari orangnya. Senyampang kita bekerja untuk kepentingan masyarakat, untuk kepentingan warga dan kediri, ya semuanya tidak ada yang kita lupakan. Karena kebijakan kita hanya membuat peraturan. Kalau masalah lupa, saya rasa tidak lah. Mungkin itu tanggapan saya. Totok: Setelah dipilih oleh rakyat itu tergantung. Tergantung daripada satu, kontrak politik, tergantung daripada si Dewannya tersebut. Karena yang milih itu banyak orang tentunya kalau ngopeni (memberikan perhatian) orang
--	--	--

		buanyak tentunya juga keberatan. Berapa sih gaji Dewan kan juga terbatas. Apalagi pemilihnya itu banyak untuk kabupaten saja mungkin ribuan. Untuk provinsi saja juga ribuan. Untuk DPR RI tentunya juga ratusan ribu. Apakah mungkin satu orang harus diopeni? Mungkin kader-kadernya yang inti-inti saja mungkin yang diopeni. Karena sangking banyaknya dari konstituen. Oleh karena itu seumpamanya tergantung pada oknum daripada DPRD itu. Dan ingat berangkatnya DPRD juga gratis. Mesti juga costnya tinggi ya. Dalam arti kata mungkin setiap pemilih itu juga ada transaksionalnya ya. Oleh karena itu kembali lagi dulu kontrak politiknya gimana dengan pemilihnya? Dengan kadernya ya. Itu yang saya maksud dalam arti kata semuanya kalau ngopeni rakyat semuanya mungkin juga repot. Kecuali bergilir ya pemilihnya buanyak bergilir ini ada program yang rakyat A, ada program lagi rakyat B, program lagi rakyat C bergilir. Mungkin itu pun gak kempot kalo selama lima tahun kalau ada program-program berupa Itu yang makasih. Jadi DPRD selama lima tahun, selama setiap tahun ya itu mempunyai pokir ya. Pokir itu mesti kita turun ke lapangan. Menyalurkan aspirasi ya. Menyalurkan aspirasi daripada konstituen kita. Kalau bukan konstituen kita tentunya gak kita perjuangkan. Tetapi kalau konstituen kita kan sudah jelas. Kita sudah tahu. Mau apa itu kita perjuangkan. Mesti. Mesti kita gak lupa ya. Hanya saja harus bergiliran. Tahun ini kecamatan ini. Setahun yang akan datang kecamatan B. Yang selanjutnya kecamatan C dan seterusnya. Tentu
--	--	---

		itu. Mesti kita perjuangkan masalah aspirasinya karena kita juga punya pokir ya. Tentunya dalam pembuatan APBD itu juga salah satunya. Dari pokir-pokir dewan itu mesti diakomodir ya. Diakomodir oleh pemerintah daerah melalui RKPD. Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Kemudian selanjutnya ada pembahasan lagi namanya UAPPAS. Kebijakan Umum Anggaran atau Prioritas Plafon Anggaran Sementara. Dan di situlah kita akan memperjuangkan konstituen kita ya. Yang tadi yang sudah kita menyerap aspirasinya kita kawal. Sampai ke RAPD, sampai APBD, sampai selesai. Mungkin rupanya berupa ternak sapi. Mungkin berupa gedung-gedung untuk sekolah religi. Untuk RA, untuk MI, untuk jalan irigasi. Tempat-tempat ibadah, musyola, masjid dan lain sebagainya. Itu bergantung dari aspirasi dan insyaallah akan kita perjuangkan. Hanya saja harus bergiliran, kalau semua langsung serentak aspirasinya kita tamping tidak bisa karena semuanya anggaran terbatas. Siswanto: Bagaimanapun kondisinya, seorang anggota DPR memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk terus memperjuangkan kepentingan masyarakat secara adil dan menyeluruh, tanpa memandang latar belakang politik atau apakah individu tersebut pernah memilihnya atau tidak dalam pemilu. Setelah terpilih dan resmi menjabat sebagai wakil rakyat, mandat yang diemban tidak lagi terbatas pada segmen pemilih, melainkan meluas mencakup seluruh warga dalam wilayah representasinya. Prinsip dasar dalam demokrasi perwakilan
--	--	---

			adalah bahwa setiap anggota legislatif bertugas mengakomodasi kebutuhan, keluhan, dan aspirasi semua lapisan masyarakat, tanpa diskriminasi atau perlakuan istimewa. Jika perjuangan hanya diberikan kepada pendukung, maka hal tersebut mencederai esensi keadilan dan mengubah jabatan publik menjadi alat balas jasa politik, yang pada akhirnya merusak kepercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif. Oleh sebab itu, loyalitas seorang anggota DPR seharusnya tidak tertambat pada suara elektoral, melainkan pada sumpah jabatan dan tanggung jawab untuk mewujudkan keadilan sosial bagi semua warga. Inklusivitas dalam pelayanan dan keberpihakan pada kepentingan umum adalah ukuran sejati seorang wakil rakyat yang berintegritas, karena rakyat yang tidak memilih pun tetap memiliki hak yang setara untuk mendapatkan perhatian, perlindungan, dan pelayanan dari wakilnya di parlemen.
10		Double sarkasme, DPR suka main game ketika sedang rapat, dan ternyata itu bukan game malah judi online. Bagaimana	Salsa: terakhir mungkin terkait dengan poin atau statement terakhir mengenai anggota DPR yang suka main game ketika rapat namun ternyata lagi main judi online nah mungkin fenomena anggota DPR ini kedapatan bermain di gadget saat rapat sebenarnya ini sudah cukup memprihatinkan karena itu menunjukkan kurangnya (???) dan juga menjalankan tugas sebagai



“Dah saya mau main game candy crush lagi”

tanggapan
Anda?

wakil rakyat tapi ketika diketahui bahwa yang dimainkan bukan sekedar game lain kan judi online masalah ini menjadi jauh lebih serius dan juga mencerminkan krisis integritas hal ini bukan lagi soal etika tapi juga soal hukum dan juga moral, rapat DPR seharusnya menjadi ruang pengambilan keputusan penting yang menyangkut nasib jutaan rakyat namun jika di ruang yang seharusnya digunakan untuk memperjuangkan kepentingan publik justru digunakan untuk aktivitas yang ilegal nah hal tersebut menimbulkan rasa kepercayaan rakyat ini bisa percaya lagi atau tidak terhadap lembaga legislatif nah sarkasme publik ini terhadap kejadian ini bahkan sampai disebut sebagai double sarkasme nah hal tersebut karena bentuk protes yang lahir dari rasa muak ataupun kekecewaan masyarakat yang tidak lagi hanya merasa tidak didengarkan namun juga merasa dihina secara tidak langsung terhadap keputusan ataupun juga dengan perilaku yang mereka lakukan terutama di ruang yang lingkupnya menjadi representatif pendengaran ataupun ruang pendengaran masyarakat itu sendiri sebagai mahasiswa disini saya melihat sebagai bukti bawasannya transparansi dan juga akuntabilitas di tubuh DPR ini masih perlu dibebani secara serius hal ini bukan hanya soal satu oknum saja tapi soal kultur ataupun yang harus dirubah karena ketika ruang rapat dijadikan tempat bermain-main apalagi berjudi maka jelas yang sedang dipertaruhkan bukan hanya uang pribadi tapi kepercayaan rakyat secara keseluruhan hal tersebut dapat dipertimbangkan kembali dan juga dapat dijadikan concern terhadap

		perilaku dan juga sifat negatif yang dilakukan oleh DPR tersebut Ninda: Aku setuju karena bahkan pas jaman aku SMA itu tu aku liat video-video rapat DPR atau kaya di YouTube kaya rapat-rapat DPR itu tu kaya ya ampun miris banget mereka disana cuman tidur terus kursinya banyak banget yang kosong itu tu kaya anak kecil maksudnya anak remaja yang melihat seorang DPR itu kan seorang yang wahh DPR gitu dipilih loh dia sama rakyat, dia bisa jadi DPR aja harus lewat pemilu tapi ternyata pas udah kepilih rapat aja ga dateng, pas rapat tidur, atau justru main game online atau bahkan judi online itu kan kaya bare minimumnya itu ga ada sama sekali gitu loh, attitudenya udah nol banget. Dandi: Ini juga mencerminkan dua variable yang negatif gitu. Yang pertama adalah DPR Dewan Perwakilan Rakyat dan bermain judol kan adalah suatu hal yang seharusnya saling berlawanan gitu. Tapi pada kenyataannya ada anggota DPR yang bermain judol online. Kalau kita bicara pada video ini memang ada. Pada masa itu memang ada anggota DPR yang terbukti bermain judul online gitu ketika rapat. Ini kan artinya mencerminkan seberapa mirisnya yang terjadi di Dewan Perwakilan Rakyat kita gitu. Rangga: Nah terus yang di scene kelima ya Di scene kelima ini Aku ingat banget Kejadian salah satu anggota DPR Itu waktu itu lagi rapat DPR RI ya Ya kan cewek Gitu kan Terus kebetulan Itu kan dia itu Pakai ATP
--	--	--

		atau HP Aku lupa Dia Main Apa sih namanya itu Yang judi itu Poker Bukan poker ya Aduh Aku lupa Semacam Semacam itulah gitu kan Terus ketika di klarifikasi Dia Si anggota DPR ini Ngomong gitu Ini candy crush segala macem padahal jelas-jelas itu Terekam kamera Bahwa dia itu Sedang bermain judi gitu kan Nah jadikan Apa ya Hal yang Konten Bukan hal ya Maksudnya konten yang dilakukan oleh Bintang Emon ini Merupakan sebuah Sindiran Kepada Kepada para wakil rakyat Yang Kalau lu misalnya Pengen benar-benar jadi DPR Segala macam Ya udah lu kerja Benar-benar Jangan main judi Apalagi di forum gitu Lu gak menghargai Forum rakyat Kan seperti itu Kita mengatakannya gitu Berarti dia menganggap remeh rakyat Karena di dalam forum permusyawaraan itu Ketika membahas sebuah kebijakan Dia malah bermain hp Yang artinya Yang forum kebijakan itu membahas rakyat Tapi dia bermain hp Itu dia melecehkan rakyat Yang telah memilih dia Kan seperti itu Kita memahaminya Kayak gitu Jadi Kalau semisalnya Ditanya apakah ini terlalu berlebihan Tentu tidak Karena apa yang disampaikan oleh Bintang Emon ini Ini merupakan sebuah Bentuk representasi Dari realita yang terjadi Kayak gitu Itu pendapat dari aku ya Lugas: Oke, aku mau respon dulu pernyataan pertama ya, aku rasa. Emon sedang memberikan satu ketegasan bahwa seringkali ketika anggota-anggota DPR itu gagal untuk mengentaskan permasalahan sosial, dia selalu pada, selalu menggunakan pendekatan-pendekatan teologis. Padahal ini
--	--	--

		adalah permasalahan-permasalahan sosiologis, permasalahan sosial politik yang sebetulnya Tuhan tidak ikut campur di dalam kebengisan yang dibuat oleh anggota DPR itu. Nah kemudian berkaitan dengan anggota DPR yang saat rapat dia main game, apalagi main game yang berbasis judi online, ya aku rasa pasti pandangan umum, pandangan masyarakat itu menganggap bahwa satu dia tidak berintegritas, dua dia mencerminkan adanya ke-kurang-ajar-an yang berlipat ganda, yang dipertontonkan kepada kita. Karena mana mungkin di antara rapat-rapat yang membicarakan kepentingan masyarakat, dia malah buka hp, dia malah bermain game, apalagi judi online. Itu kebodohan yang berlipat ganda aku rasa, dan itu seringkali terjadi. Kuswanto: Kalau terkait dengan yang di media judi online, itu kan hanya orang iseng-iseng saja. Ya, terkadang iseng akhirnya jadi perbuatan. Nah, perbuatan ini kan juga akan merugikan orang lain, juga merugikan diri sendiri. Kalau kita tanggapan saya, ya itu sudah tidak selayaknya lah jadi anggota Dewan melakukan hal semacam itu. Apalagi kita sebagai wakil rakyat, justru malah kita tidak menjadi contoh, malah jadi teladan yang kurang benar. Totok: Kalau sedang rapat DPRD juga main game, berarti oknum DPRD tersebut tidak menghargai daripada rapat tersebut. Oleh karena itu tanggapan saya kalau ada DPRD yang main game ketika ada rapat berarti ada konsekuensinya. Konsekuensinya silakan saja, mungkin tergantung dari kode
--	--	---

		etiknya dan dari partai itu sendiri. Apakah ada kira-kira kategorisasi secara tertulis? Kemudian apakah ada sanksi yang lain? Menurut pendapat saya konsekuensinya harus ada sanksinya kalau anggota Dewan bermain game ketika ada rapat. Siswanto: Pernyataan bahwa anggota DPR merupakan pejabat publik membawa konsekuensi besar, baik secara etis maupun sosial, karena posisi tersebut tidak hanya berfungsi sebagai pembuat kebijakan, tetapi juga sebagai figur panutan di mata masyarakat. Oleh sebab itu, sikap, ucapan, dan tindakan seorang anggota DPR harus mencerminkan nilai-nilai keteladanan yang luhur, seperti kejujuran, integritas, kedisiplinan, kepedulian sosial, dan tanggung jawab publik. Tidak tepat apabila seorang anggota legislatif justru menunjukkan perilaku yang bertentangan dengan norma-norma tersebut, seperti arogansi, ketidaksantunan, atau penyalahgunaan wewenang, karena hal ini akan merusak kepercayaan publik dan mencoreng citra lembaga legislatif secara keseluruhan. Sebagai pejabat publik, mereka memiliki posisi strategis dalam membentuk opini dan perilaku masyarakat, sehingga menjadi penting bagi mereka untuk menjaga sikap yang terpuji dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam tugas kenegaraan. Keteladanan ini bukan hanya dibutuhkan dalam konteks formal seperti rapat dan sidang, tetapi juga dalam interaksi sosial di tengah masyarakat, penggunaan media sosial, serta dalam cara mereka merespons kritik dan masukan. Dengan menjadi teladan yang baik,
--	--	---

			seorang anggota DPR tidak hanya memperkuat legitimasinya sebagai wakil rakyat, tetapi juga ikut membangun budaya politik yang sehat, demokratis, dan bermartabat di Indonesia.
--	--	--	---